



LAPORAN KEUANGAN 2025

Audited

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Periode yang Berakhir :
31 Desember 2025

**BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

**JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Idris Zidan Arif Fakrulloh, S.H., M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Surat Representasi Manajemen	ix
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	83
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	95
F. Pengungkapan Penting Lainnya	102
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran A1 Daftar Rekening Bendahara Satker BKN	
B. Lampiran A2 Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C. Lampiran A3 Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
D. Lampiran A4 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Satker BKN	
E. Lampiran A5 Rincian Piutang Lainnya Satker BKN	
F. Lampiran A6 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Satker BKN	
G. Lampiran A7 Daftar Hibah Langsung berupa Barang/Jasa	
H. Lampiran A8 Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	14
Tabel 1.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 1.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 2.2	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	18
Tabel 2.3	Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	19
Tabel 2.4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP	19
Tabel 2.5	Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker	20
Tabel 2.6	Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker	20
Tabel 2.7	Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker	20
Tabel 2.8	Rincian Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi per Satker	21
Tabel 2.9	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	22
Tabel 2.10	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	23
Tabel 2.11	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	23
Tabel 2.12	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya	24
Tabel 2.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	24
Tabel 2.14	Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program	25
Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	26
Tabel 2.16	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	26
Tabel 2.17	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker	27
Tabel 2.18	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	27
Tabel 2.19	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker	28
Tabel 2.20	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	28
Tabel 2.21	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker	29
Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Lembur	29

Tabel 2.23	Rincian Belanja Lembur per Satker	30
Tabel 2.24	Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	30
Tabel 2.25	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	31
Tabel 2.26	Rincian Belanja Barang per Satker	31
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional	32
Tabel 2.28	Rincian Belanja Barang Operasional per Satker	32
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	33
Tabel 2.30	Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker	33
Tabel 2.31	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan	34
Tabel 2.32	Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker	34
Tabel 2.33	Perbandingan Realisasi Belanja Jasa	35
Tabel 2.34	Rincian Belanja Jasa per Satker	35
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan	36
Tabel 2.36	Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker	37
Tabel 2.37	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	37
Tabel 2.38	Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker	38
Tabel 2.39	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	38
Tabel 2.40	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	39
Tabel 2.41	Rincian Belanja Modal per Satker	39
Tabel 2.42	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40
Tabel 2.43	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	40
Tabel 2.44	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker	41
Tabel 2.45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41
Tabel 2.46	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	41
Tabel 2.47	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	42
Tabel 2.48	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42
Tabel 2.49	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	43
Tabel 2.50	Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker	43
Tabel 2.51	Rincian Capaian Output Prioritas Nasional	44

Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	49
Tabel 3.2	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka	49
Tabel 3.3	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	49
Tabel 3.4	Rincian Piutang Lainnya	50
Tabel 3.5	Rincian Piutang Bukan Pajak per Satker	50
Tabel 3.6	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	51
Tabel 3.7	Rincian Persediaan	51
Tabel 3.8	Rincian Persediaan per Satker	51
Tabel 3.9	Rincian Persediaan Usang per Satker	52
Tabel 3.10	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025	52
Tabel 3.11	Rincian Tanah Per Satker	53
Tabel 3.12	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	55
Tabel 3.13	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	56
Tabel 3.14	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker	56
Tabel 3.15	Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	57
Tabel 3.16	Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per Satker	57
Tabel 3.17	Rincian Hibah (Keluar)	58
Tabel 3.18	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	58
Tabel 3.19	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker	58
Tabel 3.20	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	59
Tabel 3.21	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	60
Tabel 3.22	Rincian Saldo Awal	61
Tabel 3.23	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung	61
Tabel 3.24	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker	62
Tabel 3.25	Rincian Gedung dan Bangunan per Satker	63
Tabel 3.26	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025	64
Tabel 3.27	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker	65
Tabel 3.28	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	66
Tabel 3.29	Rincian Aset Tetap Lainnya	67

Tabel 3.30	Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker	69
Tabel 3.31	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	70
Tabel 3.32	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker	71
Tabel 3.33	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	71
Tabel 3.34	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	72
Tabel 3.35	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	73
Tabel 3.36	Rincian Aset Tak Berwujud per Satker	73
Tabel 3.37	Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	74
Tabel 3.38	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker	74
Tabel 3.39	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025	75
Tabel 3.40	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	75
Tabel 3.41	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	76
Tabel 3.42	Rincian Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	76
Tabel 3.43	Rincian Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	77
Tabel 3.44	Rincian Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap per Satker	77
Tabel 3.45	Rincian Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	77
Tabel 3.46	Rincian Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan per Satker	78
Tabel 3.47	Rincian Aset Lain-Lain per Satker	78
Tabel 3.48	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	79
Tabel 3.49	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	79
Tabel 3.50	Rincian Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar per Satker	80
Tabel 3.51	Rincian Belanja Barang yang masih Harus Dibayar per Satker	80
Tabel 3.52	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker	81
Tabel 3.53	Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka	81
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNBPN	83
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Operasional per Satker	84
Tabel 4.3	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	85
Tabel 4.4	Rincian Beban Pegawai per Satker	85
Tabel 4.5	Perbandingan Rincian Beban Persediaan	86
Tabel 4.6	Rincian Beban Persediaan per Satker	86

Tabel 4.7	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	87
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker	87
Tabel 4.9	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	88
Tabel 4.10	Rincian Beban Pemeliharaan per Satker	88
Tabel 4.11	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas	89
Tabel 4.12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker	89
Tabel 4.13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	90
Tabel 4.14	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	91
Tabel 4.15	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	91
Tabel 4.16	Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker	92
Tabel 4.17	Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	92
Tabel 4.18	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker	92
Tabel 4.19	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	93
Tabel 4.20	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	93
Tabel 4.21	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	94
Tabel 5.1	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	95
Tabel 5.2	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	96
Tabel 5.3	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker	97
Tabel 5.4	Rincian Transaksi Antar Entitas	98
Tabel 5.5	Rincian Transfer Keluar per Satker	99
Tabel 5.6	Rincian Transfer Masuk per Satker	100
Tabel 6.1	Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015	103
Tabel 6.2	Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2025	104


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 23 Februari 2026
Inspektur Badan Kepegawaian Negara



Neny Rochyany, S.Si.Apt., M.Si.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 2463/B-KU.04/SD/K/2026 Jakarta, Mei 2026
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

**Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav.31, Jakarta 10210**

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Badan Kepegawaian Negara memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Badan Kepegawaian Negara telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;
13. Kami telah menilai epektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 *Audited* sebagai asersi final Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Sultan Arif Fakrulloh, S.H., M.H

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026



Kepala Badan Kepegawaian Negara

Prof. Dr. H. E. Arif Fakhri, S.H., M.H.

Arif

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp58.905.511.816,00 atau mencapai 157,24 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp37.462.347.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp842.439.882.646,00 atau mencapai 91,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp919.179.256.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.261.444.203.097,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp21.376.912.657,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.221.708.939.509,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp18.358.350.931,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.817.692.274,00 dan Rp3.257.626.510.823,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.694.737.982,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp895.738.638.805,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp845.043.900.823,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp255.857.243,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp845.299.758.066,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp3.307.045.055.413,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp845.299.758.066,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp11.957.800.414,00 dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp783.923.413.062,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.257.626.510.823,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
I Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	37.462.347.000,00	58.905.511.816,00	157,24	41.462.195.556,00
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-	0,00	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		-	-	0,00	-
3. Pendapatan BLU		-	-	0,00	-
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	37.462.347.000,00	58.905.511.816,00	157,24	41.462.195.556,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		37.462.347.000,00	58.905.511.816,00	157,24	41.462.195.556,00
B BELANJA NEGARA					
I Belanja Pemerintah Pusat	B.2	919.179.256.000,00	842.439.882.646,00	91,65	1.500.101.756.801,00
1. Belanja Pegawai	B.3	415.471.541.000,00	403.269.562.410,00	97,06	374.117.703.451,00
2. Belanja Barang	B.4	431.951.165.000,00	368.152.635.246,00	85,23	954.577.173.848,00
3. Belanja Modal	B.5	71.756.550.000,00	71.017.684.990,00	98,97	171.406.879.502,00
JUMLAH BELANJA NEGARA		919.179.256.000,00	842.439.882.646,00	91,65	1.500.101.756.801,00

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	9.270.300,00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.4	12.877.987.563,00	33.980.518.810,00
Piutang Bukan Pajak	C.5	1.563.061.415,00	6.233.799.930,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(7.815.307,00)	(31.169.000,00)
Persediaan	C.7	6.943.678.986,00	6.343.765.576,00
JUMLAH ASET LANCAR		21.376.912.657,00	46.536.185.616,00
ASET TETAP			
Tanah	C.8	2.342.552.072.368,00	2.331.580.054.368,00
Peralatan dan Mesin	C.9	781.239.544.693,00	768.036.979.101,00
Gedung dan Bangunan	C.10	924.041.534.676,00	896.194.810.778,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	24.984.175.738,00	24.637.574.940,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	14.199.030.707,00	13.675.359.416,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	415.613.806,00	19.621.605.525,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(865.723.032.479,00)	(800.744.594.530,00)
JUMLAH ASET TETAP		3.221.708.939.509,00	3.253.001.789.598,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.15	64.782.022.999,00	59.620.529.497,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	1.126.679.784,00	311.639.851.974,00
Aset Lain-Lain	C.17	18.605.507.827,00	20.550.730.766,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(66.155.859.679,00)	(69.672.001.938,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		18.358.350.931,00	322.139.110.299,00
JUMLAH ASET		3.261.444.203.097,00	3.621.677.085.513,00

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	2.720.044.936,00	313.598.678.284,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.20	1.097.647.338,00	1.033.351.816,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.817.692.274,00	314.632.030.100,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.817.692.274,00	314.632.030.100,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	3.257.626.510.823,00	3.307.045.055.413,00
JUMLAH EKUITAS		3.257.626.510.823,00	3.307.045.055.413,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.261.444.203.097,00	3.621.677.085.513,00

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

af

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	50,694,737,982.00	39,538,699,954.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		50,694,737,982.00	39,538,699,954.00
BEBAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	402,985,820,372.00	373,703,136,554.00
Beban Persediaan	D.3	3,634,041,844.00	6,596,632,606.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	293,110,926,817.00	758,833,704,817.00
Beban Pemeliharaan	D.5	21,377,457,438.00	24,043,517,036.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	68,491,167,564.00	130,157,147,903.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	106,162,578,463.00	106,420,894,744.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(23,353,693.00)	17,432,034.00
JUMLAH BEBAN		895,738,638,805.00	1,399,772,465,694.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(845,043,900,823.00)	(1,360,233,765,740.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.9	(258,696,790.00)	(522,246,218.00)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,839,547.00	22,171,064.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(255,857,243.00)	(500,075,154.00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(845,299,758,066.00)	(1,360,733,840,894.00)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(845.299.758,066,00)	(1.360.733.840,894,00)

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Sidan Arif Fakrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	3.307.045.055.413,00	3.208.549.866.357,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(845.299.758.066,00)	(1.360.733.840.894,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	11.957.800.414,00	(1.771.756.201,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	1.678.100,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	11.952.449.594,00	(1.770.314.301,00)
Lain-Lain	E.3.6	5.350.820,00	(3.120.000,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	783.923.413.062,00	1.461.000.786.151,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(49.418.544.590,00)	98.495.189.056,00
EKUITAS AKHIR	E.5	3.257.626.510.823,00	3.307.045.055.413,00

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zidun Arif Fakhruulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BKN mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

BKN berkomitmen dengan visi **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, BKN memiliki 5 (lima) pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, dalam melaksanakan tugas di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Manajemen ASN;
2. Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
3. Penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
4. Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
5. Pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen ASN terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi ASN;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis Manajemen ASN;

8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis Manajemen ASN;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
11. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKN; dan
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN.

Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029.
6. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.
7. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
8. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
9. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip Aparatur Sipil Negara Melalui Document Management System.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) berfungsi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang menginformasikan terkait data aset dan persediaan. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Pada Tahun Anggaran 2025, BKN memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar Rp919.179.256.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp632.262.955.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp286.916.301.000,00.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada SAP serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BKN adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual, persediaan dinilai dengan menggunakan *Metode First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 3) Dana yang dibatasi penggunaannya, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan dan disajikan sebesar dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan pada batas akhir pengajuan tagihan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BKN telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.735.255.000,00	37.462.347.000,00	9.727.092.000,00
Penerimaan Hibah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	27.735.255.000,00	37.462.347.000,00	9.727.092.000,00
BELANJA NEGARA			
Belanja Pemerintah Pusat	798.342.991.000,00	919.179.256.000,00	120.836.265.000,00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-
JUMLAH BELANJA NEGARA	798.342.991.000,00	919.179.256.000,00	120.836.265.000,00
PEMBIAYAAN			
JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu Belanja Pegawai sebesar Rp60.199.000,00 dan Belanja Barang sebesar Rp183.179.079.000. Sedangkan penurunan atas Belanja Pemerintah Pusat ada pada Belanja Modal sebesar Rp62.403.013.000,00. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	
Belanja Pegawai	415.411.342.000,00	415.471.541.000,00	60.199.000,00
Belanja Barang	248.772.086.000,00	431.951.165.000,00	183.179.079.000,00
Belanja Modal	134.159.563.000,00	71.756.550.000,00	(62.403.013.000,00)
Total Belanja	798.342.991.000,00	919.179.256.000,00	120.836.265.000,00



Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	54.724.729.000,00	234.914.091.000,00
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	656.888.128.000,00	656.135.513.000,00
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	10.703.907.000,00	19.085.786.000,00
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	2.646.429.000,00	5.950.432.000,00
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	73.379.798.000,00	3.093.434.000,00
Total Belanja	798.342.991.000,00	919.179.256.000,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp58.905.511.816,-

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BKN berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada TA 2025 adalah sebesar Rp58.905.511.816,00 atau mencapai 157,24% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp37.462.347.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1.263.581.000,00	1.721.362.830,00	136,23
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	809.410.000,00	888.380.000,00	109,76
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	35.389.356.000,00	48.703.041.000,00	137,62
Pendapatan Denda	-	1.658.885.488,00	0,00
Pendapatan Lain - lain	-	5.933.842.498,00	0,00
Jumlah	37.462.347.000,00	58.905.511.816,00	157,24

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp58.905.511.816,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp1.721.362.830,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp535.134.300,00 yang berasal dari:

Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	247.819.200,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	34.498.000,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	92.630.000,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	9.145.100,00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	15.546.000,00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	100.691.000,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7.785.000,00
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.020.000,00
	Jumlah	535.134.300,00

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp90.181.500,00 yang berasal dari:

Tabel 2.6 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	80.024.000,00
2	Kantor Regional V BKN Jakarta	10.157.500,00
	Jumlah	90.181.500,00

- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp733.095.005,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara, rumah dinas pegawai, maupun ruangan kantor yang berasal dari:

Tabel 2.7 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	602.837.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10.984.500,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	3.600.000,00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	3.000.000,00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	10.442.505,00
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.231.000,00
	Jumlah	733.095.005,00

- d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp362.952.025,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	76.395,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	8.033.100,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	6.828.928,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9.375.960,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6.211.132,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.102.920,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	32.681.436,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	20.042.314,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	15.899.896,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	51.146.592,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	32.858.544,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2.703.352,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	24.858.768,00
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	151.132.688,00
	Jumlah	362.952.025,00

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp888.380.000,00 yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN sebesar Rp501.500.000,00 berupa pendapatan atas pengujian akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN; dan
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp386.880.000,00 berupa pendapatan sertifikasi peserta Pendidikan/atau pelatihan teknis/fungsional kepegawaian.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp48.703.041.000,00 yang berasal dari:
 - a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp3.968.601.000,00; dan
 - b. Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp44.734.440.000,00.
4. Pendapatan Denda sebesar Rp1.658.885.488,00 yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.658.021.938,00;

- b. Kantor Regional IV BKN Makasar berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp74.400,00; dan
- c. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp789.150,00.
- d. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp5.933.842.498,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp456.546.778,00 yang berasal dari:

Tabel 2.9 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	439.607.296,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4.700.308,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	789.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.784.940,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	415.000,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	2.546.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	3.930.950,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	70.150,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.122.727,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	775.159,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	105.450,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	17.949,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	38,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	161,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	126.650,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	555.000,00
	Jumlah	456.546.778,00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.511.588.498,00 yang berasal dari:

Tabel 2.10 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1.365.673.548,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	45.842.160,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	10.026.986,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.316.000,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	6.664.191,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	5.888.500,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.956.653,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	264.957,00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	36.911.300,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	1.997.650,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	5.232.050,00
12	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2.106.000,00
13	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.708.503,00
	Jumlah	1.511.588.498,00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp3.959.404.422,00 yang berasal dari:

Tabel 2.11 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3.851.850.522,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	42.836.400,00
3	Kantor Regional IX BKN Jayapura	22.000.000,00
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.717.500,00
	Jumlah	3.959.404.422,00

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pensiunan PNS sebesar Rp6.000.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
- e. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp302.800,00 berupa penerimaan yang disetor melalui *teller* BPD Kaltim Syariah yang berasal dari Kantor Pusat BKN.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 terdapat kenaikan sebesar 42,07% dikarenakan terdapat kenaikan pendapatan pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar 2,74%, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar 42,44%, dan Pendapatan Lain - lain sebesar 97,55%.

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1.721.362.830,00	1.764.494.681,00	(2,44)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	888.380.000,00	864.700.000,00	2,74
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	48.703.041.000,00	34.190.779.500,00	42,44
Pendapatan Denda	1.658.885.488,00	1.638.455.177,00	1,25
Pendapatan Lain - lain	5.933.842.498,00	3.003.766.198,00	97,55
Jumlah	58.905.511.816,00	41.462.195.556,00	42,07

Realisasi Belanja
Rp842.439.882.646,-

B.2 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat BKN pada TA 2025 sebesar Rp842.439.882.646,00 atau 91,65% dari anggaran belanja sebesar Rp919.179.256.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat pada TA 2025 tersaji sebagai berikut:

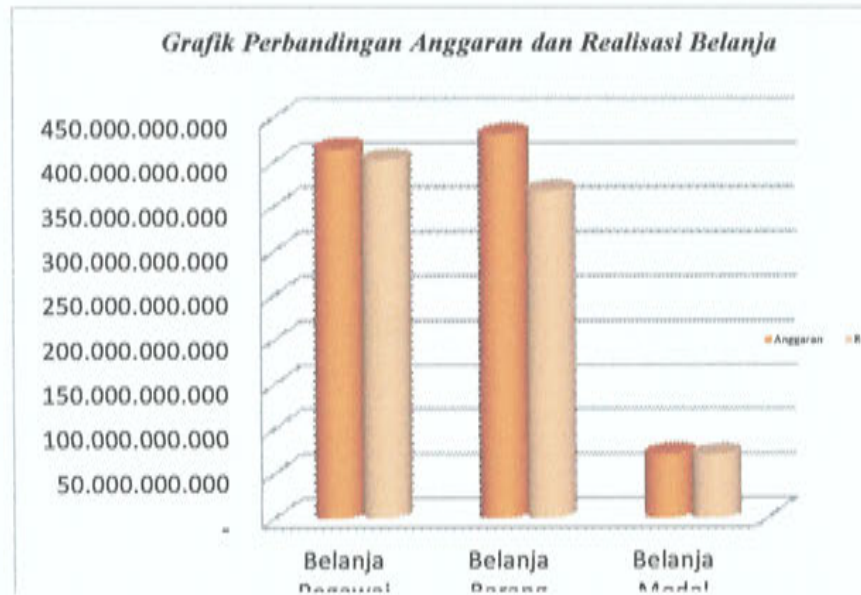
Tabel 2.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	415.471.541.000,00	403.455.586.916,00	97,11
Belanja Barang	431.951.165.000,00	368.667.518.861,00	85,35
Belanja Modal	71.756.550.000,00	71.017.957.990,00	98,97
Jumlah Belanja Kotor	919.179.256.000,00	843.141.063.767,00	91,73
Pengembalian	-	(701.181.121,00)	
Jumlah	919.179.256.000,00	842.439.882.646,00	91,65

Nilai alokasi anggaran sebesar Rp919.179.256.000,00 merupakan nilai total anggaran yang terdiri dari anggaran yang dapat digunakan senilai Rp866.283.974.000,00 dan nilai anggaran yang tidak dapat digunakan karena pagu blokir sebesar Rp53.435.282.000,00.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan program pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	234.914.091.000,00	203.266.449.924,00	86,53
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	656.135.513.000,00	611.835.140.690,00	93,25
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	19.085.786.000,00	18.304.094.826,00	95,90
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	5.950.432.000,00	5.940.764.820,00	99,84
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	3.093.434.000,00	3.093.432.386,00	100,00
Total Belanja	919.179.256.000,00	842.439.882.646,00	91,65

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami penurunan sebesar 43,84% dibandingkan TA 2024. Penurunan realisasi belanja yang sangat signifikan terdapat pada Belanja Barang sebesar 61,43% dan Belanja Modal sebesar 58,57% dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dengan pagu blokir sebesar Rp53.435.282.000,00 yang tidak dapat digunakan namun masih menjadi bagian dari total anggaran keseluruhan.

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	403.269.562.410,00	374.117.703.451,00	7,79
Belanja Barang	368.152.635.246,00	954.577.173.848,00	(61,43)
Belanja Modal	71.017.684.990,00	171.406.879.502,00	(58,57)
Jumlah	842.439.882.646,00	1.500.101.756.801,00	(43,84)

Belanja Pegawai
Rp403.269.562.410,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp403.269.562.410,00 dan Rp374.117.703.451,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,79%. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya kenaikan signifikan terhadap Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar 49,35%.

Tabel 2.16 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	180.474.683.868,00	170.452.708.025,00	5,88
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	11.160.241.931,00	7.472.465.164,00	49,35
5122	Belanja Lembur	2.594.513.691,00	2.508.312.000,00	3,44
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transito	209.226.147.426,00	193.806.998.877,00	7,96
	Jumlah Belanja Kotor	403.455.586.916,00	374.240.484.066,00	7,81
	Pengembalian Belanja Pegawai	(186.024.506,00)	(122.780.615,00)	
	Jumlah Belanja	403.269.562.410,00	374.117.703.451,00	7,79

Adapun Rincian Realisasi Belanja Pegawai BKN TA 2025 sebesar Rp403.269.562.410,00 berasal dari:

Tabel 2.17 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	292.006.437.269,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11.544.792.524,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7.742.698.938,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	10.076.083.789,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10.554.386.546,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	6.742.838.007,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8.237.347.756,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	7.994.389.318,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	7.836.274.364,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5.639.319.872,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	7.452.232.817,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5.752.834.732,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7.765.031.863,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4.591.003.177,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.651.846.317,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.682.045.121,00
	Jumlah	403.269.562.410,00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp180.301.123.908,-

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp180.301.123.908,00 dan Rp170.334.779.116,00 atau terjadi kenaikan sebesar 5,85%.

Tabel 2.18 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

(Dalam Rupiah)

URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	121.921.581.900,00	116.702.248.450,00	4,47
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.785.205,00	1.763.654,00	1,22
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7.596.401.578,00	7.402.214.220,00	2,62
Belanja Tunj. Anak PNS	2.025.992.558,00	1.970.264.720,00	2,83
Belanja Tunj. Struktural PNS	3.988.220.000,00	4.261.745.000,00	(6,42)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	16.239.827.000,00	15.002.313.000,00	8,25
Belanja Tunj. PPh PNS	1.492.496.827,00	1.466.073.801,00	1,80
Belanja Tunj. Beras PNS	5.905.954.050,00	5.630.452.180,00	4,89
Belanja Uang Makan PNS	18.664.689.750,00	15.665.228.000,00	19,15
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	702.215.000,00	695.100.000,00	1,02
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.935.520.000,00	1.655.305.000,00	16,93
Jumlah Belanja Kotor	180.474.683.868,00	170.452.708.025,00	5,88
Pengembalian Belanja	(173.559.960,00)	(117.928.909,00)	
Jumlah Belanja	180.301.123.908,00	170.334.779.116,00	5,85

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2025 sebesar Rp180.301.123.908,00 berasal dari:

Tabel 2.19 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	77.181.715.491,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10.331.570.494,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7.372.053.386,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8.189.712.722,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10.460.821.080,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	6.081.045.505,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7.677.481.193,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	7.359.833.138,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	7.452.377.779,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5.493.418.300,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6.976.322.807,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5.395.240.458,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7.497.197.309,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4.459.714.047,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.326.390.385,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.046.229.814,00
	Jumlah	180.301.123.908,00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp11.160.241.831,-

B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.160.241.831,00 dan Rp7.468.765.908,00.

Tabel 2.20 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.732.122.664,00	5.193.129.200,00	48,89
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	145.730,00	105.364,00	38,31
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	468.627.688,00	295.597.680,00	58,54
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	103.586.560,00	64.575.960,00	60,41
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	869.485.144,00	712.418.000,00	22,05
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	430.579.145,00	277.947.960,00	54,91
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.463.355.000,00	924.866.000,00	58,22
511628	Belanja Tunj Khusus Papua PPPK	11.100.000,00	3.825.000,00	190,20
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	81.240.000,00	-	100,00
	Jumlah Belanja Kotor	11.160.241.931,00	7.472.465.164,00	49,35
	Pengembalian Belanja	(100,00)	(3.699.256,00)	
	Jumlah Belanja	11.160.241.831,00	7.468.765.908,00	49,43

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2025 sebesar Rp11.160.241.831,00 berasal dari:

Tabel 2.21 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	5.233.994.798,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.104.761.030,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	109.150.552,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.630.003.067,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	64.870.466,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	608.745.502,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	218.057.563,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	399.877.180,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	306.392.585,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	70.496.572,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	366.262.010,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	166.100.274,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	123.724.554,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	131.289.130,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	64.201.241,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	562.315.307,00
	Jumlah	11.160.241.831,00

Belanja Lembur
Rp2.594.513.691,-

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.594.513.691,00 dan Rp2.507.159.550,00 atau terjadi kenaikan sebesar 3,48%.

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Belanja Lembur

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
512211	Belanja Uang Lembur	2.431.893.691,00	2.451.916.000,00	(0,82)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	162.620.000,00	56.396.000,00	188,35
	Jumlah Belanja Kotor	2.594.513.691,00	2.508.312.000,00	3,44
	Pengembalian Belanja	-	(1.152.450,00)	
	Jumlah Belanja	2.594.513.691,00	2.507.159.550,00	3,48

Realisasi Belanja Uang Lembur pada TA 2025 sebesar Rp2.594.513.691,00 berasal dari:

ar

Tabel 2.23 Rincian Belanja Lembur per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	377.044.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	108.461.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	261.495.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	256.368.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	28.695.000,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	53.047.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	341.809.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	234.679.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	77.504.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	75.405.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	109.648.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	191.494.000,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	144.110.000,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	261.254.691,00
15	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.500.000,00
	Jumlah	2.594.513.691,00

Belanja Tunjangan
Khusus dan Pegawai
Transito
Rp209.213.682.980,-

B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp209.213.682.980,00 dan Rp193.806.998.877,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,95%.

Tabel 2.24 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	199.728.137.390,00	187.962.206.145,00	6,26
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPK)	9.498.010.036,00	5.844.792.732,00	62,50
	Jumlah Belanja Kotor	209.226.147.426,00	193.806.998.877,00	7,96
	Pengembalian Belanja	(12.464.446,00)	-	
	Jumlah Belanja	209.213.682.980,00	193.806.998.877,00	7,95

Belanja Barang
Rp368.152.635.246,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp368.152.635.246,00 dan Rp954.577.173.848,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 61,43%.

Tabel 2.25 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
5211	Belanja Barang Operasional	70.215.662.650,00	90.468.643.737,00	(22,39)
5212	Belanja Barang Non Operasional	31.417.746.749,00	60.857.739.412,00	(48,38)
5218	Belanja Barang Persediaan	4.315.521.858,00	6.492.904.252,00	(33,53)
5221	Belanja Jasa	171.253.139.729,00	642.634.480.784,00	(73,35)
5231	Belanja Pemeliharaan	22.547.070.474,00	24.187.942.273,00	(6,78)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	68.558.626.895,00	132.466.772.726,00	(48,24)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	359.750.506,00	431.893.602,00	0,00
	Jumlah Belanja Kotor	368.667.518.861,00	957.540.376.786,00	(61,50)
	Pengembalian Belanja	(514.883.615,00)	(2.963.202.938,00)	
	Jumlah Belanja	368.152.635.246,00	954.577.173.848,00	(61,43)

Adapun Realisasi Belanja Barang BKN pada TA 2025 sebesar Rp368.152.635.246,00 berasal dari:

Tabel 2.26 Rincian Belanja Barang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	241.633.004.349,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	8.012.972.369,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8.177.120.901,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8.753.477.086,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	14.075.773.673,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	7.904.591.351,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	6.409.802.897,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	10.180.374.920,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	8.840.857.098,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5.670.263.349,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	9.139.946.390,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	7.127.376.900,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	8.269.179.975,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3.588.484.293,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	5.087.334.689,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.282.075.006,00
	Jumlah	368.152.635.246,00

Belanja Barang
Operasional
Rp70.211.171.723,-

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp70.211.171.723,00 dan Rp90.420.396.479,00 atau mengalami penurunan sebesar 22,35%.

Tabel 2.27 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	64.160.794.435,00	86.922.134.927,00	(26,19)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	227.151.277,00	684.717.268,00	(66,83)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	221.167.035,00	275.039.396,00	(19,59)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.319.902.000,00	1.809.822.300,00	28,18
521119	Belanja Bunga Operasional Lainnya	3.286.647.903,00	776.929.846,00	323,03
	Jumlah Belanja Kotor	70.215.662.680,00	90.468.643.737,00	(22,39)
	Pengembalian Belanja	(4.490.927,00)	(48.247.258,00)	
	Jumlah Belanja	70.211.171.723,00	90.420.396.479,00	(22,35)

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 sebesar Rp70.211.171.723,00 berasal dari:

Tabel 2.28 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	34.065.460.043,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2.253.335.432,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2.041.113.352,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3.076.821.821,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.722.156.446,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	2.353.651.416,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.809.689.532,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3.325.629.127,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	2.701.882.394,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1.325.920.532,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.556.556.445,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2.436.007.856,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2.266.313.326,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	908.415.248,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.152.503.585,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.215.715.168,00
	Jumlah	70.211.171.723,00

Belanja Barang Non
Operasional
Rp31.358.859.249,-

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.358.859.249,00 dan Rp60.827.456.712,00 atau mengalami penurunan sebesar 48,45%.

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
521211	Belanja Bahan	15.171.509.579,00	30.825.059.338,00	(50,78)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.297.280.000,00	25.641.592.400,00	(79,34)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.121.732.796,00	2.099.993.620,00	96,27
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.827.224.374,00	2.265.334.728,00	201,38
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	24.094.326,00	(100,00)
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	-	1.665.000,00	(100,00)
	Jumlah Belanja Kotor	31.417.746.749,00	60.857.739.412,00	(48,38)
	Pengembalian Belanja	(58.887.500,00)	(30.282.700,00)	
	Jumlah Belanja	31.358.859.249,00	60.827.456.712,00	(48,45)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 sebesar Rp31.358.859.249,00 berasal dari:

Tabel 2.30 Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	14.847.060.042,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	857.462.858,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	677.859.105,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	707.034.696,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.629.964.395,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.135.138.583,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	422.758.522,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.170.871.203,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	626.773.011,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	655.842.069,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.111.309.016,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	471.346.050,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.126.234.404,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	249.918.800,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	480.244.080,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.189.042.415,00
	Jumlah	31.358.859.249,00

Belanja Barang
Persediaan
Rp4.315.521.858,-

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.315.521.858,00 dan Rp6.492.904.252,00 atau mengalami penurunan sebesar 33,53%.

Tabel 2.31 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.280.061.858,00	6.421.518.752,00	(33,35)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	35.460.000,00	71.385.500,00	(50,33)
	Jumlah Belanja Kotor	4.315.521.858,00	6.492.904.252,00	(33,53)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	4.315.521.858,00	6.492.904.252,00	(33,53)

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 sebesar Rp4.315.521.858,00 berasal dari:

Tabel 2.32 Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1.986.786.638,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	245.020.055,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	105.075.469,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	184.444.675,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	134.806.018,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	157.094.804,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	87.426.850,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	94.305.750,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	37.019.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	48.500.588,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	101.701.247,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	164.111.483,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	198.533.722,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	167.346.669,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	34.784.001,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	568.564.889,00
	Jumlah	4.315.521.858,00

Belanja Jasa

Rp171.235.007.567,-

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp171.235.007.567,00 dan Rp642.596.000.870,00 atau mengalami penurunan sebesar 73,35%.

Tabel 2.33 Perbandingan Realisasi Belanja Jasa
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
522111	Belanja Langganan Listrik	15.235.719.417,00	18.773.294.279,00	(18,84)
522112	Belanja Langganan Telepon	300.561.310,00	505.961.390,00	(40,60)
522113	Belanja Langganan Air	293.102.385,00	375.136.186,00	(21,87)
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.702.561.227,00	4.399.655.300,00	(61,30)
522141	Belanja Sewa	28.294.022.409,00	71.710.473.283,00	(60,54)
522151	Belanja Jasa Profesi	2.609.936.000,00	2.439.100.000,00	7,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	122.817.236.981,00	544.430.860.346,00	(77,44)
	Jumlah Belanja Kotor	171.253.139.729,00	642.634.480.784,00	(73,35)
	Pengembalian Belanja	(18.132.162,00)	(38.479.914,00)	
	Jumlah Belanja	171.235.007.567,00	642.596.000.870,00	(73,35)

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp171.235.007.567,00 berasal dari:

Tabel 2.34 Rincian Belanja Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	147.657.357.475,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.415.680.091,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.777.239.037,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.650.905.610,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	2.391.472.669,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.549.274.429,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.170.746.518,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.646.509.961,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.312.945.176,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	833.477.832,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.288.851.199,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.550.581.840,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.352.683.670,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	413.979.345,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.003.095.499,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.220.207.216,00
	Jumlah	171.235.007.567,00

Belanja
Pemeliharaan
Rp22.537.370.278,-

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.537.370.278,00 dan Rp24.062.878.754,00 dengan penurunan sebesar 6,34%.

Tabel 2.35 Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.623.625.032,00	9.332.799.112,00	3,12
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	556.976.062,00	490.127.695,00	13,64
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	49.562.849,00	90.282.731,00	(45,10)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	884.165.820,00	737.399.042,00	19,90
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.609.187.209,00	12.235.744.928,00	(13,29)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.552.050,00	173.460.549,00	12,74
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.968.310,00	15.000.000,00	33,12
523132	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	148.412.550,00	(100,00)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54.584.060,00	27.281.978,00	100,07
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	553.449.082,00	937.433.688,00	(40,96)
	Jumlah Belanja Kotor	22.547.070.474,00	24.187.942.273,00	(6,78)
	Pengembalian Belanja	(9.700.196,00)	(125.063.519,00)	
	Jumlah Belanja	22.537.370.278,00	24.062.878.754,00	(6,34)

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp22.537.370.278,00 berasal dari:

Tabel 2.36 Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	9.537.481.367,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	964.473.571,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	633.024.626,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	828.726.736,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.444.704.209,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	808.083.377,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.258.183.478,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	715.252.799,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	934.783.583,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	677.056.763,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	866.907.445,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	650.382.113,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	683.436.781,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	350.502.477,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	698.558.194,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.485.812.759,00
	Jumlah	22.537.370.278,00

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp68.134.954.065,-

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.134.954.065,00 dan Rp129.745.643.179,00 atau mengalami penurunan sebesar 47,49%.

Tabel 2.37 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
524111	Belanja Perjalanan Biasa	53.782.732.346,00	98.382.270.261,00	(45,33)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.088.501.294,00	14.979.348.439,00	(52,68)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.024.169.000,00	8.283.600.200,00	(39,35)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.663.224.255,00	10.821.553.826,00	(75,39)
	Jumlah Belanja Kotor	68.558.626.895,00	132.466.772.726,00	(48,24)
	Pengembalian Belanja	(423.672.830,00)	(2.721.129.547,00)	
	Jumlah Belanja	68.134.954.065,00	129.745.643.179,00	(47,49)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2025 sebesar Rp68.134.954.065,00 berasal dari:

Tabel 2.38 Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	33.179.108.278,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2.277.000.362,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2.942.809.312,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2.305.543.548,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	4.752.669.936,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.901.348.742,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.660.997.997,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.227.806.080,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	3.227.453.934,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.129.465.565,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.214.621.038,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.854.947.558,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2.641.978.072,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.498.321.754,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.718.149.330,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	602.732.559,00
	Jumlah	68.134.954.065,00

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp359.750.506,-

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp359.750.506,00 dan Rp431.893.602,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri BKN merupakan Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri terdapat pada Kantor Pusat BKN. Realisasi belanja perjalanan luar negeri pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 16,70% dibanding TA 2024.

Tabel 2.39 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	359.750.506,00	431.893.602,00	(16,70)
	Jumlah Belanja Kotor	359.750.506,00	431.893.602,00	(16,70)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	359.750.506,00	431.893.602,00	(16,70)

Belanja Modal

Rp71.017.684.990,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.017.684.990,00 dan Rp171.406.879.502,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 58,57%.

Tabel 2.40 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.012.775.691,00	110.124.033.353,00	(53,68)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.665.233.599,00	47.373.986.801,00	(83,82)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	396.760.798,00	-	100,00
5361	Belanja Modal Lainnya	11.943.187.902,00	13.990.664.744,00	(14,63)
	Jumlah Belanja Kotor	71.017.957.990,00	171.488.684.898,00	(58,59)
	Pengembalian	(273.000,00)	(81.805.396,00)	
	Jumlah Belanja	71.017.684.990,00	171.406.879.502,00	(58,57)

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar Rp71.017.684.990,00 berasal dari:

Tabel 2.41 Rincian Belanja Modal per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	51.834.326.059,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2.005.078.957,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	356.248.950,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.909.851.798,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.610.190.693,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	699.762.978,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	862.528.300,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.361.193.357,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	2.823.144.322,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	439.116.800,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.466.808.305,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	708.211.988,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	349.206.999,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	291.970.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.487.549.680,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	812.495.804,00
	Jumlah	71.017.684.990,00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp51.012.775.691,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.012.775.691,00 dan Rp110.120.219.753,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 66,27% dibandingkan dengan TA 2024.

Tabel 2.42 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.981.852.691,00	107.886.706.458,00	(52,75)
532121	Belanja Perambahan Nilai Peralatan dan Mesin	30.923.000,00	2.237.326.895,00	(98,62)
	Jumlah Belanja Kotor	51.012.775.691,00	110.124.033.353,00	(53,68)
	Pengembalian	-	(3.813.600,00)	
	Jumlah Belanja	51.012.775.691,00	110.120.219.753,00	(53,68)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 sebesar Rp51.012.775.691,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.981.852.691,00, berasal dari:

Tabel 2.43 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	37.129.348.332,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.411.685.999,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	356.248.950,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.279.342.250,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	3.253.415.106,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	524.773.864,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	367.257.300,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	963.250.785,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.737.755.013,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	439.116.800,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.236.843.830,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	460.068.979,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	349.206.999,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	291.970.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	369.072.680,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	812.495.804,00
	Jumlah	50.981.852.691,00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.923.000,00 berasal dari:

Tabel 2.44 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	10.878.000,00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	20.045.000,00
	Jumlah	30.923.000,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp7.665.233.599,-

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.665.233.599,00 dan Rp47.295.995.005,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 83,79%.

Tabel 2.45 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.246.822.662,00	42.377.376.008,00	(92,34)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.418.410.937,00	4.996.610.793,00	(11,57)
	Jumlah Belanja Kotor	7.665.233.599,00	47.373.986.801,00	(83,82)
	Pengembalian Belanja Modal	-	(77.991.796,00)	-
	Jumlah Belanja	7.665.233.599,00	47.295.995.005,00	(83,79)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 sebesar Rp7.665.233.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.246.822.662,00 berasal dari:

Tabel 2.46 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3.172.868.426,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	53.965.536,00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	19.988.700,00
	Jumlah	3.246.822.662,00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.418.410.937,00 berasal dari:

Tabel 2.47 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	696.793.399,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	196.632.160,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	576.544.012,00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	336.786.887,00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	174.989.114,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	495.271.000,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	397.942.572,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.065.344.309,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	229.964.475,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	248.143.009,00
	Jumlah	4.418.410.937,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp396.760.798,-

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp396.760.798,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Bangunan pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100%.

Tabel 2.48 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
534131	Belanja Modal Jaringan	297.702.000,00	-	100,00
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	99.058.798,00	-	100,00
	Jumlah Belanja Kotor	396.760.798,00	-	100,00
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah Belanja	396.760.798,00	-	100,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2025 sebesar Rp396.760.798,00 berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Ar

Belanja Modal

Lainnya

Rp11.942.914.902,-

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.942.914.902,00 dan Rp13.990.664.744,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 14,64% dibandingkan dengan TA 2024.

Tabel 2.49 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
536111	Belanja Modal Lainnya	502.502.206,00	12.866.668.300,00	0,00
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	11.440.685.696,00	1.123.996.444,00	917,86
	Jumlah Belanja Kotor	11.943.187.902,00	13.990.664.744,00	(14,63)
	Pengembalian Belanja Modal	(273.000,00)	-	0,00
	Jumlah Belanja	11.942.914.902,00	13.990.664.744,00	(14,64)

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 sebesar Rp11.942.914.902,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp502.502.206,00 berasal dari Kantor Pusat BKN
2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya sebesar Rp11.440.412.696,00 berasal dari:

Tabel 2.50 Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	10.321.935.696,00
2	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.118.477.000,00
	Jumlah	11.440.412.696,00

Prioritas Nasional

B.6 PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

BKN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan Program Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2025, yaitu pada **Prioritas Nasional VII - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan** yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.850.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.804.483.185,00. Adapun program Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh BKN antara lain:

1. Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun;
2. Database Profil ASN;

3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi *Output* dari masing-masing Proyek Prioritas Nasional BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51 Rincian Capaian Output Prioritas Nasional

(Dalam Rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	(%)
1	4845.PBQ.003	Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun	1.500.000.000,00	1.499.006.538,00	99,93	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
2	4847.QMA.001	Database Profil ASN	2.350.000.000,00	2.306.832.553,00	98,16	1	1	Layanan	100,00
3	4848.UAE.001	Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Pemindahan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	2.000.000.000,00	1.998.644.094,00	99,93	100	100	Rekomendasi	100,00
Jumlah			5.850.000.000,00	5.804.483.185,00	99,22				

Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun

B.6.1 Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun

BKN melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara menjalankan program prioritas nasional untuk menyusun Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional ini adalah sebesar Rp1.500.000.000,00. Roadmap Penerapan Sistem Pensiun merupakan Peta jalan penerapan sistem pensiun bagi pegawai ASN sebagai dokumen perencanaan yang memberi arah dan langkah-langkah penyelenggaraan jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk bahan masukan dalam penyusunan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai ASN, sesuai Pasal 21 dan Pasal 22 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Roadmap penerapan sistem pensiun ini, difokuskan pada dua aspek yang menjadi kendala dalam penerapan pensiun saat ini, untuk mewujudkan skema sistem pensiun dan hari tua yang sustainable serta berkeadilan bagi pegawai ASN.

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional pada Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun yaitu sebesar 100% yaitu:

1. Kajian Benchmark Pengelolaan Program Pensiun ASN di beberapa Negara;
2. Kajian Analisis Dampak Skema Perubahan Skema Pembayaran Pensiun melalui KPPN;
3. Laporan Survei Penyelenggaraan Reformasi Pensiun ASN;
4. Simulasi Perhitungan Uji Alternatif Reformasi Sistem Pensiun ASN (3 Alternatif dasar pensiun)

5. Dampak Fiskal Penerapan Sistem Pensiun ASN, uji konsep sampel pada 22 instansi pemerintah; dan
6. Kajian Analisis Rekomendasi Kebijakan Penerapan Sistem Pensiun ASN yang memuat Aspek Regulasi, Aspek Program, Aspek Kelembagaan, dan Aspek Pengawasan.

Terdapat permasalahan yang mengakibatkan proses penyusunan belum maksimal, antara lain:

1. Adanya Efisiensi Anggaran Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian blokir anggaran tersebut baru dibuka pada akhir Agustus 2025, sehingga pada awal tahun yang dilakukan adalah hanya kajian benchmark pengelolaan pensiun dan analisis dampak dengan menggunakan data sekunder dari kajian terdahulu, jurnal, atau buku terkait reformasi pensiun;
2. Adanya Perubahan SOTK BKN sehingga perlu dilakukan penyesuaian POK dengan penamaan unit kerja baru; dan
3. Ketersediaan Data Penghasilan (yang digunakan untuk simulasi reformasi pensiun) tidak ada dalam database BKN sehingga perlu menggunakan sampling data dari 22 Instansi Pemerintah yang dilakukan koordinasi secara langsung kepada instansi pemerintah dan melakukan verifikasi atau cleansing data penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi anggaran pada program prioritas ini adalah Rp1.499.006.538,00 atau sebesar 99,93%. Catatan rekomendasi terkait program prioritas ini, antara lain:

1. BKN perlu memetakan komponen data yang harus dipenuhi dalam penyusunan sistem pensiun antara lain, data SIM gaji yang terdiri atas data penghasilan, data iuran jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan data iuran lainnya; data update kepegawaian; proyeksi pensiun bagi ASN 5 tahun ke depan; peraturan dan lampiran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); data kenaikan jenjang karir; tren kenaikan gaji; kenaikan besaran PDB; dan tingkat pertumbuhan investasi tahunan sebesar 5%;
2. Simulasi perhitungan sistem pensiun agar merujuk pada konsep zero growth atas jumlah pegawai ASN serta potensi kenaikan jenjang karir masing-masing pegawai; dan
3. Untuk merumuskan kelembagaan yang tepat dalam pengelolaan pensiun pegawai ASN, BKN dapat melakukan pengkajian terhadap PT Taspen selaku pengelola dana pensiun ASN sebagai upaya agar pertanggungjawaban dana pensiun ASN dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Database Profil ASN

B.3.2 Database Profil ASN

BKN melalui Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian menjalankan program prioritas nasional untuk menyusun Database Profil ASN dengan target 1 Layanan. Anggaran yang dialokasikan pada program prioritas ini adalah sebesar Rp2.350.000.000,00. Penyelesaian program prioritas ini dilakukan dengan menyusun Peraturan Badan Pengukuran Kualitas Data ASN, membangun Layanan Pengukuran Kualitas Data, meningkatkan Kompetensi Bidang Analisis Data, membangun Portal Data untuk Keperluan Analitik, dan melakukan Pengembangan database profil ASN.

Salah satu strategi percepatan integrasi data dilaksanakan oleh Direktorat PDPIK melalui mekanisme rekonsiliasi data ASN baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai amanat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, sehingga diperlukan perencanaan strategis dan untuk mewujudkan satu data ASN.

Sebagai peningkatan layanan pembinaan dan pengelolaan data ASN untuk efisiensi, efektivitas peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi publik dalam proses Manajemen PNS sehingga diperlukan proses identifikasi data lain dari Pembina/Walidata untuk memperkaya data ASN sehingga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau data *driven policy making*.

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional pada Rincian Output Database Profil ASN yaitu sebesar 100%. yaitu:

1. Tersusun Rancangan Peraturan Badan Satu Data Bidang ASN yang membahas terkait Pengukuran Kualitas Data ASN yang telah diharmonisasi;
2. Terbangunnya Dashboard Pengukuran Kualitas Data ASN; dan
3. Tersusunnya konten data dalam Datasena yang merupakan hasil implementasi dari beberapa kegiatan diantaranya Workshop Pembahasan Permasalahan Referensi Jabatan, In House Training Peningkatan Kompetensi Bidang Analisis Data, Workshop Portal Data untuk Keperluan Analitik, Workshop Penguatan Implementasi Satu Data Indonesia, dan Pengembangan data profil ASN untuk mendukung manajemen talenta seperti Data Diklat PNS, Digitalent Komdigi, Diklat Orientasi PPPK, dan Data CACT BKN.

Terdapat permasalahan dalam proses penyelesaian program pada prioritas ini yaitu:

1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan anggaran terblokir, sehingga pada awal tahun kegiatan baru dapat dilaksanakan pada tahap persiapan. Pembukaan blokir anggaran secara penuh baru dilakukan pada akhir Agustus 2025;
2. Diperlukan waktu untuk melaksanakan proses penjajakan dan koordinasi dengan instansi pemilik data dalam rangka pengembangan data profil ASN, termasuk pelaksanaan proses integrasi data; dan
3. Terdapat arahan Menteri Keuangan terkait sisa kontrak yang tidak dapat direalisasikan.

Realisasi anggaran pada program prioritas ini adalah Rp 2.306.832.553 atau sebesar 98.16%.

Pengawasan dan
Pemberian
Rekomendasi
Penindakan atas
Pelanggaran
Penerapan Sistem
Merit dalam
Manajemen ASN

B.6.3 Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

BKN melalui Pengawasan dan Pengendalian I menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Saat ini target penerapan sistem merit masih menjadi target prioritas nasional pemerintahan, mengingat sistem merit merupakan pintu masuk dari target besar nasional untuk implementasi manajemen talenta di seluruh instansi. Bagi instansi yang hasil

penilaian sistem meritnya telah bernilai sangat baik, dapat mengajukan usul pengecualian dari pelaksanaan seleksi terbuka dalam pemilihan pejabat pimpinan tinggi karena dinilai telah melaksanakan manajemen talenta secara penuh. Untuk itu, target penerapan sistem merit ini, selain dilakukan dengan penilaian secara konsisten terhadap penerapan sistem merit di instansi, juga secara bersamaan dilakukan pengawasan penerapan sistem merit terhadap seluruh aspek yang menjadi kriteria penerapan sekaligus memberikan rekomendasi penegakan atas pelanggaran sistem merit yang dilakukan oleh instansi.

Dengan adanya efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Keuangan, telah dilakukan penyesuaian metode pelaksanaan sebagai upaya percepatan kegiatan dengan menetapkan skala prioritas dan melakukan persamaan persepsi dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi sehingga output sejumlah 100 rekomendasi dapat tercapai hingga akhir tahun dengan cara sebagai berikut:

1. Kegiatan Penegakan akan dilaksanakan pada Triwulan II TA 2025 dengan target 24 Laporan Rekomendasi dan diprioritaskan bagi instansi yang melakukan pelanggaran Sistem Merit atau jika terdapat surat wasdal yang tidak ditindaklanjuti;
2. Kegiatan Pengawasan akan dilaksanakan pada Triwulan III TA 2025 dengan target 36 Laporan Rekomendasi dan instansi yang bernilai kurang yang berpotensi baik; dan
3. Kegiatan Pengawasan akan dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2025 dengan target 40 Laporan Rekomendasi dan instansi yang 2 tahun bernilai dibawah baik.

Sampai dengan Triwulan IV, capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional pada Rincian Output Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yaitu sebesar 100 rekomendasi atau sebesar 100% yang terdiri atas:

1. Telah dilaksanakan kegiatan penegakan (on site investigasi) terhadap instansi yang melakukan pelanggaran sistem merit: 12 Instansi;
2. Telah dilaksanakan kegiatan penegakan (on site investigasi) terhadap instansi dengan Sistem Merit bernilai "Kurang": 37 instansi; dan
3. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (data sekunder) terhadap instansi yang melakukan pelanggaran sistem merit: 51 instansi.

Terdapat permasalahan dalam proses penyelesaian program prioritas ini pada yaitu:

1. Adanya Efisiensi Anggaran Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (terdapat pemblokiran anggaran) sehingga pada awal tahun hanya dilakukan tahap persiapan. Pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan II, namun anggaran masih terblokir sebagian. Kemudian seluruh anggaran baru dibuka blokir seluruhnya pada akhir Agustus 2025; dan
2. Khusus untuk on site investigasi terkait permasalahan kepegawaian diperlukan identifikasi permasalahan dan penentuan skala prioritas instansi untuk dilakukan kegiatan penegakan.

Realisasi anggaran pada program prioritas ini adalah Rp 1.998.644.094 atau sebesar 99,93%.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Bendahara Pengeluaran mengelola Kas di rekening bank. Rincian rekening bank yang dikelola oleh masing-masing satker di BKN disajikan pada Lampiran Utama A1.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNPB. Bendahara Penerimaan terdapat pada satker Kantor Pusat BKN yang mengelola rekening dengan nomor 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengelola rekening dengan nomor 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

Mekanisme penerimaan PNPB dilakukan melalui rekening Bendahara Penerimaan dan penyetoran langsung ke kas negara. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan setara kas lainnya, merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.270.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	9.270.300,00
Jumlah	-	9.270.300,00

Belanja Dibayar di Muka
Rp12.877.987.563,-

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.877.987.563,00 dan Rp33.980.518.810,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	6.914.754,00	9.977.869,00
Biaya Langganan Lisensi	11.450.472.779,00	33.970.540.941,00
Biaya Pendidikan UKT Beasiswa	1.420.600.030,00	-
Jumlah	12.877.987.563,00	33.980.518.810,00

Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A4.

Piutang Bukan Pajak
Rp1.563.061.415,-

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.563.061.415,00 dan Rp6.233.799.930,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	1.563.061.415,00	6.233.799.930,00
Jumlah	1.563.061.415,00	6.233.799.930,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.563.061.415,00 berasal dari piutang lainnya merupakan piutang atas:

Tabel 3.4 Rincian Piutang Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	313.005.818,00
Pengembalian Belanja Barang TA 2025	467.533.135,00
Pengembalian Belanja Modal TA 2025	781.993.891,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	528.571,00
Jumlah	1.563.061.415,00

Piutang Bukan Pajak berasal dari satker sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kantor Pusat BKN	1.237.985.615,00	6.098.444.841,00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	20.670.350,00	4.700.000,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	210.300,00	89.467.560,00
Kantor Regional III BKN Bandung	1.229.780,00	11.811.926,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	29.053.083,00	415.000,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	2.586.000,00	2.546.000,00
Kantor Regional VI BKN Medan	15.854.034,00	5.888.500,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	-	3.026.803,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	24.177.782,00	-
Kantor Regional IX BKN Jayapura	177.016.200,00	15.214.850,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	936.000,00	105.450,00
Kantor Regional XI BKN Manado	3.537.007,00	1.050.000,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	14.094.900,00	-
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	701.200,00	-
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	608.800,00	1.129.000,00
Pusat Pengembangan SDM	34.400.364,00	-
Jumlah	1.563.061.415,00	6.233.799.930,00

Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A5.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
Rp7.815.307,-

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp7.815.307,00 dan Rp31.169.000,00.

Tabel 3.6 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1.563.061.415,00	0,50%	7.815.307,08
Kurang Lancar	-	10%	-
JUMLAH	1.563.061.415,00		7.815.307,08

Persediaan

Rp6.943.678.986,-

C.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.943.678.986,00 dan Rp6.343.765.576,00.

Tabel 3.7 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi	6.309.140.970,00	6.036.557.346,00
Bahan untuk Pemeliharaan	634.538.016,00	307.208.230,00
Jumlah	6.943.678.986,00	6.343.765.576,00

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kantor Pusat BKN	2.834.606.652,00	2.534.143.776,00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	534.098.883,00	511.376.450,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	189.237.213,00	189.783.198,00
Kantor Regional III BKN Bandung	112.464.407,00	117.017.316,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	159.323.645,00	138.744.912,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	299.756.232,00	281.410.213,00
Kantor Regional VI BKN Medan	111.954.037,00	135.650.759,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	108.063.433,00	139.508.535,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	395.721.222,00	417.172.037,00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	284.009.845,00	293.983.986,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	382.691.764,00	332.861.298,00
Kantor Regional XI BKN Manado	157.282.638,00	183.935.025,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	817.278.021,00	744.371.850,00
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	176.680.077,00	145.703.700,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	58.703.696,00	34.093.997,00
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	321.807.221,00	144.008.524,00
Jumlah	6.943.678.986,00	6.343.765.576,00

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp353.207.918,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan usang tersebut berasal dari:

Tabel 3.9 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Pusat BKN	93.285.336,00	CD-RW 700 MB, CD RW, Tali Plastik Stripping Band, Spidol Silver Gold, Ballpoint Pentel, Isi Pentel Hitam, Buku SSP, Amplop Besar BKN Garuda Emas 5 Warna, Amplop Dinas Besar Garuda Coklat, Amplop Kecil BKN Garuda Emas 5 Warna, Amplop Kecil BKN Garuda Mas 4 Warna Buffalo
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	4.500.000,00	Kartu Suami, Kartu Istri
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	25.827.500,00	Formulir model D-II.c, Formulir model D-II.d, Kartu Induk PNS, Kartu Daftar Isi
4	Kantor Regional VII BKN Palembang	81.804.360,00	Buku SSP, Buku Faktur Pajak, Formulir D.II, Kertas Berlogo, Toner Printer HP, Tinta Fax dan Laser Jet
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	136.000,00	Eperisone HCL 50mg, Mefenamic Acid, Simvastatin 10mg, Simvastatin 20 mg, Cetirizine Hydrochloride 10 mg
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	77.754.000,00	Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri
7	Kantor Regional X BKN Denpasar	19.997.800,00	Catridge Epson, Bak Stempel dan Tinta Stempel
8	Kantor Regional XI BKN Manado	9.130.000,00	Kartu Pegawai, Kartu Istri
9	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	40.772.922,00	Blanko D.II.d (Mutasi dll), Blanko D.II.c, Formulir D.I.b, Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri
	Jumlah	353.207.918,00	

Tanah

Rp2.342.552.072.368,-

C.8 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.342.552.072.368,00 dan Rp2.331.580.054.368,00.

Tabel 3.10 Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.331.580.054.368,00
Mutasi Tambah:	10.972.018.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	10.972.018.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	2.342.552.072.368,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.342.552.072.368,00

Rincian mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah berasal dari:

Mutasi Tambah sebesar Rp10.972.018.000,00 berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah yang berasal dari Kantor Regional V BKN DKI Jakarta atas transaksi penilaian kembali Tanah pada UPT BKN Pontianak sesuai dengan Laporan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor: LAP-0019/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2025 Tanggal 17 Maret 2025.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kantor Pusat BKN	790.911.774.000,00	790.911.774.000,00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150.838.792.000,00	150.838.792.000,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	351.559.532.000,00	351.559.532.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	50.955.787.080,00	50.955.787.080,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	90.756.538.500,00	90.756.538.500,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	73.635.208.000,00	62.663.190.000,00
Kantor Regional VI BKN Medan	164.724.060.000,00	164.724.060.000,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	264.364.323.238,00	264.364.323.238,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	18.198.878.840,00	18.198.878.840,00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	40.113.517.000,00	40.113.517.000,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	166.626.748.000,00	166.626.748.000,00
Kantor Regional XI BKN Manado	48.274.100.310,00	48.274.100.310,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	25.270.525.400,00	25.270.525.400,00
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	18.461.628.000,00	18.461.628.000,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.624.710.000,00	4.624.710.000,00
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	83.235.950.000,00	83.235.950.000,00
Jumlah	2.342.552.072.368,00	2.331.580.054.368,00

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2024, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m² senilai Rp342.853.000,00
 - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m² senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan atas nama 4 orang, seluas 591 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
 - b. Surat Keputusan atas nama 2 orang, seluas 262 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.419 m² senilai Rp20.215.074.000,00 yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL.01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2024 tanggal 15 September 2024 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa

sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2025 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 584.427 m², tanah yang belum bersertifikat sebagai berikut:

1. Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Kalimantan Utara menurut Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan luas tanah 14.315 m² senilai Rp913.529.700,00.
2. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tengah, Kota Padang, dengan luas tanah 2.000 m² senilai Rp400.000.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp781.239.544.693,-

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp781.239.544.693,00 dan Rp768.036.979.101,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	768.036.979.101,00
Mutasi Tambah:	50.970.773.271,00
Pembelian	50.837.228.771,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	65.418.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	36.653.500,00
Koreksi Susulan	31.473.000,00
Mutasi Kurang:	(37.768.207.679,00)
Hibah (Keluar)	(1.966.914.125,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(35.801.293.554,00)
Saldo per 31 Desember 2025	781.239.544.693,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(624.605.384.926,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	156.634.159.767,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.012.775.691,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp50.902.646.771,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp110.128.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin untuk penambahan nilai Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Prasasti UPT BKN Mataram sebesar Rp13.519.800,00 pada Kantor Pusat BKN.
2. Perolehan/Penambahan KDP yang menggunakan akun belanja 532111 berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Perangkat Kelistrikan

3. Koreksi kelebihan pembayaran atas kurang volume pekerjaan yang disetorkan pada TA 2026 senilai Rp20.350.733,00 atas pekerjaan Pemasangan Kabel Feeder di Kantor Regional IV BKN Makassar.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.970.773.271,00 berupa:

1. Pembelian sebesar Rp50.837.228.771,00 yang menggunakan akun 532111 berupa:

Tabel 3.13 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	1,316,924,488.00
2	Alat Angkutan	8,284,930,000.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6,310,800.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,172,625,487.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5,539,513,312.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	213,085,950.00
7	Komputer	30,303,838,734.00
	Jumlah	50,837,228,771.00

Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.14 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	37.039.570.145,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.411.685.999,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	356.248.950,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.279.342.250,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	3.233.064.373,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	524.773.864,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	367.257.300,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	963.250.785,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.737.755.013,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	406.596.800,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.234.868.830,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	460.068.979,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	349.206.999,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	291.970.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	369.072.680,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	812.495.804,00
	Jumlah	50.837.228.771,00

2. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp65.418.000,00 yang menggunakan akun 532121 sebesar Rp30.923.000,00 dan akun 532111 sebesar Rp34.495.000,00 berupa:

Tabel 3.15 Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	10.878.000,00
2	Alat Angkutan	22.020.000,00
3	Komputer	32.520.000,00
	Jumlah	65.418.000,00

Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.16 Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	10.878.000,00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	20.045.000,00
3	Kantor Regional IX BKN Jayapura	32.520.000,00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.975.000,00
	Jumlah	65.418.000,00

3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp36.653.500,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp680.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
 - b. Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp35.973.500,00 berupa Komputer.
4. Koreksi Susulan sebesar Rp31.473.000,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp1.500.000,00 berupa pencatatan SSD pada pengembangan NUP *Hard Disk* menggunakan akun belanja 521252.
 - b. Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp29.973.000,00 berupa pencatatan atas penambahan RAM dan peningkatan kapasitas *Hard Disk* menggunakan akun belanja 523121.

Mutasi Kurang transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.768.207.679,00 berupa:

1. Hibah (Keluar) sebesar Rp1.966.914.125,00 pada Kantor Regional X BKN Denpasar sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Kantor UPT BKN Mataram Nomor: 23/PL.03.04/BA/A/2025, tanggal 8 Desember 2025 berupa:

Tabel 3.17 Rincian Hibah (Keluar)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	349.000.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	277.750.000,00
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	690.634.125,00
4	Komputer	649.530.000,00
	Jumlah	1.966.914.125,00

2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp35.801.293.554,00 berupa:

Tabel 3.18 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	151.984.800,00
2	Alat Angkutan	2.345.199.558,00
3	Alat Bengkel	14.550.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.535.700.340,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.821.281.690,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	46.994.000,00
7	Alat Laboratorium	1.077.573.682,00
8	Komputer	24.734.813.484,00
9	Alat SAR	73.196.000,00
	Jumlah	35.801.293.554,00

Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.19 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	25.321.244.965,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.130.748.932,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.173.216.710,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	651.505.912,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	692.469.880,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.872.262.842,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	435.289.767,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.133.182.383,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.140.300.303,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	876.919.464,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	228.837.259,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	17.400.000,00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.072.292.287,00
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.622.850,00
	Jumlah	35.801.293.554,00

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kantor Pusat BKN	405,765,239,734.00	408,640,296,174.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	25,314,673,508.00	25,033,056,441.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	17,514,408,931.00	16,146,753,301.00
Kantor Regional III BKN Bandung	22,134,922,658.00	19,512,770,820.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	36,822,718,273.00	34,249,134,540.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	22,233,342,961.00	23,448,111,459.00
Kantor Regional VI BKN Medan	20,401,133,596.00	20,306,472,583.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	35,938,578,951.00	36,060,514,149.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	25,120,149,948.00	23,897,955,538.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	18,990,127,706.00	19,427,930,370.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	24,462,263,420.00	21,163,271,324.00
Kantor Regional XI BKN Manado	30,311,277,230.00	25,994,616,971.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26,365,521,744.00	26,033,714,745.00
Kantor Regional XIII Banda Aceh	7,188,497,869.00	7,676,020,156.00
Kantor Regional XIV Manokwari	14,745,196,624.00	14,376,123,944.00
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	47,931,491,540.00	46,070,236,586.00
Jumlah	781,239,544,693.00	768,036,979,101.00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Gedung dan Bangunan
Rp924.041.534.676,-

C.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp924.041.534.676,00 dan Rp896.194.810.778,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	896,194,810,778.00
Mutasi Tambah:	29,078,514,663.00
Saldo Awal	1,561,120,458.00
Hibah (Masuk)	389,042,232.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	53,965,536.00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	4,388,609,101.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	21,127,819,932.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	686,943,700.00
Koreksi Susulan	871,013,704.00
Mutasi Kurang:	(1,231,790,765.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1,156,334,765.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(75,456,000.00)
Saldo per 31 Desember 2025	924,041,534,676.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(220,855,495,571.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	703,186,039,105.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.665.233.599,00, sedangkan Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan (Langsung) dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp4.442.574.637,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.222.658.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perolehan/Penambahan KDP atas pekerjaan pembangunan UPT BKN Bandung sebesar Rp79.436.040,00.
2. Pengembangan KDP atas pekerjaan pekerjaan pembangunan UPT BKN Gorontalo sebesar Rp3.016.047.904,00.
3. Pembayaran utang kepada pihak ketiga UPT Mataram sebesar Rp107.186.318,00
4. Kesalahan penggunaan akun belanja 533111 senilai Rp19.988.700,00 untuk pekerjaan Pengadaan Tangki Genset pada Kantor Regional IV BKN Makassar yang seharusnya menggunakan akun ekstrakomptabel.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.078.514.663,00 berupa:

1. Saldo awal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.561.120.458,00 merupakan koreksi pencatatan saldo awal UPT BKN Kendari berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 14 Mei 2025 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 219 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan rincian berupa:

Tabel 3.22 Rincian Saldo Awal

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	29.778.750,00
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	382.359.250,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.148.982.458,00
	Jumlah	1.561.120.458,00

2. Hibah (Masuk) sebesar Rp389.042.232,00 atas transaksi Gedung dan Bangunan yang berasal dari:
 - a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp228.280.811,00 berupa Bangunan Tempat Ibadah sesuai dengan BAST Hibah dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dengan Nomor 105/Ses-YAMP/BAST/II/2025 dan Nomor 2/PL.03.04/BA/KR.I/2025 Tanggal 26 Februari 2025.
 - b. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp160.761.421,00 berupa Bangunan Tempat Olahraga sesuai dengan BAST Hibah dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan Nomor 0005/OT.08.01/UE/KR.XII/2025 dan Nomor 1/HM.04.01/2025 Tanggal 6 Januari 2025.
3. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp53.965.536,00 yang menggunakan akun 533121 berupa Bangunan Tempat Parkir pada Kantor Regional III BKN Bandung.
4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp4.388.609.101,00 yang menggunakan akun belanja 533121 berupa:

Tabel 3.23 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.721.146.595,00
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	248.143.009,00
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	135.870.591,00
4	Pagar Permanen	94.093.884,00
5	Taman Permanen	189.355.022,00
	Jumlah	4.388.609.101,00

Pengembangan Nilai Aset Langsung berasal dari:

Tabel 3.24 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	666.991.563,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	196.632.160,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	576.544.012,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	336.786.887,00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	174.989.114,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	495.271.000,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	397.942.572,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.065.344.309,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	229.964.475,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	248.143.009,00
	Jumlah	4.388.609.101,00

5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp21.127.819.932,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pekerjaan UPT BKN Gorontalo) pada Kantor Pusat BKN.
6. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp686.943.700,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional IX BKN Jayapura berupa pekerjaan renovasi kamar mandi pria sebesar Rp133.053.000,00 dengan menggunakan akun 523111.
 - b. Kantor Pusat BKN berupa kelebihan koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun 2024 yang disetorkan di tahun 2025 sebesar Rp553.890.700,00 untuk pekerjaan pembangunan Kantor UPT BKN Mataram dan Gorontalo.
7. Koreksi Susulan Gedung dan Bangunan menggunakan akun 523111 sebesar Rp871.013.704,00 merupakan penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang berasal dari:
 - a. Kantor Regional IV BKN Makasar berupa pekerjaan pemeliharaan kabel *power* kantor sebesar Rp142.473.717,00.
 - b. Kantor Regional VI BKN Medan berupa pekerjaan renovasi partisi Ruang Subbagian Umum Lantai I, renovasi partisi Ruang *Record Center* Lantai 2, renovasi Ruang *Podcast* Lantai 2 dan Renovasi PTSP Lobby Lantai I sebesar Rp155.447.000,00.
 - c. Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru sebesar Rp273.217.971,00 berupa pekerjaan pemeliharaan halaman parkir sebesar Rp199.645.000,00, pekerjaan pemeliharaan tugu batas sebesar Rp34.987.971,00 dan pekerjaan pemeliharaan pos jaga sebesar Rp38.585.000,00.
 - d. Kantor Regional X BKN Denpasar berupa pekerjaan renovasi toilet Ruang CAT sebesar Rp124.808.036,00.
 - e. Pusat Pengembangan SDM berupa pekerjaan pemeliharaan rangka atap sebesar Rp175.066.980,00.

Mutasi Kurang transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.231.790.765,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp1.156.334.765,00 atas kekurangan volume pekerjaan untuk pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan pembangunan Kantor UPT BKN Mataram dan Gorontalo sebesar Rp884.662.631,00 dan Pekerjaan renovasi Ruang Data sebesar Rp1.156.518,00 pada Kantor Pusat BKN;
 - b. Pekerjaan renovasi toilet sebesar Rp7.477.984,00 pada Kantor Regional VI BKN Medan;
 - c. Pekerjaan renovasi atap dan lantai sebesar Rp21.138.924,00 dan Pekerjaan pemeliharaan atap selasar sebesar Rp2.864.008,00 pada Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru;
 - d. Pekerjaan renovasi gedung kantor TA 2024 sebesar Rp196.317.200,00 pada Kantor Regional IX BKN Jayapura;
 - e. Pekerjaan pengembangan area gerbang masuk TA 2024 senilai Rp42.717.500,00 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.456.000,00 berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar berupa Rumah Negara.

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	369.616.625.506,00	391.550.344.876,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39.731.062.642,00	39.306.149.671,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	27.186.849.423,00	27.186.849.423,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	34.580.583.083,00	33.950.073.535,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	46.894.672.898,00	44.929.747.836,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	31.866.866.317,00	31.691.877.203,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	36.581.827.041,00	35.938.587.025,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	46.207.633.412,00	45.809.690.840,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	24.080.821.180,00	22.766.261.832,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	23.323.839.149,00	23.387.103.349,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	53.264.381.017,00	31.034.256.522,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	50.104.067.682,00	28.334.674.241,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	30.707.898.188,00	30.547.136.767,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6.296.864.104,00	6.296.864.104,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499.327.000,00	499.327.000,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	103.098.216.034,00	102.965.866.554,00
	Jumlah	924.041.534.676,00	896.194.810.778,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp24.984.175.738,-

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.984.175.738,00 dan Rp24.637.574.940,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.637.574.940,00
Mutasi Tambah:	396.760.798,00
Pembelian	297.702.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	99.058.798,00
Mutasi Kurang:	(50.160.000,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(50.160.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	24.984.175.738,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(19.970.725.502,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.013.450.236,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp396.760.798,00, sedangkan Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari transaksi Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp396.760.798,00, sehingga tidak terdapat selisih.

Mutasi Tambah transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp396.760.798,00 berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta yang terdiri dari:

1. Pembelian berupa pekerjaan Pemasangan Kabel Jaringan Listrik sebesar Rp297.702.000,00 menggunakan akun belanja 534131.
2. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berupa pekerjaan Pemeliharaan Panel Listrik MDB sebesar Rp99.058.798,00 menggunakan akun belanja 534161.

Mutasi Kurang transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp50.160.000,00 berasal dari Penghentian aset dari penggunaan pada Kantor Regional III BKN Bandung berupa:

1. Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp27.500.000,00;
2. Jaringan Transmisi Lainnya sebesar Rp22.660.000,00.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	56.071.000,00	56.071.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.322.326.198,00	925.565.400,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	240.296.867,00	290.456.867,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7.319.987.500,00	7.319.987.500,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	127.455.000,00	127.455.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2.540.823.780,00	2.540.823.780,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.879.491.700,00	2.879.491.700,00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.942.634.000,00	2.942.634.000,00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.062.182.000,00	2.062.182.000,00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	2.064.521.123,00	2.064.521.123,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308.174.570,00	308.174.570,00
13	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.100.212.000,00	3.100.212.000,00
	Jumlah	24.984.175.738,00	24.637.574.940,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A2.

*Aset Tetap Lainnya
Rp14.199.030.707,-*

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp14.199.030.707,00 dan Rp13.675.359.416,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13.675.359.416,00
Mutasi Tambah:	1.224.818.000,00
Pembelian	236.341.000,00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	888.477.000,00
Koreksi Susulan	100.000.000,00
Mutasi Kurang:	(701.146.709,00)
Hibah (Keluar)	(432.104.317,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(269.042.392,00)
Saldo per 31 Desember 2025	14.199.030.707,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(291.426.480,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.907.604.227,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp11.942.914.902,00, sedangkan Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.124.818.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.818.096.902,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi untuk Belanja Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.824.437.902,00;
2. Kesalahan penggunaan akun belanja 521252 untuk transaksi Pembelian Lukisan Kanvas senilai (Rp4.361.000,00) di Kantor Regional V BKN Jakarta.
3. Kesalahan penggunaan akun belanja 521111 untuk transaksi Pembelian Lukisan Kanvas sebesar (Rp1.980.000,00) di Kantor Regional III BKN Bandung.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.224.818.000,00 yang terdiri dari:

1. Pembelian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp236.341.000,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional XIV BKN Manokwari berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi menggunakan akun 536121 untuk Pembangunan Mushola sebesar Rp230.000.000,00.
 - b. Kantor Regional V BKN Jakarta berupa Lukisan Kanvas menggunakan akun 521252 sebesar Rp4.361.000,00.
 - c. Kantor Regional III BKN Bandung berupa Lukisan Kanvas sebesar menggunakan akun belanja 521111 sebesar Rp1.980.000,00.

2. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi menggunakan akun 536121 sebesar Rp888.477.000,00 pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari.
3. Koreksi Susulan atas Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa pekerjaan renovasi plafon dan kamar mandi menggunakan akun belanja 523119 sebesar Rp100.000.000,00 pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Mutasi Kurang transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp701.146.709,00 yang terdiri dari:

1. Hibah (Keluar) sebesar Rp432.104.317,00 pada Kantor Regional X BKN Denpasar berupa hibah atas ATR Kantor UPT BKN Mataram kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Kantor UPT BKN Mataram Nomor: 23/PL.03.04/BA/A/2025, tanggal 8 Desember 2025.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp269.042.392,00 berupa:
 - a. Monografi senilai Rp226.219.075,00 pada Kantor Pusat BKN; dan
 - b. Buku senilai Rp42.823.317,00 pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	12.876.193.196,00
2	Bahan Perpustakaan	1.205.118.411,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	117.719.100,00
	Jumlah	14.199.030.707,00

Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) pada BKN merupakan aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik BKN. Nilai ATR tersebut masih tercatat dalam laporan keuangan BKN karena kerja sama pinjam pakai yang masih berlaku. Adapun rincian aset tetap renovasi sebesar Rp12.876.193.196,00 terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp330.933.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Semarang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2028.
2. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp584.934.794,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Serang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2027.
3. Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp1.340.813.225,00 terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Ambon sebesar Rp491.127.225,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2027.

- b. Kantor UPT BKN Mamuju Rp849.686.000,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2028.
4. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp296.942.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Lampung yang berakhir sampai dengan April 2027.
5. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp818.738.074,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Pangkal Pinang sebesar Rp398.897.674,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2029.
 - b. Kantor UPT BKN Jambi sebesar Rp419.840.400,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2026.
6. Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru sebesar Rp1.921.038.381,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Palangka Raya sebesar Rp442.521.200,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
 - b. Kantor UPT BKN Balikpapan sebesar Rp994.989.900,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2029.
 - c. Kantor UPT BKN Tarakan sebesar Rp483.527.281,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Juni 2029.
7. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp759.390.886,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Kupang sebesar Rp759.390.886,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan November 2026.
8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.175.607.217,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Padang sebesar Rp372.780.267,00 yang masa pinjam pakai gedung telah berakhir pada tahun 2021 akan dihibahkan kembali ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Kantor UPT BKN Batam sebesar Rp802.826.950,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
9. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp5.647.794.619,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Sorong sebesar Rp1.661.582.588,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2025.
 - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp3.986.212.031,00 yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan telah bersertifikat atas nama BKN namun proses atas pengesahan hibahnya masih dalam proses.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.30 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	259.736.888,00	485.955.963,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	334.133.500,00	376.956.817,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	50.566.000,00	50.566.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	605.753.844,00	603.773.844,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.399.873.022,00	1.399.873.022,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	301.303.500,00	296.942.500,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838.912.644,00	838.912.644,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.923.788.381,00	1.923.788.381,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9.999.550,00	9.999.550,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	759.390.886,00	1.191.495.203,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	99.972.695,00	99.972.695,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.185.150.817,00	1.185.150.817,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	5.647.794.619,00	4.429.317.619,00
15	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	782.654.361,00	782.654.361,00
	Jumlah	14.199.030.707,00	13.675.359.416,00

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Konstruksi dalam
pengerjaan (KDP)
Rp415.613.806,-

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp415.613.806,00 dan Rp19.621.605.525,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	19.621.605.525,00
Mutasi Tambah:	3.171.742.331,00
Perolehan/Penambahan KDP	155.694.427,00
Pengembangan KDP	3.016.047.904,00
Mutasi Kurang:	(22.377.734.050,00)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(1.249.914.118,00)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif	(21.127.819.932,00)
Saldo per 31 Desember 2025	415.613.806,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	415.613.806,00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.171.742.331,00 berupa:

1. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp155.694.427,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KDP Gedung dan Bangunan atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan pembangunan UPT BKN Bandung sebesar Rp79.436.040,00 menggunakan akun 533111 pada Kantor Pusat BKN; dan
 - b. KDP Peralatan dan Mesin atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan Perangkat Kelistrikan Fasilitas Data Center BKN menggunakan akun 532111 sebesar Rp76.258.387,00 pada Kantor Pusat BKN.
2. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.016.047.904,00 untuk pekerjaan pembangunan UPT BKN Gorontalo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pelunasan Jasa Konsultan Perencana menggunakan akun 533111 sebesar Rp14.900.918,00.
 - b. Biaya Jasa Konsultan Pengawas Termin IV menggunakan akun 533111 sebesar Rp135.764.100,00.

- c. Biaya Pembangunan Termin V menggunakan akun 533121 sebesar Rp2.865.382.886,00.

Mutasi Kurang transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.377.734.050,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.249.914.118,00 yang terdiri atas:
 - a. Pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetor di tahun 2025 sebesar Rp393.430.500,00 atas kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan untuk pembangunan UPT BKN Gorontalo pada Kantor Pusat BKN.
 - b. Kelebihan pembayaran biaya pembangunan UPT BKN Gorontalo senilai Rp856.483.518,00 pada Kantor Pusat BKN.
2. Reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif sebesar Rp21.127.819.932,00 atas penyelesaian pekerjaan pembangunan UPT BKN Gorontalo pada Kantor Pusat BKN.

Rincian KDP per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.32 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	245.597.766,00	19.531.025.525,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	79.436.040,00	-
3	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	90.580.000,00	90.580.000,00
	Jumlah	415.613.806,00	19.621.605.525,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp865.723.032.479,-

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp865.723.032.479,00 dan Rp800.744.594.530,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.33 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	781.239.544.693,00	624.605.384.926,00	156.634.159.767,00
2	Gedung dan Bangunan	924.041.534.676,00	220.855.495.571,00	703.186.039.105,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.984.175.738,00	19.970.725.502,00	5.013.450.236,00
4	Aset Tetap Lainnya	14.199.030.707,00	291.426.480,00	13.907.604.227,00
	Jumlah	1.744.464.285.814,00	865.723.032.479,00	878.741.253.335,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan dalam Lampiran Utama A2.

Aset Tak Berwujud
Rp64.782.022.999,-

C.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp64.782.022.999,00 dan Rp59.620.529.497,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	59.620.529.497,00
Mutasi tambah:	10.906.387.902,00
Pembelian	4.957.098.613,00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	5.867.339.289,00
Transfer Masuk	81.950.000,00
Mutasi kurang:	(5.744.894.400,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(5.744.894.400,00)
Saldo per 31 Desember 2025	64.782.022.999,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(48.444.689.288,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.337.333.711,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp11.942.914.902,00, sedangkan Penambahan dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp10.824.437.902,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.118.477.000,00 yang merupakan Belanja modal lainnya untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi ATB sebesar Rp10.906.387.902,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp4.957.098.613,00 menggunakan akun 536121 berasal dari Kantor Pusat BKN berupa:
 - Software Komputer sebesar Rp96.903.000,00;
 - Lisensi sebesar Rp4.860.195.613,00.
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp5.867.339.289,00 menggunakan akun belanja 536121 di Kantor Pusat BKN berupa:
 - Software Komputer sebesar Rp3.568.307.289,00;
 - Lisensi sebesar Rp2.299.032.000,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp81.950.000,00 pada Kantor Pusat BKN dalam bentuk Aplikasi SIPINTER dari Kemepan RB.

Mutasi Kurang transaksi ATB sebesar Rp5.744.894.400,00 berupa Penghentian Aset dari Penggunaan *Software* Komputer pada Kantor Pusat BKN.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.35 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Hak Cipta	500.000,00	500.000,00
2	<i>Software</i> Komputer	55.303.610.086,00	57.301.344.197,00
3	Lisensi	9.183.867.613,00	2.024.640.000,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	294.045.300,00	294.045.300,00
Jumlah Nilai Perolehan		64.782.022.999,00	59.620.529.497,00
Amortisasi ATB		(48.444.689.288)	(49.968.862.959)
Jumlah		16.337.333.711,00	9.651.666.538,00

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.36 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	61.299.504.099,00	56.138.010.597,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	409.397.750,00	409.397.750,00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	23.850.000,00	23.850.000,00
4	Kantor Regional VII BKN Palembang	886.661.700,00	886.661.700,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729.484.450,00	729.484.450,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	651.566.250,00	651.566.250,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740.391.250,00	740.391.250,00
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.167.500,00	41.167.500,00
Jumlah		64.782.022.999,00	59.620.529.497,00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp1.126.679.784,-

C.16 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dana yang dibatasi penggunaannya pada BKN adalah dana pada rekening penampungan sementara yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang penyelesaian pekerjaannya diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.126.679.784,00 dan Rp311.639.851.974,00. Mutasi transaksi terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37 Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai per 31 Desember 2024	311.639.851.974,00
Mutasi Tambah:	1.126.679.784,00
Penampungan RPATA 2025	1.126.679.784,00
Mutasi Kurang:	(311.639.851.974,00)
Pembayaran RPATA 2024	(311.547.506.574,00)
Penihilan RPATA 2024	(92.345.400,00)
Saldo per 31 Desember 2025	1.126.679.784,00

Adapun rincian dana yang dibatasi penggunaannya per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	1.069.729.784,00	311.198.499.224,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7.000.000,00	7.000.000,00
4	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	7.203.900,00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	378.548.850,00
7	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.950.000,00	48.600.000,00
	Jumlah	1.126.679.784,00	311.639.851.974,00

Aset Lain-Lain
Rp18.605.507.827,-

C.17 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp18.605.507.827,00 dan Rp20.550.730.766,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat

dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.39 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	20.550.730.766,00
Mutasi Tambah:	42.570.455.346,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	42.150.378.346,00
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	420.077.000,00
Mutasi Kurang:	(44.515.678.285,00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(246.185.500,00)
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	(42.999.492.785,00)
Penghapusan	(1.270.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	18.605.507.827,00
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	(17.711.170.391,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	894.337.436,00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp42.570.455.346,00 terdiri atas:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp42.150.378.346,00 berupa:

Tabel 3.40 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	151.984.800,00
2	Alat Angkutan	2.345.199.558,00
3	Alat Bengkel	14.550.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.535.700.340,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.821.281.690,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	46.994.000,00
7	Alat Laboratorium	1.077.573.682,00
8	Komputer	24.734.813.484,00
9	Alat SAR	73.196.000,00
10	Bangunan Gedung	284.988.000,00
11	Jaringan	50.160.000,00
12	Bahan Perpustakaan	269.042.392,00
13	Aset Tak Berwujud	5.744.894.400,00
	Jumlah	42.150.378.346,00

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berasal dari:

Tabel 3.41 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	31.292.358.440,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.173.572.249,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.173.216.710,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	701.665.912,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	767.925.880,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.872.262.842,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	644.821.767,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.133.182.383,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.140.300.303,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	876.919.464,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	228.837.259,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	17.400.000,00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.072.292.287,00
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.622.850,00
	Jumlah	42.150.378.346,00

2. Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp420.077.000,00 berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya berupa:

Tabel 3.42 Rincian Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	384.103.500,00
2	Komputer	35.973.500,00
	Jumlah	420.077.000,00

Mutasi Kurang transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp44.515.678.285,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp246.185.500,00 berupa:

Tabel 3.43 Rincian Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	680.000,00
2	Komputer	35.973.500,00
3	Bangunan Gedung	209.532.000,00
	Jumlah	246.185.500,00

Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap berasal dari:

Tabel 3.44 Rincian Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	680.000,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	35.973.500,00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	209.532.000,00
	Jumlah	246.185.500,00

2. Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan sebesar Rp42.999.492.785,00 berupa:

Tabel 3.45 Rincian Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	285.067.670,00
2	Alat Angkutan	1.157.362.000,00
3	Alat Bengkel	1.900.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.355.173.339,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	942.719.400,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.705.000,00
7	Alat Laboratorium	3.245.000,00
8	Komputer	32.979.971.726,00
9	Peralatan Olahraga	14.190.000,00
10	Jaringan	50.160.000,00
11	Bahan Perpustakaan	263.419.075,00
12	Aset Tak Berwujud	2.900.579.575,00
	Jumlah	42.999.492.785,00

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan berasal dari:

Tabel 3.46 Rincian Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	36.240.065.934,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.841.732.960,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	701.665.912,00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	928.912.759,00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	398.575.667,00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.377.903.414,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	17.400.000,00
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.493.236.139,00
Jumlah		42.999.492.785,00

3. Penghapusan sebesar Rp1.270.000.000,00 berupa Sedan pada Kantor Pusat BKN.

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rincian Aset Lain-lain per Satker
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	7.485.301.349,00	13.703.008.843,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.172.892.249,00	-
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	384.103.500,00	668.516.250,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.676.013.880,00	908.088.000,00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	943.350.083,00	-
6	Kantor Regional VI BKN Medan	410.899.100,00	374.185.000,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.133.182.383,00	-
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	940.375.303,00	1.177.978.414,00
9	Kantor Regional IX Jayapura	2.444.969.580,00	1.568.050.116,00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	228.837.259,00	-
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	9.794.300,00	9.794.300,00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.155.997.937,00	83.705.650,00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	619.790.904,00	619.790.904,00
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1.437.613.289,00
Jumlah		18.605.507.827,00	20.550.730.766,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku Per 31 Desember 2025 tersaji pada Lampiran Utama A2 dan A3.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp66.155.859.679,-

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.155.859.679,00 dan Rp69.672.001.938,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500.000,00	78.563,00	421.437,00
2	Software Komputer	55.303.610.086,00	47.770.180.945,00	7.533.429.141,00
3	Lisensi	9.183.867.613,00	674.429.780,00	8.509.437.833,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	294.045.300,00	-	294.045.300,00
	Jumlah	64.782.022.999,00	48.444.689.288,00	16.337.333.711,00
B	Aset Lain-lain			
		18.605.507.827,00	17.711.170.391,00	894.337.436,00
	Jumlah	83.387.530.826,00	66.155.859.679,00	17.231.671.147,00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan Per 31 Desember 2025 dalam Lampiran Utama A2 dan A3.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp2.720.044.936,-

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.720.044.936,00 dan Rp313.598.678.284,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai dengan 31 Desember 2025, BKN memiliki utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

Tabel 3.49 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	138.058.729,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.455.306.423,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.126.679.784,00
	Jumlah	2.720.044.936,00

Rincian utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp138.058.729,00 merupakan pembayaran atas kekurangan gaji, tunjangan ataupun uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.50 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	60.845.006,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	9.230.164,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	783.030,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.257.595,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	11.753.496,00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	2.847.545,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	701.930,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	5.595.800,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.059.874,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.088.972,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.281.611,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	30.281.932,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.801.425,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3.992.795,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.029.807,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.507.747,00
	Jumlah	138.058.729,00

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.455.306.423,00 merupakan pembayaran atas tagihan pemakaian listrik, telepon, air, pengiriman surat dinas/pos dan tagihan lainnya yang seharusnya menjadi beban tahun 2025, namun baru dibayarkan pada tahun 2026. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.51 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	624.496.948,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	64.088.318,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	47.149.408,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	48.826.095,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	104.062.054,00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	49.891.165,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	57.959.647,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	59.111.404,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	52.157.416,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	24.328.609,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	60.262.761,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	72.786.305,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	58.263.042,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	14.375.453,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	19.308.399,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.239.399,00
	Jumlah	1.455.306.423,00

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.126.679.784,00 terdiri dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas Pembayaran Dana RPATA yang berasal dari:

Tabel 3.52 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1.069.729.784,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7.000.000,00
3	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.950.000,00
	Jumlah	1.126.679.784,00

Pendapatan Diterima di Muka Rp1.097.647.338,-

C.20 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.097.647.338,00 dan Rp1.033.351.816,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran.

Tabel 3.53 Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kantor Pusat BKN	1.047.768.203,00	957.225.510,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	742.172,00	131.661,00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	4.039.909,00	16.632.363,00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	5.304.623,00	3.977.568,00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	634.302,00	2.056.686,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	13.508.450,00	33.798.920,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	16.182.332,00
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.649.679,00	3.346.776,00
	Jumlah	1.097.647.338,00	1.033.351.816,00

Rincian Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Utama A6.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,-*

C.21 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

*Ekuitas
Rp3.257.626.510.823,-*

C.22 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.257.626.510.823,00 dan Rp3.307.045.055.413,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp50.694.737.982,-*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBPN pada BKN untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.694.737.982,00 dan Rp39.538.699.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNBPN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	668.799.483,00	920.690.374,00	(27,36)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya	362.952.025,00	465.900.000,00	(22,10)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	888.380.000,00	864.700.000,00	2,74
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.968.601.000,00	4.499.616.000,00	(11,80)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	44.734.440.000,00	29.691.163.500,00	50,67
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	71.565.474,00	3.096.327.280,00	(97,69)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	302.800,00	(100,00)
TOTAL	50.694.737.982,00	39.538.699.954,00	28,22

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami kenaikan sebesar 28,22% dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan oleh adanya kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya sebesar 50,67% yang berasal dari uji penilaian kompetensi ASN yang ada di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Berdasarkan LRA, BKN memperoleh PNBPN sebesar Rp58.905.511.816,00. Sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp50.694.737.982,00, terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp8.210.773.834,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA yang dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional pada Laporan Operasional sebesar Rp724.003.823,00.
2. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp68.478.052,00.
3. Penyesuaian Piutang Lainnya untuk Pendapatan Non Operasional Lainnya TA 2024 sebesar Rp4.645.791.250,00.
4. Penyesuaian Piutang Lainnya atas Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.587.320.014,00.
5. Penyesuaian Piutang Lainnya atas Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.000.000,00.
6. Pendapatan Lain-Lain atas kesalahan setor yang ada pada saldo kas pada RKK Ops BRI sebesar Rp302.800,00.

7. Jurnal koreksi terhadap Pengembalian Belanja Modal TAYL sebagai transaksi atas pengurang aset sebesar Rp1.090.715.025,00.
8. Pendapatan yang berasal dari penihilan atas transaksi RPATA TA 2024 sebesar Rp92.345.400,00.

Adapun Pendapatan Operasional BKN per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Operasional per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	45.819.012.626,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	18.407.089,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	10.428.928,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9.375.960,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6.285.532,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	16.695.374,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	41.796.886,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	20.042.314,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	15.899.896,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	51.146.592,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	34.280.928,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	22.993.822,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	41.830.250,00
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.586.541.785,00
	Jumlah	50.694.737.982,00

Beban Pegawai
Rp402.985.820.372,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp402.985.820.372,00 dan Rp373.703.136.554,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	180.049.960.099,00	169.982.321.863,00	5,92
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	11.148.212.381,00	7.438.496.458,00	100,00
Beban Lembur	2.594.787.691,00	2.507.159.550,00	3,50
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	209.192.860.201,00	193.775.158.683,00	7,96
JUMLAH	402.985.820.372,00	373.703.136.554,00	7,84

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pegawai pada BKN adalah sebesar Rp403.269.562.410,00, sedangkan Beban Pegawai LO sebesar Rp402.985.820.372,00. Terdapat selisih antara Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO sebesar Rp283.742.038,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar (Rp29.263.780,00).
2. Pencatatan atas Piutang Lainnya untuk Pengembalian Belanja TA 2026 sebesar Rp313.005.818,00.

Adapun Beban Pegawai BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	291.738.648.747,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11.532.249.658,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7.742.235.095,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	10.074.401.404,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10.556.302.154,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	6.741.775.493,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8.228.515.071,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	7.998.635.942,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	7.833.308.458,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5.637.328.750,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	7.450.996.048,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5.772.977.943,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7.752.738.388,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4.592.929.063,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.651.450.082,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.681.328.076,00
	Jumlah	402.985.820.372,00

Beban Persediaan
Rp3.634.041.844,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.634.041.844,00 dan Rp6.596.632.606,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.5 Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.634.041.844,00	6.596.632.606,00	(44,91)
JUMLAH	3.634.041.844,00	6.596.632.606,00	(44,91)

Adapun Beban Persediaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1.489.785.879,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	227.823.766,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	110.393.314,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	187.646.544,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	150.951.255,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	170.630.596,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	135.823.957,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	73.382.472,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	71.212.225,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	44.433.264,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	98.345.441,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	223.463.009,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	79.887.626,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	110.546.736,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	12.170.248,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	447.545.512,00
	Jumlah	3.634.041.844,00

Beban Barang dan Jasa
Rp293.110.926.817,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp293.110.926.817,00 dan Rp758.833.704.817,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.7 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	92.755.823.569,00	56.577.086.646,00	63,95
Beban Barang Non Operasional	23.036.632.262,00	58.540.970.750,00	(60,65)
Beban Langganan Daya dan Jasa	170.464.331.112,	641.415.920.667,00	(73,42)
Beban Aset Ekstrakontabel Peralatan dan Mesin	6.820.631.374,00	2.273.967.428,00	199,94
Beban Aset Ekstrakontabel Gedung dan Bangunan	33.508.500,00	24.094.326,00	0,00
Beban Aset Ekstrakontabel Aset Tetap Lainnya	-	1.665.000,00	0,00
JUMLAH	293.110.926.817,00	758.833.704.817,00	(61,37)

Adapun Beban Barang dan Jasa BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	218.493.655.910,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4.521.449.279,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4.475.256.469,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5.426.924.642,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	7.747.839.650,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	2.795.358.667,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	5.013.879.969,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3.395.809.197,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	7.102.456.293,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4.615.926.362,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	4.945.037.330,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	4.463.371.409,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	4.718.573.990,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.568.831.390,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2.632.190.000,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.194.366.260,00
	Jumlah	293.110.926.817,00

Beban Pemeliharaan
Rp21.377.457.438,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.377.457.438,00 dan Rp24.043.517.036,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.9 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.588.443.868,00	8.772.953.198,00	(2,10)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	49.562.849,00	90.282.731,00	(45,10)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	776.706.620,00	741.443.844,00	4,76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.617.606.409,00	12.154.009.628,00	(12,64)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.968.310,00	15.000.000,00	33,12
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	143.401.074,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	54.584.060,00	26.773.203,00	103,88
Beban Pemeliharaan Lainnya	545.149.082,00	937.433.688,00	(41,85)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	725.436.240,00	1.162.219.670,00	(37,58)
JUMLAH	21.377.457.438,00	24.043.517.036,00	(11,09)

Adapun Beban Pemeliharaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Beban Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	9.706.389.255,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	958.947.427,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	628.252.766,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	829.644.576,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.265.962.522,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	558.045.228,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	778.671.316,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.011.790.493,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	748.241.819,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	648.823.202,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	687.558.749,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	617.682.974,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	729.176.706,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	376.326.033,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	594.954.452,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.236.989.920,00
	Jumlah	21.377.457.438,00



Beban Perjalanan Dinas
Rp68.491.167.564,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.491.167.564,00 dan Rp130.157.147.903,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.11 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.378.642.509,00	96.267.045.229,00	(44,55)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.067.201.294,00	14.649.200.320,00	(51,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.024.169.000,00	8.276.920.200,00	(39,30)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.661.404.255,00	10.532.088.552,00	(74,73)
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	359.750.506,00	431.893.602,00	(16,70)
JUMLAH	68.491.167.564,00	130.157.147.903,00	(47,38)

Adapun Beban Perjalanan Dinas BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	33.538.858.784,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2.277.000.362,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2.942.809.312,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2.305.543.548,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	4.752.669.936,00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.901.348.742,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.660.997.997,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.227.806.080,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	3.227.453.934,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.129.465.565,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.214.621.038,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.851.410.551,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2.641.978.072,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1.498.321.754,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.718.149.330,00
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	602.732.559,00
	Jumlah	68.491.167.564,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp106.162.578.463,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106.162.578.463,00 dan Rp106.420.894.744,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.741.528.108,00	74.726.689.255,00	(1,32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.755.250.533,00	26.957.031.358,00	2,96
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	206.736.184,00	429.194.805,00	(51,83)
Beban Penyusutan Irigasi	107.984.587,00	109.373.225,00	(1,27)
Beban Penyusutan Jaringan	122.850.224,00	115.407.766,00	6,45
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60.285.834,00	60.285.834,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	56.411.664,00	37.736.023,00	49,49
Jumlah Penyusutan	102.051.047.134,00	102.435.718.266,00	(0,38)
Beban Amortisasi			
Beban Amortisasi Software	3.511.087.007,00	3.883.937.336,00	(9,60)
Beban Amortisasi Hak Cipta	7.142,00	7.142,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	27.239.400,00	-	100,00
Beban Amortisasi Lisensi	573.197.780,00	101.232.000,00	0,00
Jumlah Amortisasi	4.111.531.329,00	3.985.176.478,00	3,17
JUMLAH	106.162.578.463,00	106.420.894.744,00	(0,24)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp(23.353.693,-)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(23.353.693,00) dan Rp17.432.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(23.353.693,00)	17.432.034,00	100,00
JUMLAH	(23.353.693,00)	17.432.034,00	(233,97)

Kegiatan Non
Operasional
Rp(255.857.243,-)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(255.857.243,00) dan Rp(500.075.154,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(258.696.790,00)	(522.246.218,00)	(50,46)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	625.315.800,00	436.080.789,00	43,39
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	884.012.590,00	958.327.007,00	(7,75)
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.839.547,00	22.171.064,00	(87,19)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	98.688.023,00	183.628.968,00	(46,26)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.848.476,00	161.457.904,00	(40,64)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	(255.857.243,00)	(500.075.154,00)	(48,84)

Defisit Kegiatan Non Operasional pada TA 2025 sebesar Rp(255.857.243,00) berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp625.315.800,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp535.134.300,00 yang berasal dari:

Tabel 4.16 Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	247.819.200,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	34.498.000,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	92.630.000,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	9.145.100,00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	15.546.000,00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	100.691.000,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7.785.000,00
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.020.000,00
	Jumlah	535.134.300,00

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp90.181.500,00 yang terdiri atas:

Tabel 4.17 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	80.024.000,00
2	Kantor Regional V BKN Jakarta	10.157.500,00
	Jumlah	90.181.500,00

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp884.012.590,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:

Tabel 4.18 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	407.647.645,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	15.566.171,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	37.244.620,00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	6.500.000,00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	386.354.154,00
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.700.000,00
	Jumlah	884.012.590,00

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp98.688.023,00 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp29.804.442,00 yang berasal dari:

Tabel 4.19 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	24.048.650,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	308,00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	3.930.950,00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	1.122.727,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.009,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	17.949,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	38,00
8	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	161,00
9	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	126.650,00
10	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	555.000,00
Jumlah		29.804.442,00

b. Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp68.883.581,00 yang berasal dari:

Tabel 4.20 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	4.303.630,00
2	Kantor Regional IV BKN Makassar	3.316.000,00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	6.664.191,00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	264.957,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	22.469.600,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	947.650,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	5.232.050,00
8	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	977.000,00
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.708.503,00
Jumlah		68.883.581,00

4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp95.848.476,00 berupa Beban Persediaan Rusak/Usang yang berasal dari:

Tabel 4.21 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	17.293.120,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	1.297.800,00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	36.272.600,00
4	Kantor Regional VII BKN Palembang	19.379.360,00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	19.997.800,00
6	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.607.796,00
	Jumlah	95.848.476,00

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.307.045.055.413,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.307.045.055.413,00 dan Rp3.208.549.866.357,00.

Surplus (Defisit) LO
(Rp845.299.758.066,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp845.299.758.066,00) dan (Rp1.360.733.840.894,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp11.957.800.414,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.957.800.414,00 dan (Rp1.771.756.201,00). Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	1.678.100,00	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	11.952.449.594,00	(1.770.314.301,00)	(775,16)
Koreksi Lain-Lain	5.350.820,00	(3.120.000,00)	(271,50)
JUMLAH	11.957.800.414,00	(1.771.756.201,00)	(774,91)

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.678.100,00.

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Tidak terdapat koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp11.952.449.594,-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.952.449.594,00 dan (Rp1.770.314.301,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5.2 Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Debit	Kredit	
A. Aset Tetap			
Tanah	10.972.018.000,00	-	10.972.018.000,00
Peralatan dan Mesin	87.973.437,00	86.473.437,00	1.500.000,00
Gedung dan Bangunan	2.329.094.158,00	1.204.727.331,00	1.124.366.827,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	1.357.100.436,00	(1.357.100.436,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	32.520.000,00	(32.520.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.768.682,00	565.437.546,00	(549.668.864,00)
B. Lain-Lain			-
Piutang Lainnya	1.383.572.749,00	-	1.383.572.749,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	107.186.318,00	-	107.186.318,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	436.148.000,00	-	436.148.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	133.053.000,00	(133.053.000,00)
Jumlah	15.331.761.344,00	3.379.311.750,00	11.952.449.594,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari:

Tabel 5.3 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	1.703.117,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	1.500.000,00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.008.069.576,00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	10.971.137.239,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	(30.445.764,00)
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	485.426,00
	Jumlah	11.952.449.594,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp11.952.449.594,00 terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp1.703.117,00 merupakan penyesuaian nilai akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan kekurangan volume pekerjaan untuk pembangunan Kantor UPT BKN Mataram dan Gorontalo.
2. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp1.500.000,00 berupa koreksi pencatatan SSD pada pengembangan NUP *Hard Disk* menggunakan akun belanja 521252.
3. Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp1.008.069.576,00 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi saldo awal sebesar Rp1.561.120.458,00 merupakan koreksi pencatatan saldo awal UPT BKN Kendari berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 14 Mei 2025 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 219 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tanggal 29 Maret 2018 pada Kanreg IV BKN Makassar.
 - b. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp553.050.882,00).
4. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp10.971.137.239,00 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi Nilai Tanah sebesar Rp10.972.018,00 yang merupakan koreksi atas transaksi penilaian kembali Tanah pada UPT BKN Pontianak sesuai dengan Laporan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor: LAP-0019/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2025 Tanggal 17 Maret 2025.
 - b. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp880.761,00) merupakan koreksi pencatatan transaksi pekerjaan Backdrop dan Panggung Aula Kantor yang sebelumnya pembelian menjadi pengembangan.
5. Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar (Rp30.445.764,00) yang terdiri dari:

- a. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar (Rp32.520.000,00) yang berasal dari koreksi pencatatan transaksi pembelian SSD yang sebelumnya pembelian menjadi pengembangan.
 - b. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp6.436.630,00 atas koreksi pencatatan kekurangan volume pekerjaan renovasi gedung kantor TA 2024.
 - c. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp4.362.394,00) merupakan koreksi pencatatan atas pekerjaan renovasi kamar mandi pria yang menggunakan akun 523111.
6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp485.426,00 merupakan penyesuaian nilai akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan kekurangan volume pekerjaan pengembangan area gerbang masuk TA 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Koreksi Lain-lain
Rp5.350.820,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.350.820,00 dan (Rp3.120.000,00). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp783.923.413.062,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp783.923.413.062,00 dan Rp1.461.000.786.151,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Tabel 5.4 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	842.439.882.646,00
2. Diterima dari Entitas Lain	(58.905.511.816,00)
3. Transfer Keluar	(139.254.973.813,00)
4. Transfer Masuk	139.254.973.813,00
5. Pengesahan Hibah Langsung	389.042.232,00
Jumlah	783.923.413.062,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga berakhir 31 Desember 2025, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp842.439.882.646,00.

2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2025, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp58.905.511.816,00).

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp139.254.973.813,00) merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Transfer Keluar Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	(2.877.675,00)
	Peralatan dan Mesin	(14.626.959.620,00)
	Gedung dan Bangunan	(86.239.314.132,00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.598.128.756,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.298.295.579,00
	Kontribusi Dalam Pengerjaan	(79.436.040,00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	(22.700.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.025.000,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	Gedung dan Bangunan	(21.714.891.784,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	434.297.836,00
Kantor Regional XI BKN Manado	Gedung dan Bangunan	(21.127.819.932,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	211.278.199,00
JUMLAH		(139.254.973.813,00)

4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp139.254.973.813,00 merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Transfer Masuk Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Software	81.950.000,00
	Peralatan dan Mesin	22.700.000,00
	Gedung dan Bangunan	42.842.711.716,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.025.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(645.576.035,00)
	Akumulasi Amortisasi Software	(81.950.000,00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	2.171.349.890,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(646.380.570,00)
Kantor Regional III BKN Bandung	Peralatan dan Mesin	1.992.815.500,00
	Konstruksi Dalam pengerjaan	79.436.040,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(329.801.787,00)
Kantor Regional IV BKN Makasar	Peralatan dan Mesin	32.989.240,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.839.620,00)
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Barang Konsumsi	2.469.750,00
	Peralatan dan Mesin	132.720.480,00
Kantor Regional VI BKN Medan	Peralatan dan Mesin	132.720.480,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	Peralatan dan Mesin	47.996.400,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Peralatan dan Mesin	604.694.700,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	Peralatan dan Mesin	4.257.899.650,00
	Gedung dan Bangunan	43.590.243.768,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(413.296.616,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(871.804.876,00)
Kantor Regional XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	3.856.591.280,00
	Gedung dan Bangunan	42.649.070.364,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(416.628.163,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(426.490.703,00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	292.800.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(292.800.000,00)
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Barang Konsumsi	407.925,00
	Peralatan dan Mesin	1.104.382.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(474.382.000,00)
JUMLAH		139.254.973.813,00

5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp389.042.232,00. Pengesahan Hibah Langsung berasal dari:

- a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp228.280.811,00 berupa 1 (satu) unit gedung/bangunan masjid seluas 441m² sesuai dengan BAST Hibah Nomor: 105/Ses-YAMP/BAST/II/2025 dan Nomor: 2/PL.03.04/BA/KR.I/2025, pada tanggal 26 Februari 2025.
- b. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp160.761.421,00 berupa 1 (satu) unit gedung/bangunan lapangan tenis seluas 629m² sesuai dengan BAST Hibah Nomor: 0008/OT.08.01/BA/KR.XII/ 2025 dan Nomor: 1/PL.0.04/BA/2025, pada tanggal 6 Januari 2025.

6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir
Rp3.257.626.510.823,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp3.257.626.510.823,00 dan Rp3.307.045.055.413,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas 7.390,5 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.400 m² dimana pencatatannya ada dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat berdasar pada PMK nomor 59 tanggal 20 Juli 2005, yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Assesment* yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-

daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian *Memorandum of Understanding* (MoU) Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
1	Semarang	030/0021617 19 Januari 2023	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pinjam Pakai s/d Januari 2028
2	Jambi	60.1/SETDA.pbmd-2.3/2021 8/HM.05.01/2021 05 Maret 2021	Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d Maret 2026
3	Serang	42/2025 12/HM.04.01/2025 03 Maret 2025	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung	Pinjam Pakai s/d Maret 2027
4	Ambon	011-26 Tahun 2022 7/HM.05.01/2022 08 Maret 2022	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amanatelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2027
5	Sorong	030/448/2017 & 22/A/KS/2017, tgl 23 Mei 2017 Surat Sekda No.: 800/281/2022, tgl 6 Juni 2022	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pinjam Pakai s/d Mei 2025
6	Mamuju	B-800/512/2023 11/HM.04.01/2023 06 Maret 2023	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2028
7	Palangka Raya	900/146/BPKAD/2023 5/HM.04.01/2023 22 Februari 2023	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	Pinjam Pakai s/d April 2028
8	Lampung	415.A/1753/VI.02/2022 15/HM.05.01/2022 18 Mei 2022	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Tehuk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pinjam Pakai s/d April 2027
9	Batam	124/900.1.4.3/IV/2023 13/HM.04.01/2023 03 April 2023	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pinjam Pakai s/d April 2028
10	Balikpapan	032/0186/BKAD 3/HM.04.01/2024 01 Februari 2024	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggian Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	Pinjam Pakai s/d Februari 2029
11	Pangkal Pinang	02/PPP/BAKEUDA/II/2024 26/HM.04.01/2024 29 Februari 2024	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Pangkalpinang, Bangka Belitung	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d Februari 2029
12	Tarakan	032/ASET-III/003/2024 10/HM.04.01/2024 07 Maret 2024	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	Pinjam Pakai s/d Juni 2029
13	Kupang	BU.028/4025/BPKAD/XI/2025 14/PL.02.03/BA/2025 03 November 2025	Jl. Timor Raya Km.36-Oelamasi	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d November 2026

Berdasarkan MOU Pinjam Pakai antara BKN dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor: 030/448/2017 dan 22/A/KS/2017 tanggal 23 Mei 2017, perjanjian pinjam pakai tanah, gedung dan bangunan UPT Sorong telah berakhir pada Mei 2022. Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Sorong Nomor: 800/281/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemda Kabupaten Sorong Papua Barat, UPT Sorong masih diperbolehkan menempati Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2022-2025. Pada tanggal 15 Januari 2025, Kanreg XIV BKN Manokwari telah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten sesuai dengan Nomor: 1300/B-PL.02.03/SD/A/2025. Bupati Sorong menerbitkan Surat Keterangan No. 000-2-3-2/3856 tanggal 13 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan penambahan waktu penggunaan sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Pada tanggal 12 Januari 2026, Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari melalui surat No 36/B-PL.03.04/SD/KR.XIV/I/2026, mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Sorong dan telah di balas oleh Bupati Sorong melalui surat No 000.2.5/235 tanggal 27 Januari 2026 yang memberikan penambahan waktu penggunaan sampai dengan bulan Desember tahun 2027.

Dari 21 UPT yang dimiliki BKN sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 UPT yang telah tercatat mempunyai kepemilikan atas Tanah dan Gedung Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2025

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
1	Kendari	028/947 KR.IV.K.26-25/P.7-44/2018 15 Februari 2018	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2018
2	Gorontalo	900/BKPG/2946/IX/2022 23/PL.03.04/KE/K/2022 22 Agustus 2022	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2022
3	Padang	030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 03/HM.04.01/BA/A/2023 27 Februari 2023	Jl. Adinegoro No 6-7, Kota Padang	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Hibah TA 2023
4	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang	Tanah dan Gedung Bangunan sendiri
5	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2021
6	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2021
7	Pontianak	01/BAST-BKAD-F/2023 01/HM.04.01/BA/A/2023 02 Januari 2023	Jl. A Sood, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak	Kantor Regional V BKN Jakarta	Hibah TA 2023

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
8	Mataram	900/326.a/BPKAD/2017 18/K/KS/III/2017 02 Maret 2017	Jl. Majapahit No. 15 Mataram	Kantor Regional X BKN Denpasar	Hibah TA 2017
9	Jambi	3228/BAST/BPKD-7.2/2021 47/HM.05/01/2021 30 Desember 2021	Jl. Jambi Palembang KM.11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Hibah TA 2021
10	Pangkal Pinang	980/11/1/2021 32/HM.05.01/2021 04 Agustus 2021	Jl. Lanjutan Pulau Lepar, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu	Kantor Regional VII BKN Palembang	Hibah TA 2021

3. Kantor Pusat BKN menerima transfer masuk dari Perpustakaan Nasional berupa 1 set Pojok Baca Digital (POCADI) dengan nomor Berita Acara Serah Terima Nomor 5708/4.2./PLK.03.07/2022 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp171.971.079,00 dan Nomor 059/BASTBI/BMN/BKN-P/II/2023 senilai Rp38.961.040,00. Namun, ADK transfer masuk belum dikirim oleh pihak Perpustakaan Nasional. Sehingga sampai dengan Tahun 2025, POCADI belum masuk pada aset Badan Kepegawaian Negara.
4. Terdapat penerimaan Hibah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagai pengganti atas MoU Pinjam Pakai untuk penggunaan Kantor Regional XIV BKN Manokwari sesuai dengan BAST Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada BKN dengan Nomor: 032/508/GPB/2021 dan Nomor: 9/HM.05.01/2021, Tanggal 15 Maret 2021. Atas penerimaan hibah tersebut, Tanah seluas 7.893 m² telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. BKN dan Pengesahan atas Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kemenkeu setempat. Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melakukan koordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Papua Barat, terkait keberadaan tanah hibah tersebut. Selain itu, juga telah dilakukan survey lokasi secara langsung untuk memastikan lokasi dan keberadaan atas objek tanah tersebut. Dari hasil koordinasi dan penelusuran lokasi secara bersama-sama atas tanah hibah seluas 10.000 m² tersebut, diketahui keberadaan tanah hibah tersebut belum jelas dan tidak ditemukan lokasi yang jelas, sehingga disepakati akan melanjutkan perbaikan BAST dan NPHD atas tanah seluas 7.893 m² dan atas tanah seluas 10.000 m² tidak dilanjutkan proses hibah beserta register hibahnya. Hasil koordinasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/PL.02/KR.XIV/II/2026 tanggal 14 Februari 2026.
5. Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru memperoleh Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa tanah seluas 10.264 m² senilai Rp1.276.500.000,00 dan Bangunan Rumah Jaga seluas 36 m² senilai Rp6.540.000,00 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut km 10.5 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Nomor BAST Nomor BAST 900/753.d/BKAD/2024 dan 171PL.03.04/BA/A/2024 tanggal 04 November 2024 (sebagaimana BAST dan NPHD terlampir dalam Laporan Keuangan ini) yang sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 belum dilakukan pencatatan. Kendala Proses Pencatatan Register Hibah dikarenakan Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru belum mendapat kepastian

terkait status aset dimaksud, untuk meminimalkan risiko aset bermasalah di kemudian hari. Pengelola Aset telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan keyakinan atas status aset tersebut melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor: 377/SB/K/KR.VIII/VII/2025 tentang konfirmasi Aset Tanah dan Bangunan. Surat tersebut telah mendapatkan balasan melalui surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 900/713/BKAD/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang tanggapan konfirmasi aset tanah dan bangunan. Dalam surat tersebut dinyatakan jika:

- a. Tidak terdapat/ditemukan legalitas Tanah sertifikat Hak Pakai jalan Tjilik Riwut KM 10.5 Palangka Raya dengan luasan 10.264m²;
 - b. Aset yang telah dihibahkan ke BKN dengan Nomor BAST 900/753.d/BKAD/2024 dan Nomor 17/PL.03.04/BA/A/2024 tanggal 04 November 2024 telah dihapuskan dari pencatatan aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/42.a/BKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024;
 - c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan penggantian blanko sertifikat Hak Pakai Nomor 2599 dan berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Kota Palangkaraya terkait pensertifikatan ulang legalitas tanah tersebut.
6. Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Regional IV BKN Makassar memperoleh Hibah dari:
- a. Pemerintah Provinsi Maluku berupa tanah seluas 10.000 m² senilai Rp5.080.693.154,00 yang berlokasi di Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dengan Nomor BAST: 000.2.3.2/130 dan 40/HM.04.01/2024 tanggal 23 September 2024 yang sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 belum dilakukan pencatatan. Kantor Regional IV BKN Makassar sudah mengajukan register hibah ke Kanwil DJPB Makassar, namun ditolak dan diarahkan untuk diregister di Kanwil DJPB Jakarta dikarenakan BAST beserta NPHD Hibah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, namun proses tersebut juga ditolak oleh Kanwil DJPB Jakarta dan dinyatakan menjadi kewenangan di Kanwil DJPB Makassar. Saat ini, Kantor Regional IV BKN Makassar sedang melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengesahan hibah tersebut. *(BAST dan NPHD terlampir)*
 - b. Pemerintah Kota Palu berupa tanah seluas 4.000 m² senilai Rp328.000.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan Nomor BAST 000.2.4/1707/BPKAD/2024 dan 5/PL.03.04/BA/A/2024 tanggal 23 September 2024 yang sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 belum dilakukan pencatatan. Proses pencatatan register hibah belum dilaksanakan karena masih menunggu proses pemecahan sertifikat. Proses pemecahan sertifikat sudah selesai dilakukan dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai NIB 19.05.00012781.0 tanggal 15 Agustus 2025 sehingga prosedur register hibah akan segera dilakukan. *(BAST dan NPHD terlampir)*

Jakarta, Mei 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara



[Handwritten signature in green ink]

Prof. Dr. H. H. Arif Fakrulloh, S.H., M.H

[Handwritten initials 'AF']

LAMPIRAN UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2025	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
REKENING PENGELUARAN						
REKENING KAS INDUK (RKK BKN OPS)						
1	Kantor Pusat BKN	-	0000003005194884	S-1541/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	BNI JAKARTA TIMUR
2	Kantor Pusat BKN	-	1660003144508	S-1540/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	MANDIRI JAKTIM
3	Kantor Pusat BKN	-	1054535755	S-2747/WPB.12/KP.03/2021	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI	BANK SYARIAH INDONESIA
4	Kantor Pusat BKN	-	034001002815306	S-1542/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	BRI KC JAKARTA OTISTA
REKENING VIRTUAL ACCOUNT (VA)						
5	Kantor Pusat BKN	-	652320172201000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
6	Kantor Pusat BKN	-	653150172201001	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 1	BRI KC JAKARTA OTISTA
7	Kantor Pusat BKN	-	653150172201002	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 2	BRI KC JAKARTA OTISTA
8	Kantor Pusat BKN	-	654150172201003	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 3	BRI KC JAKARTA OTISTA
9	Kantor Pusat BKN	-	654150172201004	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 4	BRI KC JAKARTA OTISTA
10	Kantor Pusat BKN	-	654150172201005	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 5	BRI KC JAKARTA OTISTA
11	Kantor Pusat BKN	-	654150172201006	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 6	BRI KC JAKARTA OTISTA
12	Kantor Pusat BKN	-	654150172201007	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 7	BRI KC JAKARTA OTISTA
13	Kantor Pusat BKN	-	654150172201008	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 8	BRI KC JAKARTA OTISTA
14	Kantor Pusat BKN	-	654150172201009	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 9	BRI KC JAKARTA OTISTA
15	Kantor Pusat BKN	-	654150172201010	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 10	BRI KC JAKARTA OTISTA
16	Kantor Pusat BKN	-	654150172201011	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 11	BRI KC JAKARTA OTISTA
17	Kantor Pusat BKN	-	654150172201012	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 12	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Kantor Pusat BKN	-	654150172201013	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 13	BRI KC JAKARTA OTISTA
19	Kantor Pusat BKN	-	654150172201014	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 14	BRI KC JAKARTA OTISTA
20	Kantor Pusat BKN	-	654150172201015	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 15	BRI KC JAKARTA OTISTA
21	Kantor Pusat BKN	-	654150172201016	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 16	BRI KC JAKARTA OTISTA
22	Kantor Pusat BKN	-	654150172201017	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 17	BRI KC JAKARTA OTISTA
23	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	8100120172411000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
24	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	652324504541000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 165 KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2025	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
25	Kantor Regional III BKN Bandung	-	9890840172371000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
26	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	9890845606351000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
27	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	652325606351000	S-2677/KPN.1203/2024	BPG 136 KANTOR REG IV BKN MAKASSAR	BRI KC MAKASSAR
28	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	652325606351001	S-2677/KPN.1203/2024	BPP 136 KANREG IV BKN MAKASAR	BRI KC MAKASSAR
29	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	652326062541000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
30	Kantor Regional VI BKN Medan	-	8100126062611000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
31	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	9890846223721000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
32	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	9890846223861000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KCP DEPARTEMEN KEUANGAN PECENONGAN
33	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	S-890/WPB.30/KP.063/2015	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
		-	652326223901000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
34	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	9890846678821000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC 1946
35	Kantor Regional XI BKN Manado	-	9890846678961000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KCP JATINEGARA BKN
36	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	652326679011000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC Jakarta Gatot Subroto
37	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	-	8100996677521000	S-3029/WPB.12/KP.03/2020	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII BKN BA	BRI SYARIAH
38	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	652326676521000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 065 KANREG XIV BKN MKW 667652	BRI KC Manokwari
39	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	654500205051000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KC Otista
REKENING PENERIMAAN						
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	S-6002/WPB.12/KP.03/2019	BPN 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	122401000123304	S-389/WPB.13/KP.04/2018	BPN 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING LAINNYA						
19	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	122401000127308	S-678/WPB.13/KP.04/2018	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR
TOTAL		-				

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
131111	Tanah	585.112,00	2.342.552.072.368,00	-	2.342.552.072.368,00
20101	TANAH PERSIL	584.942,00	2.341.434.884.368,00	-	2.341.434.884.368,00
20103	LAPANGAN	170,00	1.117.188.000,00	-	1.117.188.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	62.898,00	781.239.544.693,00	(624.605.384.926,00)	156.634.159.767,00
30103	ALAT BANTU	217,00	39.771.585.439,00	(34.024.485.921,00)	5.747.099.518,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	217,00	48.614.844.162,00	(35.216.266.444,00)	13.398.577.718,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	96,00	232.462.720,00	(222.487.720,00)	9.975.000,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29,00	6.051.316.611,00	(5.828.605.518,00)	222.711.093,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	41,00	134.707.950,00	(123.831.615,00)	10.876.335,00
30303	ALAT UKUR	8,00	109.795.050,00	(97.305.375,00)	12.489.675,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	6,00	49.107.300,00	(49.107.300,00)	-
30501	ALAT KANTOR	8.911,00	81.127.653.455,00	(76.821.931.572,00)	4.305.721.883,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	35.998,00	150.124.262.690,00	(136.165.706.373,00)	13.958.556.317,00
30601	ALAT STUDIO	1.150,00	43.569.484.475,00	(29.980.664.181,00)	13.588.820.294,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	419,00	4.606.226.618,00	(4.563.940.944,00)	42.285.674,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	13,00	1.905.464.793,00	(1.418.407.321,00)	487.057.472,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	291,00	1.024.974.544,00	(839.692.694,00)	185.281.850,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16,00	142.533.825,00	(113.725.145,00)	28.808.680,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	78,00	4.178.554.135,00	(4.069.312.503,00)	109.241.632,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	16,00	84.425.000,00	(56.410.358,00)	28.014.642,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1,00	4.284.000,00	(1.713.600,00)	2.570.400,00
31001	KOMPUTER UNIT	10.180,00	153.693.223.501,00	(118.714.012.713,00)	34.979.210.788,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5.117,00	243.596.197.925,00	(174.233.600.781,00)	69.362.597.144,00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6,00	64.269.000,00	(8.569.200,00)	55.699.800,00
31503	ALAT SAR	44,00	1.722.546.500,00	(1.722.546.500,00)	-
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27,00	143.815.000,00	(141.672.148,00)	2.142.852,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17,00	287.810.000,00	(191.389.000,00)	96.421.000,00
133111	Gedung dan Bangunan	496,00	924.041.534.676,00	(220.855.495.571,00)	703.186.039.105,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	185,00	803.575.095.317,00	(193.202.606.406,00)	610.372.488.911,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	282,00	104.835.317.764,00	(24.417.214.730,00)	80.418.103.034,00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1,00	45.569.000,00	(8.012.128,00)	37.556.872,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	28,00	15.585.552.595,00	(3.227.662.307,00)	12.357.890.288,00
134111	Jalan dan Jembatan	58.771,00	16.468.966.800,00	(16.467.277.564,00)	1.689.236,00
50101	JALAN	58.761,00	16.466.806.800,00	(16.466.806.800,00)	-
50102	JEMBATAN	10,00	2.160.000,00	(470.764,00)	1.689.236,00
134112	Irigasi	26,00	2.934.621.163,00	(985.952.672,00)	1.948.668.491,00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2,00	257.076.600,00	(43.798.597,00)	213.278.003,00

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2,00	159.020.000,00	(32.849.814,00)	126.170.186,00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1,00	16.428.500,00	(16.428.500,00)	-
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11,00	1.757.299.063,00	(687.639.090,00)	1.069.659.973,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3,00	394.889.000,00	(106.720.934,00)	288.168.066,00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7,00	349.908.000,00	(98.515.737,00)	251.392.263,00
134113	Jaringan	26,00	5.580.587.775,00	(2.517.495.266,00)	3.063.092.509,00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2,00	335.572.500,00	(225.915.667,00)	109.656.833,00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4,00	1.783.479.940,00	(350.626.382,00)	1.432.853.558,00
50310	INSTALASI LAIN	6,00	917.573.820,00	(917.573.820,00)	-
50401	JARINGAN AIR MINUM	1,00	103.840.700,00	(67.496.452,00)	36.344.248,00
50402	JARINGAN LISTRIK	11,00	2.375.329.165,00	(903.317.357,00)	1.472.011.808,00
50403	JARINGAN TELEPON	2,00	64.791.650,00	(52.565.588,00)	12.226.062,00
135111	Aset Tetap Renovasi	27,00	12.876.193.196,00	(227.817.267,00)	12.648.375.929,00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1,00	3.998.500,00	-	3.998.500,00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25,00	12.791.956.296,00	(227.817.267,00)	12.564.139.029,00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1,00	80.238.400,00	-	80.238.400,00
135121	Aset Tetap Lainnya	5.667,00	1.322.837.511,00	(63.609.213,00)	1.259.228.298,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5.421,00	527.137.411,00	-	527.137.411,00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1,00	21.500.000,00	-	21.500.000,00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	215,00	656.481.000,00	-	656.481.000,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29,00	84.719.100,00	(63.609.213,00)	21.109.887,00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.434,00	13.861.094.877,00	(12.993.996.841,00)	867.098.036,00
30103	ALAT BANTU	3,00	151.984.800,00	(151.984.800,00)	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2,00	118.464.558,00	(118.464.558,00)	-
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1,00	12.650.000,00	(12.650.000,00)	-
30501	ALAT KANTOR	114,00	676.181.496,00	(676.181.496,00)	-
30502	ALAT RUMAH TANGGA	895,00	1.896.519.922,00	(1.894.571.348,00)	1.948.574,00
30601	ALAT STUDIO	53,00	1.209.014.076,00	(1.208.204.076,00)	810.000,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	24,00	577.378.921,00	(577.378.921,00)	-
30701	ALAT KEDOKTERAN	5,00	10.978.000,00	(10.978.000,00)	-
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8,00	1.201.961.629,00	(1.201.497.629,00)	464.000,00
31001	KOMPUTER UNIT	322,00	3.359.684.269,00	(3.353.714.276,00)	5.969.993,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	112,00	3.337.181.889,00	(3.337.181.889,00)	-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,00	73.196.000,00	(73.196.000,00)	-
50310	INSTALASI LAIN	17,00	1.147.251.000,00	(354.387.032,00)	792.863.968,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,00	45.825.000,00	(23.606.816,00)	22.218.184,00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1.875,00	42.823.317,00	-	42.823.317,00
JUMLAH		716.457,00	4.100.877.453.059,00	(878.717.029.320,00)	3.222.160.423.739,00

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8=5+6+7</i>	<i>9=4-8</i>
162121	Hak Cipta	1	500.000,00	(78.563,00)	421.437,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500.000,00	(78.563,00)	421.437,00
162151	Software	172	59.119.708.036,00	(51.559.039.495,00)	7.560.668.541,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	172	59.119.708.036,00	(51.559.039.495,00)	7.560.668.541,00
162161	Lisensi	12	9.183.867.613,00	(674.429.780,00)	8.509.437.833,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	12	9.183.867.613,00	(674.429.780,00)	8.509.437.833,00
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	294.045.300,00	-	294.045.300,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	294.045.300,00	-	294.045.300,00
166113	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4	928.315.000,00	(928.315.000,00)	-
80101	ASET TAK BERWUJUD	4	928.315.000,00	(928.315.000,00)	-
JUMLAH		191	69.526.435.949,00	(53.161.862.838,00)	16.364.573.111,00

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
 Informasi Belanja Dibayar Dimuka
 Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	JANGKA WAKTU (TMT)			CUT OFF	SISA MASA BERLAKU (HARI)	NOMOR PERJANJIAN	AKUN	NILAI KONTRAK	PERHITUNGAN s.d 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2025
			TGL MULAI	TGL AKHIR	TOTAL HARI							
1	Kantor Pusat BKN	Biaya langganan lisensi Canva Pro - BHHK	01/04/2025	01/04/2026	366	31/12/2025	91	FAKTUR#04473-32173156	522141	769.000,00	191.199,45	191.199,00
		Biaya langganan lisensi Capcut Pro - BHHK	20/06/2025	20/06/2026	366	31/12/2025	171	ORDER NUMBER#AXI7BQAC...HA	522141	909.000,00	424.696,72	424.697,00
		Biaya langganan lisensi Microsoft Office - PUSPENKOM	30/06/2025	30/06/2026	366	31/12/2025	181	INVOICE#EP-01YNPO73YFJTSRPR87PO9F8	521111	156.510.000,00	77.399.754,10	77.399.754,00
		Biaya langganan lisensi Zoom - INTI	25/12/2025	25/12/2026	366	31/12/2025	359	INVOICE#EP-01KC0WSP2AM5M2AV93384CD2	521111	528.570.371,00	518.461.101,61	518.461.102,00
		Biaya langganan lisensi Cortex XDR Pro - INTI	07/07/2025	06/07/2026	365	31/12/2025	187	INVOICE#EP-01JXYHC3H0K6ADB18WHAVT4M7G	521111	556.546.230,00	285.134.643,86	285.134.644,00
		Biaya langganan lisensi Maintenance Carbonio Enterprise - INTI	31/05/2025	31/05/2026	366	31/12/2025	151	INVOICE#EP-01JV6FTSG0KRC72S8F5TRVRMA0	521111	224.386.500,00	92.574.758,20	92.574.758,00
		Biaya langganan lisensi Aktiva Local Support - INTI	13/06/2025	12/06/2026	365	31/12/2025	163	INVOICE#EP-01JV6FTSG0KRC72S8F5TRVRMA0	521111	47.175.000,00	21.067.191,78	21.067.192,00
		Biaya langganan lisensi Renewal Software Tableau Creator adn Viewer - INTI	01/05/2025	30/04/2026	365	31/12/2025	120	INVOICE#052025.00003	521111	37.962.000,00	12.480.657,53	12.480.658,00
		Biaya langganan lisensi Canva Pro - INTI	14/04/2025	14/04/2026	366	31/12/2025	104	INVOICE#04486-27106331	521111	769.000,00	218.513,66	218.514,00
		Biaya langganan lisensi SSL Simpegnas, Domain Simpegnas, dan IPBlock - INTI	14/05/2025	30/05/2026	382	31/12/2025	150	TRANSFER#IFT11536601	521111	50.000,00	19.633,51	19.634,00
		Biaya langganan lisensi Apple Development Program Membership - INTI	27/03/2025	27/03/2026	366	31/12/2025	86	TEAM ID#425BWM49WX	521111	1.645.380,00	386.619,34	386.619,00
		Biaya langganan lisensi Renewal EDB License - INTI	12/08/2025	11/08/2026	365	31/12/2025	223	INVOICE#EP-01KOV7GD7VTZE0HZ6GDDXHVZK7	521111	2.157.840.000,00	1.318.351.561,64	1.318.351.562,00
		Biaya langganan lisensi SSL Simpegnas, Domain Simpegnas, dan IPBlock - INTI	14/05/2025	30/05/2026	382	31/12/2025	150	INVOICE#BCI-INV/012/III/2025	521111	40.704.810,00	15.983.564,14	15.983.564,00
		Biaya langganan lisensi Fortigate-3301E SN: FG33EIT920900202 (Firewall DC) - INTI	26/10/2025	26/10/2026	366	31/12/2025	299	SPK NO#EP-01K3MPHKHJSF8616CYH1FDXWQW	521111	1.006.799.692,00	822.494.830,35	822.494.830,00
		Biaya langganan lisensi Fortigate-3301E SN: FG33EIT920900196 (Firewall DC) - INTI	24/10/2025	26/10/2026	368	31/12/2025	299	SPK NO#EP-01K3MPHKHJSF8616CYH1FDXWQW	521111	1.006.799.692,00	818.024.749,75	818.024.750,00
		Biaya langganan lisensi Fortigate-2201E SN: FG22EIT920900762 (Firewall DC) - INTI	02/09/2025	02/09/2026	366	31/12/2025	245	SPK NO#EP-01K3MPHKHJSF8616CYH1FDXWQW	521111	878.659.437,00	588.173.666,84	588.173.667,00
		Biaya langganan lisensi Fortigate-2201E SN: FG22EIT920900746 (Firewall DC) - INTI	02/09/2025	02/09/2026	366	31/12/2025	245	SPK NO#EP-01K3MPHKHJSF8616CYH1FDXWQW	521111	878.659.437,00	588.173.666,84	588.173.667,00
		Biaya langganan lisensi Renewal Extended Detection and Response (XDR) - INTI	07/07/2026	06/07/2027	365	31/12/2025	552	INVOICE#EP-01K4YA19XW8NQKRPBCS93A5B1D	521111	556.546.230,00	556.546.230,00	556.546.230,00
		Biaya langganan lisensi API Security - INTI	27/12/2025	26/12/2026	365	31/12/2025	360	INVOICE#EP-01K8T45PFZX13RFGP26XXHV2XD	521111	5.688.461.400,00	5.610.537.271,23	5.610.537.271,00
		Biaya langganan lisensi Antivirus - INTI	02/02/2026	01/02/2027	365	31/12/2025	397	KWITANSI NO#25120404/AKT-KW/XII/2025	521111	116.827.500,00	116.827.500,00	116.827.500,00

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	JANGKA WAKTU (TMT)			CUT OFF	SISA MASA BERLAKU (HARI)	NOMOR PERJANJIAN	AKUN	NILAI KONTRAK	PERHITUNGAN s.d 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2025
			TGL MULAI	TGL AKHIR	TOTAL HARI							
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Biaya langganan lisensi SSL Wildcard	30/06/2025	29/06/2026	365	31/12/2025	180	INVOICE#G/SL/SH/16387/0725A	521111	3.885.000,00	1.915.890,41	1.915.890,00
		Biaya langganan lisensi Cap Cut	06/02/2025	05/02/2026	365	31/12/2025	36	ORDER#163443288557084531	521111	799.200,00	78.825,21	78.825,00
		Biaya langganan lisensi Canva Pro	24/02/2025	23/02/2026	365	31/12/2025	54	KUITANSI#00016/KW/KKP/17241/2025	521111	769.000,00	113.769,86	113.770,00
		Biaya langganan lisensi Renewal Domain	08/03/2025	07/03/2026	365	31/12/2025	66	INVOICE#2295307	521111	233.100,00	42.149,59	42.150,00
		Biaya langganan lisensi Google Drive	03/06/2025	02/06/2026	365	31/12/2025	153	KUITANSI#00036/KW/KKP/017241/2025	521111	355.200,00	148.892,05	148.892,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	Biaya langganan lisensi Canva Pro	05/02/2025	04/02/2026	365	31/12/2025	35	INVOICE#GPA.3319-0825-5964-35730..0	521111	853.590,00	81.851,10	81.851,00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	Biaya langganan lisensi Canva Pro	13/12/2025	12/01/2026	31	31/12/2025	12	FAKTUR#04729-13651759	521111	234.246,00	90.675,87	90.676,00
		Biaya langganan lisensi Canva Pro	13/03/2025	12/03/2026	365	31/12/2025	71	FAKTUR#04454-20683050	521111	1.900.000,00	369.589,04	369.589,00
		Biaya langganan lisensi Canva Pro UPT Mamuju	05/12/2025	04/12/2026	365	31/12/2025	338	INVOICE#04721-10885741-1	521111	769.000,00	712.115,07	712.115,00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	Biaya langganan lisensi Google One	01/10/2025	30/09/2026	365	31/12/2025	273	SOP3343-2055-0653-t 8851..0	521111	532.800,00	398.505,21	398.505,00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	Biaya langganan lisensi Canva Pro	01/02/2025	01/02/2026	366	31/12/2025	32	FAKTUR#04414-9405451	521111	1.240.000,00	108.415,30	108.415,00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	Biaya langganan lisensi Canva Pro	24/02/2025	23/02/2026	365	31/12/2025	54	INVOICE 04437-17314996	521111	1.240.000,00	183.452,05	183.452,00
		Biaya langganan lisensi Google One	24/02/2025	23/02/2026	365	31/12/2025	54	SOP.3360-3084-8779-67050..2	521111	477.300,00	70.614,25	70.614,00
		Biaya langganan lisensi Linktree	12/05/2025	11/05/2026	365	31/12/2025	131	Invoice #—LT-15587290	521111	708.000,00	254.104,11	254.104,00
8	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Biaya langganan lisensi Canva Pro	04/02/2025	03/02/2026	365	31/12/2025	34	FAKTUR#04417-21410960	521111	769.000,00	71.632,88	71.633,00
		Biaya sewa gedung tata naskah	01/03/2025	01/03/2026	366	31/12/2025	60	SPK 4.1/SPK/PPK/KANREG-XIII/II/2025	522141	42.180.000,00	6.914.754,10	6.914.754,00
9	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Biaya langganan lisensi Renewal Domain	18/09/2025	18/09/2026	366	31/12/2025	261	INVOICE#HID-1167561	521111	236.665,00	168.769,30	168.769,00
		Biaya langganan lisensi Web Hosting	10/03/2025	10/03/2026	366	31/12/2025	69	INVOICE#HID-872461	521111	837.828,00	157.951,18	157.951,00
10	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biaya langganan lisensi Canva Pro	22/05/2025	21/05/2026	365	31/12/2025	141	INVOICE#04524-13946297	521111	769.000,00	297.065,75	297.066,00
		Biaya langganan lisensi Cap Cut	17/04/2025	16/04/2026	365	31/12/2025	106	INVOICE#MQQ5MVVFJN	521111	999.000,00	290.120,55	290.121,00
		Biaya langganan lisensi Google One	05/01/2025	04/01/2026	365	31/12/2025	4	ORDER NO#SOP.3325-1529-3556-14304.1	521111	1.723.275,00	18.885,21	18.885,00
		Biaya langganan lisensi Zoom	12/02/2025	11/02/2026	365	31/12/2025	42	INVOICE#INV292780487	521111	12.407.340,24	1.427.693,95	1.427.694,00
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNJ (Semester 2 dan 3)						SPK Nomor T/5098/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 09-10-2025	521219	345.600.000,00	345.600.000,00	345.600.000,00
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNS (Semester 2 dan 3)						Kuitansi: 6885/UN27.03/PK.01.03/2025, tgl 10-10-2025	521219	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNJ (Semester 7 dan 8)						SPK Nomor T/5190/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 30-10-2025	521219	307.200.000,00	307.200.000,00	307.200.000,00

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	JANGKA WAKTU (TMT)			CUT OFF	SISA MASA BERLAKU (HARI)	NOMOR PERJANJIAN	AKUN	NILAI KONTRAK	PERHITUNGAN s.d 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2025		
			TGL MULAI	TGL AKHIR	TOTAL HARI									
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Telkom (Semester 2 dan 3) dan Biaya Penelitian						SPK Nomor 0751/KUG.02/KUG1.0/2025 tgl 30-10-2025	521219	96.900.030,00	96.900.030,00	96.900.030,00		
		Biaya TOEFL ITP						SPK Nomor T/1590/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 13-10-2025	521219	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNJ (Semester 4) dan Biaya TOEFL ITP						SPK Nomor T/5189/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 10-11-2025	521219	57.900.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00		
		Biaya Wisuda Universitas Terbuka						Kuitansi: B/2322/UN31.UT14/KM.01.00/2025, tgl 13-11-2025	521219	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00		
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNJ (Semester 4 dan 5)						SPK Nomor T/5836/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 20-11-2025	521219	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00		
		Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UNJ (Semester 2 dan 3)						SPK Nomor T/5191/UN39.2/KU.00.01/2025 tgl 20-11-2025	521219	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00		
Jumlah														12.877.987.563,00

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Rincian Piutang Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	NILAI	SALDO 31 DES 2025
1	Kantor Pusat BKN	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	252.016.238,00	
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.800.000,00	
		- Belanja Tunjangan Struktural PNS	3.420.000,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	175.873.050,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	12.911.950,00	
		- Belanja Uang Lembur PPPK	339.000,00	
		- Belanja Tunjangan Kinerja PNS	44.134.605,00	
		- Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	1.537.633,00	
		Pengembalian Belanja Barang TA 2025	429.595.764,00	
		- Pekerjaan kegiatan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II	1.560.000,00	
		- Pekerjaan jasa EO rapat koordinasi dan evaluasi program BKN	390.000,00	
		- Pekerjaan belanja sewa tenda dan AC Standing (BA BUN)	406.045.764,00	
		- Pekerjaan jasa EO rapat koordinasi kepegawaian (Rakornas) BKN	21.600.000,00	
		Pengembalian Belanja Modal TA 2025	555.845.042,00	
		- Pekerjaan Pembangunan UPT Mataram	417.831.195,00	
		- Pekerjaan Pembangunan UPT Gorontalo	136.857.329,00	
		- Pekerjaan Renovasi Ruang Data Gedung I BKN	1.156.518,00	
		Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah	528.571,00	
		Jumlah Piutang Satker		
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	20.670.350,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	20.670.350,00	
		Jumlah Piutang Satker		
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	210.300,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	210.300,00	
		Jumlah Piutang Satker		
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	1.229.780,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	984.180,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	245.600,00	
		Jumlah Piutang Satker		

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	NILAI	SALDO 31 DES 2025
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	8.702.350,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	8.702.350,00	
		Pengembalian Belanja Modal TA 2025	20.350.733,00	
		- Pekerjaan Pemasangan Kabel Feeder	20.350.733,00	
		Jumlah Piutang Satker	29.053.083,00	
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	2.586.000,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	2.481.000,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	105.000,00	
		Jumlah Piutang Satker	2.586.000,00	
7	Kantor Regional VI BKN Medan	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	8.376.050,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	7.470.050,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	840.000,00	
		- Belanja Uang Lembur	66.000,00	
		Pengembalian Belanja Modal TA 2025	7.477.984,00	
		- Pekerjaan Renovasi Toilet	7.477.984,00	
Jumlah Piutang Satker	15.854.034,00			
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	174.850,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	174.850,00	
		Pengembalian Belanja Modal TA 2025	24.002.932,00	
		- Pekerjaan Renovasi Atap dan Lantai	21.138.924,00	
		- Pekerjaan Pemeliharaan Atap Selasar	2.864.008,00	
		Jumlah Piutang Satker	24.177.782,00	
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	2.699.000,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	2.413.000,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	286.000,00	
		Pengembalian Belanja Modal TA 2025	174.317.200,00	
		- Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor	174.317.200,00	
Jumlah Piutang Satker	177.016.200,00			
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	936.000,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	936.000,00	
		Jumlah Piutang Satker	936.000,00	
11	Kantor Regional XI BKN Manado	Pengembalian Belanja Barang TA 2025	3.537.007,00	
		- Belanja Uang Perjalanan Dinas Pegawai	3.537.007,00	
		Jumlah Piutang Satker	3.537.007,00	
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	14.094.900,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	13.709.000,00	
		- Belanja Uang Makan PPPK	385.900,00	
		Jumlah Piutang Satker	14.094.900,00	

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	NILAI	SALDO 31 DES 2025
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	701.200,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	701.200,00	
		Jumlah Piutang Satker		701.200,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	608.800,00	
		- Belanja Uang Makan PNS	608.800,00	
		Jumlah Piutang Satker		608.800,00
15	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembalian Belanja Barang TA 2025	34.400.364,00	
		- Pekerjaan Pemeliharaan Rangka Atap dan Renovasi Pagar Kanal <i>Pre-Cast.</i>	34.400.364,00	
		Jumlah Piutang Satker		34.400.364,00
TOTAL PIUTANG LAINNYA				1.563.061.415,00

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Pendapatan Diterima Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	JANGKA WAKTU (TMT)			CUT OFF	SISA MASA BERLAKU (HARI)	NOMOR PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERHITUNGAN s.d 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2025
			TGL MULAI	TGL AKHIR	TOTAL HARI						
1	Kantor Pusat BKN	PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI	09/01/2025	08/01/2028	1095	31/12/25	738	3/HM.04.01/2025 dan B.01.174/PKS/LGL-FIT/I/2025	21.270.000,00	14.335.397,26	14.335.397,00
		Koperasi Promart (1)	01/01/2025	31/12/2029	1826	31/12/25	1461	KEPKA NO 326 Tahun 2024	264.156.000,00	211.353.732,75	211.353.733,00
		Koperasi Promart (2)	01/01/2026	31/12/2030	1826	31/12/25	1826	-	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
		PT. BRI (KANTOR)	01/08/2024	31/07/2027	1095	31/12/25	577	KEPKA NO 193 TAHUN 2024	223.086.000,00	117.553.079,45	117.553.079,00
		ATM BRI	15/02/2023	15/02/2026	1097	31/12/25	46	23/HM.04.01/2023	119.328.000,00	5.003.726,53	5.003.727,00
		PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	01/12/2023	30/11/2028	1827	31/12/25	1065	KEPKA No. 502 Tahun 2023	143.025.000,00	83.372.536,95	83.372.537,00
		PT. BANK BNI	01/01/2026	31/12/2027	730	31/12/25	730	-	456.567.000,00	456.567.000,00	456.567.000,00
		BANK DKI (ATM)	01/10/2024	30/09/2026	730	31/12/25	273	KEPKA NO 217 Tahun 2024	35.793.000,00	13.385.601,37	13.385.601,00
		BSI (ATM)	01/11/2024	31/10/2026	730	31/12/25	304	42/HM.04.01/2024	50.901.000,00	21.197.128,77	21.197.129,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Sewa Koperasi	11/03/2025	11/03/2026	366	31/12/25	70	01/PL.03.04/2025 dan 02/KPRI-SEDAR/I/2025	3.880.500,00	742.172,13	742.172,00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	Sewa Kantin	01/12/2025	30/11/2026	365	31/12/25	334	SK Kepala BKN Nomor 475 Tahun 2024	3.000.000,00	2.745.205,48	2.745.205,00
		Sewa ATM BRI	08/02/2023	07/02/2026	1096	31/12/25	38	080.1/B-RT.01.01/SD/KR.V/2023 dan B.1132 .KC-V/LOG/02/2023	37.342.000,00	1.294.704,38	1.294.704,00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	Sewa Kantin	24/09/2025	24/09/2026	366	31/12/25	267	405/KR.VI/BKN/X/2025	7.271.505,00	5.304.622,50	5.304.623,00

NO	SATUAN KERJA	URAIAN	JANGKA WAKTU (TMT)			CUT OFF	SISA MASA BERLAKU (HARI)	NOMOR PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERHITUNGAN s.d 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2025
			TGL MULAI	TGL AKHIR	TOTAL HARI						
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	Sewa Koperasi	13/06/2023	12/06/2026	1096	31/12/25	163	001/PL.03.04/KR.X/2023 dan 001/KR.X/VI/2023	4.265.000,00	634.302,01	634.302,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	Sewa ATM BNI	01/09/2023	31/08/2026	1096	31/12/25	243	MDO/01/020/PKS SEWA ATM/2023	60.927.000,00	13.508.449,82	13.508.450,00
7	Pusat Pengembangan SDM	Sewa ATM BRI	28/04/2025	27/04/2028	1096	31/12/25	848	04/KA.03/PKS/B.IV/2025	33.151.000,00	25.649.678,83	25.649.679,00
Jumlah											1.097.647.338

Lampiran A7

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

NO	PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	KET
1	Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila	Barang	DN	228.280.811,00	228.280.811,00	Gedung dan Bangunan
2	KORPRI Komisariat Kantor XII BKN Pekanbaru	Barang	DN	160.761.421,00	160.761.421,00	Gedung dan Bangunan
Jumlah				389.042.232,00	389.042.232,00	

**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian / Lembaga : **Badan Kepegawaian Negara**
 Fungsi : **Pelayanan Umum**
 Sub Fungsi : **Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri**

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
088	Program (CO)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
	3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian							
	AFA 001	208.779.000,00	120.179.000,00	57,56	4	4	NSPK	100,00	
	BAB 001	375.474.000,00	176.995.357,00	47,14	577	577	Lembaga	100,00	
	FAC 001	415.747.000,00	224.789.972,00	54,07	500	500	Orang	100,00	
	3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi							
	BAA 001	180.157.421.000,00	175.550.790.492,00	97,44	864.373	1.493.426	Orang	172,78	
	BAA 002	8.687.632.000,00	8.406.118.514,00	96,76	158.464	176.520	Orang	111,39	
	3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN							
	ADE 001	500.000.000,00	385.527.112,00	77,11	21	21	Lembaga	100,00	
	AFA 001	715.000.000,00	679.609.760,00	95,05	2	2	NSPK	100,00	
	BAA 001	7.471.154.000,00	7.137.695.295,00	95,54	21.560	21.560	Orang	100,00	
	3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian							
	FAC 001	3.574.466.000,00	3.445.312.041,00	96,39	230	230	Orang	100,00	
	FAC 002	429.102.000,00	26.162.000,00	6,10	40	40	Orang	100,00	
	FAC 003	1.712.000.000,00	1.711.439.870,00	99,97	944	944	Orang	100,00	
	FAC 004	183.582.000,00	48.963.000,00	26,67	226	226	Orang	100,00	
	FAC 005	50.000.000,00	49.999.950,00	100,00	40	40	Orang	100,00	
	4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN							
	AAH 001	760.625.000,00	107.994.082,00	14,20	6	6	Peraturan	100,00	
	ABQ 001	162.024.000,00	37.755.630,00	23,30	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	ABQ 002	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	ABQ 004	207.976.000,00	170.641.585,00	82,05	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	ABQ 005	175.000.000,00	61.250.000,00	35,00	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	ABQ 006	350.000.000,00	185.875.000,00	53,11	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	ABQ 008	250.000.000,00	249.418.187,00	99,77	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	AEA 001	274.928.000,00	273.956.682,00	99,65	1	1	Kegiatan	100,00	
	AFA 001	529.447.000,00	268.862.114,00	50,78	1	1	Rancangan Standar	100,00	
	BDB 001	50.000.000,00	49.832.717,00	99,67	365	365	Lembaga	100,00	
	BDB 002	450.000.000,00	159.342.000,00	35,41	626	626	Lembaga	100,00	
	BDB 004	150.000.000,00	15.000.000,00	10,00	10	10	Lembaga	100,00	
	BDB 006	750.000.000,00	252.553.000,00	33,67	33	33	Lembaga	100,00	
	PBQ 003	1.500.000.000,00	1.499.006.538,00	99,93	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	
	4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN							
	AEA 001	754.950.000,00	476.734.808,00	63,15	2	2	Kegiatan	100,00	
	AEA 002	221.400.000,00	221.008.728,00	99,82	2	2	Kegiatan	100,00	
	AEA 003	498.143.000,00	278.674.100,00	55,94	2	2	Kegiatan	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BAB 001	1.390.268.000,00	769.970.188,00	55,38	584	584	Lembaga	100,00	
	BAB 002	1.898.352.000,00	440.615.660,00	23,21	1.267	1.271	Lembaga	100,32	
	BAB 003	1.794.096.000,00	651.748.912,00	36,33	1.292	1.292	Lembaga	100,00	
	BAB 004	418.493.000,00	406.531.028,00	97,14	624	624	Lembaga	100,00	
	BAB 008	555.788.000,00	403.945.203,00	72,68	1.106	1.106	Lembaga	100,00	
	BAB 009	26.000.000,00	7.020.000,00	27,00	4	4	Lembaga	100,00	
	BAB 010	190.364.000,00	56.885.152,00	29,88	702	702	Lembaga	100,00	
	4847 Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN								
	AEA 001	4.000.000.000,00	2.932.871.440,00	73,32	1	1	Kegiatan	100,00	
	BMA 001	425.770.000,00	121.029.530,00	28,43	1	1	Layanan	100,00	
	FAA 002	3.159.329.000,00	1.393.313.840,00	44,10	#####	3.838.234	Dokumen	103,45	
	FAB 001	1.850.000.000,00	1.839.408.701,00	99,43	1	1	Sistem Informasi	100,00	
	QMA 001	2.350.000.000,00	2.306.662.553,00	98,16	1	1	Layanan	100,00	
	4848 Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN								
	AEA 001	2.000.000.000,00	584.049.566,00	29,20	1	1	Kegiatan	100,00	
	BIC 011	1.586.539.000,00	726.425.706,00	45,79	178	178	Lembaga	100,00	
	BIC 012	1.327.115.000,00	746.163.335,00	56,22	163	163	Lembaga	100,00	
	BIC 013	2.025.731.000,00	725.208.475,00	35,80	199	199	Lembaga	100,00	
	BIC 014	1.222.767.000,00	429.713.000,00	35,14	115	115	Lembaga	100,00	
	BIC 015	2.896.109.000,00	292.067.174,00	10,08	356	356	Lembaga	100,00	
	BIC 016	3.814.507.000,00	613.026.598,00	16,07	306	306	Lembaga	100,00	
	BIC 017	3.774.482.000,00	991.000.377,00	26,26	316	316	Lembaga	100,00	
	BIC 018	3.529.317.000,00	909.737.608,00	25,78	216	216	Lembaga	100,00	
	UAE 001	2.000.000.000,00	1.998.644.094,00	99,93	100	100	Rekomendasi	100,00	
088	Program (WA)	Program Dukungan Manajemen							
	3630 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik								
	EBA 958	917.155.000,00	589.793.469,00	64,31	14	14	Layanan	100,00	
	EBA 959	2.717.620.000,00	751.976.719,00	27,67	9	9	Layanan	100,00	
	3635 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
	EBD 961	175.500.000,00	49.989.812,00	28,48	2	2	Dokumen	100,00	
	EBD 965	1.174.500.000,00	647.078.029,00	55,09	50	50	Dokumen	100,00	
	3639 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)								
	BCE 001	813.034.000,00	442.939.406,00	54,48	255	270	Perkara	105,88	
	BCE 002	311.966.000,00	174.751.983,00	56,02	3	3	Perkara	100,00	
	3648 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi								
	CBT 001	48.777.540.000,00	48.424.706.475,00	99,28	189	179	Unit	94,71	
	CCL 001	370.300.000,00	370.296.000,00	100,00	2	2	Unit	100,00	
	CDS 001	150.000.000,00	148.906.500,00	99,27	402	402	Unit	100,00	
	EBA 962	1.702.160.000,00	1.645.041.124,00	96,64	1	1	Layanan	100,00	
	3662 Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN								
	EBA 963	63.683.000,00	11.182.802,00	17,56	1	1	Layanan	100,00	
	4842 Pengelolaan Organisasi dan SDM								
	EBA 960	464.619.000,00	183.050.994,00	39,40	1	1	Layanan	100,00	
	EBC 954	7.083.975.000,00	4.111.820.496,00	58,04	3.993	3.993	Orang	100,00	
	EBC 996	4.752.198.000,00	3.491.027.918,00	73,46	1.218	1.218	Orang	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EBD 961	2.447.057.000,00	463.950.156,00	18,96	1	1	Dokumen	100,00	
	4843 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
	CAN 001	77.500.000,00	77.474.339,00	99,97	11	11	Unit	100,00	
	EBA 956	278.790.000,00	196.473.947,00	70,47	16	16	Layanan	100,00	
	EBA 962	4.000.454.000,00	3.048.036.403,00	76,19	16	16	Layanan	100,00	
	EBA 994	539.305.024.000,00	511.199.199.370,00	94,79	17	17	Layanan	100,00	
	EBB 951	31.704.874.000,00	31.167.643.145,00	98,31	1.092	1.092	Unit	100,00	
	EBB 971	9.229.656.000,00	9.180.744.397,00	99,47	39	39	Unit	100,00	
	EBD 952	552.500.000,00	548.321.160,00	99,24	3	3	Dokumen	100,00	
	EBD 953	675.617.000,00	633.844.342,00	93,82	4	4	Dokumen	100,00	
	EBD 955	3.065.675.000,00	677.546.173,00	22,10	50	50	Dokumen	100,00	
	EBD 961	2.154.230.000,00	443.983.625,00	20,61	57	57	Dokumen	100,00	
	EBD 974	435.000.000,00	386.408.780,00	88,83	2	2	Dokumen	100,00	
	FAB 002	188.855.000,00	188.855.000,00	100,00	1	1	Sistem Informasi	100,00	
	FAE 001	285.700.000,00	282.836.667,00	99,00	14	14	Laporan	100,00	
	4844 Legislasi dan Litigasi								
	EBA 957	604.197.000,00	508.542.000,00	84,17	1	1	Layanan	100,00	
	EBA 969	700.000.000,00	432.660.500,00	61,81	33	33	Layanan	100,00	
SUBTOTAL		919.179.256.000,00	842.296.607.405,00						

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	919,179,256,000	842,439,882,646	(76,739,373,354)	91.65	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	(210,421,855,199)	87.7
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	124,328,226,000	124,420,837,000	121,921,581,900	16,329,772	121,905,252,128	97.99	2,515,584,872
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,702,000	2,171,000	1,785,205	19,537	1,765,668	82.23	405,332
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,252,255,000	8,203,040,000	7,596,401,578	2,969,360	7,593,432,218	92.6	609,607,782
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,378,808,000	2,328,981,000	2,025,992,558	221,834	2,025,770,724	86.99	303,210,276
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,425,986,000	4,184,323,000	3,988,220,000	34,102,010	3,954,117,990	95.31	230,205,010
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,381,219,000	16,808,112,000	16,239,827,000	67,692,258	16,172,134,742	96.62	635,977,258
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,967,149,000	2,593,403,000	1,492,496,827	0	1,492,496,827	57.55	1,100,906,173
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	8,555,170,000	6,495,102,000	5,905,954,050	1,086,300	5,904,867,750	90.93	590,234,250
511129	Belanja Uang Makan PNS	24,357,452,000	19,376,979,000	18,664,689,750	854,450	18,663,835,300	96.32	713,143,700
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	718,985,000	702,215,000	702,215,000	0	702,215,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,194,297,000	2,380,242,000	1,935,520,000	50,284,439	1,885,235,561	81.32	495,006,439
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	192,562,249,000	187,495,405,000	180,474,683,868	173,559,960	180,301,123,908	96.26	7,194,281,092
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,332,523,000	7,919,164,000	7,732,122,664	0	7,732,122,664	97.64	187,041,336
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	176,000	209,000	145,730	100	145,630	69.73	63,370
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	550,086,000	570,246,000	468,627,688	0	468,627,688	82.18	101,618,312
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,443,000	186,747,000	103,586,560	0	103,586,560	55.47	83,160,440
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	898,754,000	953,151,000	869,485,144	0	869,485,144	91.22	83,665,856
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	563,393,000	570,578,000	430,579,145	0	430,579,145	75.46	139,998,855
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,388,668,000	1,606,689,000	1,463,355,000	0	1,463,355,000	91.08	143,334,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,400,000	11,100,000	11,100,000	0	11,100,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	98,500,000	81,240,000	0	81,240,000	82.48	17,260,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	9,950,443,000	11,916,384,000	11,160,241,931	100	11,160,241,831	93.65	756,142,169
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	2,185,367,000	2,819,932,000	2,431,893,691	0	2,431,893,691	86.24	388,038,309
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	70,035,000	202,293,000	162,620,000	0	162,620,000	80.39	39,673,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	2,255,402,000	3,022,225,000	2,594,513,691	0	2,594,513,691	85.85	427,711,309
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	202,391,628,000	203,044,143,000	199,728,137,390	10,856,143	199,717,281,247	98.37	3,326,861,753
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8,251,620,000	9,993,384,000	9,498,010,036	1,608,303	9,496,401,733	95.04	496,982,267
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	210,643,248,000	213,037,527,000	209,226,147,426	12,464,446	209,213,682,980	98.21	3,823,844,020
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	415,411,342,000	415,471,541,000	403,455,586,916	186,024,506	403,269,562,410	97.11	12,201,978,590
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	74,527,550,000	66,392,431,000	64,160,794,435	4,330,000	64,156,464,435	96.64	2,235,966,565
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	708,400,000	577,032,000	227,151,277	0	227,151,277	39.37	349,880,723
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pusat	353,000,000	392,056,000	221,167,035	0	221,167,035	56.41	170,888,965
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,357,360,000	2,502,854,000	2,319,902,000	0	2,319,902,000	92.69	182,952,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	749,647,000	3,600,016,000	3,286,647,903	160,927	3,286,486,976	91.3	313,529,024
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	78,695,957,000	73,464,389,000	70,215,662,650	4,490,927	70,211,171,723	95.58	3,253,217,277
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,439,422,000	20,534,732,000	15,171,509,579	0	15,171,509,579	73.88	5,363,222,421
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,340,538,000	5,816,127,000	5,297,280,000	3,837,500	5,293,442,500	91.08	522,684,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,134,320,000	5,179,806,000	4,121,732,796	55,050,000	4,066,682,796	79.57	1,113,123,204
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	417,798,000	7,066,792,000	6,827,224,374	0	6,827,224,374	96.61	239,567,626
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,332,078,000	38,597,457,000	31,417,746,749	58,887,500	31,358,859,249	81.4	7,238,597,751
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,246,614,000	6,770,820,000	4,280,061,858	0	4,280,061,858	63.21	2,490,758,142
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	77,000,000	83,390,000	35,460,000	0	35,460,000	42.52	47,930,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,323,614,000	6,854,210,000	4,315,521,858	0	4,315,521,858	62.96	2,538,688,142
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	19,499,488,000	16,189,172,000	15,235,719,417	0	15,235,719,417	94.11	953,452,583
522112	Belanja Langganan Telepon	596,940,000	487,139,000	300,561,310	0	300,561,310	61.7	186,577,690
522113	Belanja Langganan Air	534,111,000	425,650,000	293,102,385	0	293,102,385	68.86	132,547,615
522131	Belanja Jasa Konsultansi	3,116,832,000	1,703,509,000	1,702,561,227	0	1,702,561,227	99.94	947,773
522141	Belanja Sewa	10,053,200,000	29,915,061,000	28,294,022,409	15,362,162	28,278,660,247	94.58	1,636,400,753
522151	Belanja Jasa Profesi	3,775,710,000	3,727,153,000	2,609,936,000	2,770,000	2,607,166,000	70.02	1,119,987,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,573,072,000	129,894,000,000	122,817,236,981	0	122,817,236,981	94.55	7,076,763,019
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	46,149,353,000	182,341,684,000	171,253,139,729	18,132,162	171,235,007,567	93.92	11,106,676,433
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,903,896,000	11,519,755,000	9,623,625,032	200,196	9,623,424,836	83.54	1,896,330,164
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	567,141,000	674,750,000	556,976,062	0	556,976,062	82.55	117,773,938
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	49,800,000	49,562,849	0	49,562,849	99.52	237,151
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,040,164,000	1,215,547,000	884,165,820	0	884,165,820	72.74	331,381,180
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,581,741,000	13,776,751,000	10,609,187,209	1,200,000	10,607,987,209	77.01	3,168,763,791
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282,812,000	238,214,000	195,552,050	0	195,552,050	82.09	42,661,950
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,000,000	24,000,000	19,968,310	0	19,968,310	83.2	4,031,690
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	33,000,000	54,690,000	54,584,060	0	54,584,060	99.81	105,940
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0		0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	860,100,000	921,849,000	553,449,082	8,300,000	545,149,082	60.04	376,699,918
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	28,393,054,000	28,475,356,000	22,547,070,474	9,700,196	22,537,370,278	79.18	5,937,985,722
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,567,191,000	75,994,320,000	53,782,732,346	417,452,830	53,365,279,516	70.77	22,629,040,484
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,342,734,000	7,646,630,000	7,088,501,294	4,400,000	7,084,101,294	92.7	562,528,706
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,477,232,000	7,998,429,000	5,024,169,000	0	5,024,169,000	62.81	2,974,260,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,947,379,000	9,784,806,000	2,663,224,255	1,820,000	2,661,404,255	27.22	7,123,401,745
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	67,334,536,000	101,424,185,000	68,558,626,895	423,672,830	68,134,954,065	67.6	33,289,230,935
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	543,494,000	793,884,000	359,750,506	0	359,750,506	45.32	434,133,494
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	543,494,000	793,884,000	359,750,506	0	359,750,506	45.32	434,133,494
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	248,772,086,000	431,951,165,000	368,667,518,861	514,883,615	368,152,635,246	85.35	63,798,529,754
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,886,002,000	51,671,393,000	50,981,852,691	0	50,981,852,691	98.67	689,540,309
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	329,000,000	31,045,000	30,923,000	0	30,923,000	99.61	122,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	42,215,002,000	51,702,438,000	51,012,775,691	0	51,012,775,691	98.67	689,662,309
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66,241,135,000	3,267,289,000	3,246,822,662	0	3,246,822,662	99.37	20,466,338
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	18,382,426,000	4,446,856,000	4,418,410,937	0	4,418,410,937	99.36	28,445,063
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	84,623,561,000	7,714,145,000	7,665,233,599	0	7,665,233,599	99.37	48,911,401
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	297,702,000	297,702,000	0	297,702,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	99,059,000	99,058,798	0	99,058,798	100	202
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	396,761,000	396,760,798	0	396,760,798	100	202
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	502,503,000	502,502,206	0	502,502,206	100	794
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	7,321,000,000	11,440,703,000	11,440,685,696	273,000	11,440,412,696	100	290,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,321,000,000	11,943,206,000	11,943,187,902	273,000	11,942,914,902	100	291,098
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	134,159,563,000	71,756,550,000	71,017,957,990	273,000	71,017,684,990	98.97	738,865,010
	JUMLAH BELANJA	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 04/05/26 9:06 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	2,000,000,000	2,000,000,000	1,043,928,658	0	1,043,928,658	52.2	956,071,342
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi	12,425,162,000	377,690,106,000	367,954,659,842	528,334,130	367,426,325,712	97.28	10,263,780,288
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	7,000,000,000	17,372,308,000	16,405,664,334	27,811,450	16,377,852,884	94.28	994,455,116
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	10,399,600,000	11,898,300,000	10,563,753,722	114,880,000	10,448,873,722	87.82	1,449,426,278
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	5,810,000,000	5,810,000,000	3,531,487,535	990,075	3,530,497,460	60.77	2,279,502,540
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,002,204,000	7,747,854,000	3,756,752,953	6,639,959	3,750,112,994	48.4	3,997,741,006
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	11,870,574,000	11,785,099,000	8,593,286,064	7,499,222	8,585,786,842	72.85	3,199,312,158
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	23,833,477,000	24,176,567,000	8,133,805,833	78,148,867	8,055,656,966	33.32	16,120,910,034
	JUMLAH PROGRAM Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	81,341,017,000	458,480,234,000	419,983,338,941	764,303,703	419,219,035,238	91.6	39,261,198,762
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	7,676,702,000	7,269,550,000	2,683,540,376	37,000	2,683,503,376	36.91	4,586,046,624
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2,500,000,000	2,700,000,000	1,394,135,682	0	1,394,135,682	51.63	1,305,864,318
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	2,250,000,000	2,250,000,000	1,235,382,778	0	1,235,382,778	54.91	1,014,617,222
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	102,000,000,000	102,000,000,000	101,177,900,198	0	101,177,900,198	99.19	822,099,802
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	530,000,000	127,366,000	22,365,604	0	22,365,604	17.56	105,000,396
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	14,703,220,000	14,747,849,000	8,255,874,564	17,977,463	8,237,897,101	55.86	6,509,951,899
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	659,878,449,000	591,953,875,000	558,687,988,721	254,394,245	558,433,594,476	94.34	33,520,280,524
4844	Legislasi dan Litigasi	854,335,000	1,304,197,000	941,202,500	0	941,202,500	72.17	362,994,500
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	790,392,706,000	722,352,837,000	674,398,390,423	272,408,708	674,125,981,715	93.36	48,226,855,285
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	871,733,723,000	1,180,833,071,000	1,094,381,729,364	1,036,712,411	1,093,345,016,953	92.68	87,488,054,047
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	871,733,723,000	1,180,833,071,000	1,094,381,729,364	1,036,712,411	1,093,345,016,953	92.68	87,488,054,047

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
51	BELANJA PEGAWAI	415,411,342,000	415,471,541,000	403,455,586,916	186,024,506	403,269,562,410	97.06	12,201,978,590
52	BELANJA BARANG	248,772,086,000	431,951,165,000	368,667,518,861	514,883,615	368,152,635,246	85.23	63,798,529,754
53	BELANJA MODAL	134,159,563,000	71,756,550,000	71,017,957,990	273,000	71,017,684,990	98.97	738,865,010
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354
	JUMLAH BELANJA	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100KD	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	13,743,207,000	17,606,191,000	15,370,014,560	22,822,224	15,347,192,336	87.17	2,258,998,664
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	13,743,207,000	17,606,191,000	15,370,014,560	22,822,224	15,347,192,336	87.3	2,258,998,664
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	547,053,906,000	632,262,955,000	585,764,170,580	290,402,903	585,473,767,677	92.6	46,789,187,323
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	547,053,906,000	632,262,955,000	585,764,170,580	290,402,903	585,473,767,677	92.65	46,789,187,323
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	20,000,057,000	22,817,892,000	20,759,387,203	19,974,530	20,739,412,673	90.89	2,078,479,327
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	20,000,057,000	22,817,892,000	20,759,387,203	19,974,530	20,739,412,673	90.98	2,078,479,327
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	19,513,919,000	23,460,278,000	21,563,436,239	592,389	21,562,843,850	91.91	1,897,434,150
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	19,513,919,000	23,460,278,000	21,563,436,239	592,389	21,562,843,850	91.91	1,897,434,150
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	14,400,257,000	18,014,141,000	16,286,735,003	10,666,214	16,276,068,789	90.35	1,738,072,211
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	14,400,257,000	18,014,141,000	16,286,735,003	10,666,214	16,276,068,789	90.41	1,738,072,211
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	14,411,023,000	10,420,494,000	8,492,762,522	21,305,052	8,471,457,470	81.3	1,949,036,530
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	14,411,023,000	10,420,494,000	8,492,762,522	21,305,052	8,471,457,470	81.5	1,949,036,530
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	17,725,050,000	17,342,221,000	15,514,605,382	4,926,429	15,509,678,953	89.43	1,832,542,047
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	17,725,050,000	17,342,221,000	15,514,605,382	4,926,429	15,509,678,953	89.46	1,832,542,047
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	16,631,644,000	18,270,295,000	16,387,977,833	4,558,996	16,383,418,837	89.67	1,886,876,163
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	16,631,644,000	18,270,295,000	16,387,977,833	4,558,996	16,383,418,837	89.7	1,886,876,163
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	18,587,273,000	21,449,781,000	19,544,502,245	8,544,650	19,535,957,595	91.08	1,913,823,405
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	18,587,273,000	21,449,781,000	19,544,502,245	8,544,650	19,535,957,595	91.12	1,913,823,405
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARBARU	17,914,752,000	21,887,092,000	19,507,110,385	6,834,601	19,500,275,784	89.09	2,386,816,216
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	17,914,752,000	21,887,092,000	19,507,110,385	6,834,601	19,500,275,784	89.13	2,386,816,216
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	13,444,433,000	15,629,868,000	13,591,223,510	2,799,890	13,588,423,620	86.94	2,041,444,380
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	13,444,433,000	15,629,868,000	13,591,223,510	2,799,890	13,588,423,620	86.96	2,041,444,380
088011900KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	24,129,716,000	30,597,397,000	28,254,159,533	13,808,621	28,240,350,912	92.3	2,357,046,088
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	24,129,716,000	30,597,397,000	28,254,159,533	13,808,621	28,240,350,912	92.34	2,357,046,088
088012200KD	BA(088) ES1(01) BALI							
667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	15,669,146,000	19,795,567,000	18,065,728,258	6,740,746	18,058,987,512	91.23	1,736,579,488
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	15,669,146,000	19,795,567,000	18,065,728,258	6,740,746	18,058,987,512	91.26	1,736,579,488
088012500KD	BA(088) ES1(01) PAPUA							
622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	12,174,011,000	13,537,977,000	11,770,049,014	21,348,993	11,748,700,021	86.78	1,789,276,979
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	12,174,011,000	13,537,977,000	11,770,049,014	21,348,993	11,748,700,021	86.94	1,789,276,979
088013300KD	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT							
667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	11,836,428,000	13,664,057,000	11,416,991,285	190,260,599	11,226,730,686	82.16	2,437,326,314
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	11,836,428,000	13,664,057,000	11,416,991,285	190,260,599	11,226,730,686	83.55	2,437,326,314
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
020505	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21,108,169,000	22,423,050,000	20,852,210,215	75,594,284	20,776,615,931	92.66	1,646,434,069
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	21,108,169,000	22,423,050,000	20,852,210,215	75,594,284	20,776,615,931	92.99	1,646,434,069
	JUMLAH BELANJA 01	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76739373354
	JUMLAH BELANJA	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 04/05/26 9:06 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	124,328,226,000	124,420,837,000	121,921,581,900	16,329,772	121,905,252,128	97.99	2,515,584,872
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,702,000	2,171,000	1,785,205	19,537	1,765,668	82.23	405,332
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,252,255,000	8,203,040,000	7,596,401,578	2,969,360	7,593,432,218	92.6	609,607,782
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,378,808,000	2,328,981,000	2,025,992,558	221,834	2,025,770,724	86.99	303,210,276
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,425,986,000	4,184,323,000	3,988,220,000	34,102,010	3,954,117,990	95.31	230,205,010
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,381,219,000	16,808,112,000	16,239,827,000	67,692,258	16,172,134,742	96.62	635,977,258
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,967,149,000	2,593,403,000	1,492,496,827	0	1,492,496,827	57.55	1,100,906,173
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	8,555,170,000	6,495,102,000	5,905,954,050	1,086,300	5,904,867,750	90.93	590,234,250
511129	Belanja Uang Makan PNS	24,357,452,000	19,376,979,000	18,664,689,750	854,450	18,663,835,300	96.32	713,143,700
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	718,985,000	702,215,000	702,215,000	0	702,215,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,194,297,000	2,380,242,000	1,935,520,000	50,284,439	1,885,235,561	81.32	495,006,439
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,332,523,000	7,919,164,000	7,732,122,664	0	7,732,122,664	97.64	187,041,336
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	176,000	209,000	145,730	100	145,630	69.73	63,370
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	550,086,000	570,246,000	468,627,688	0	468,627,688	82.18	101,618,312
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,443,000	186,747,000	103,586,560	0	103,586,560	55.47	83,160,440
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	898,754,000	953,151,000	869,485,144	0	869,485,144	91.22	83,665,856
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	563,393,000	570,578,000	430,579,145	0	430,579,145	75.46	139,998,855
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,388,668,000	1,606,689,000	1,463,355,000	0	1,463,355,000	91.08	143,334,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,400,000	11,100,000	11,100,000	0	11,100,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	98,500,000	81,240,000	0	81,240,000	82.48	17,260,000
512211	Belanja Uang Lembur	2,185,367,000	2,819,932,000	2,431,893,691	0	2,431,893,691	86.24	388,038,309
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	70,035,000	202,293,000	162,620,000	0	162,620,000	80.39	39,673,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	202,391,628,000	203,044,143,000	199,728,137,390	10,856,143	199,717,281,247	98.37	3,326,861,753
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8,251,620,000	9,993,384,000	9,498,010,036	1,608,303	9,496,401,733	95.04	496,982,267
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	415,411,342,000	415,471,541,000	403,455,586,916	186,024,506	403,269,562,410	97.11	12,201,978,590
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	74,518,438,000	66,392,431,000	64,160,794,435	4,330,000	64,156,464,435	96.64	2,235,966,565
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	708,400,000	577,032,000	227,151,277	0	227,151,277	39.37	349,880,723
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	353,000,000	392,056,000	221,167,035	0	221,167,035	56.41	170,888,965
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,324,240,000	2,469,734,000	2,286,782,000	0	2,286,782,000	92.59	182,952,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	749,647,000	3,600,016,000	3,286,647,903	160,927	3,286,486,976	91.3	313,529,024
521211	Belanja Bahan	10,543,757,000	16,476,322,000	11,197,271,222	0	11,197,271,222	67.96	5,279,050,778
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	926,288,000	2,888,715,000	2,416,318,000	3,837,500	2,412,480,500	83.65	476,234,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,134,320,000	5,179,806,000	4,121,732,796	55,050,000	4,066,682,796	79.57	1,113,123,204
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	417,798,000	6,884,313,000	6,645,120,374	0	6,645,120,374	96.53	239,192,626
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,118,614,000	6,741,849,000	4,251,096,858	0	4,251,096,858	63.06	2,490,752,142
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	75,000,000	79,390,000	32,460,000	0	32,460,000	40.89	46,930,000
522111	Belanja Langganan Listrik	19,499,488,000	16,189,172,000	15,235,719,417	0	15,235,719,417	94.11	953,452,583

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	596,940,000	487,139,000	300,561,310	0	300,561,310	61.7	186,577,690
522113	Belanja Langganan Air	534,111,000	425,650,000	293,102,385	0	293,102,385	68.86	132,547,615
522131	Belanja Jasa Konsultan	2,718,832,000	1,317,159,000	1,316,211,867	0	1,316,211,867	99.93	947,133
522141	Belanja Sewa	8,553,200,000	26,195,026,000	24,696,598,555	15,362,162	24,681,236,393	94.28	1,513,789,607
522151	Belanja Jasa Profesi	2,766,900,000	2,574,625,000	1,476,800,000	380,000	1,476,420,000	57.36	1,098,205,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,373,072,000	129,191,000,000	122,119,375,181	0	122,119,375,181	94.53	7,071,624,819
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,903,896,000	11,519,755,000	9,623,625,032	200,196	9,623,424,836	83.54	1,896,330,164
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	567,141,000	674,750,000	556,976,062	0	556,976,062	82.55	117,773,938
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	49,800,000	49,562,849	0	49,562,849	99.52	237,151
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,040,164,000	1,215,547,000	884,165,820	0	884,165,820	72.74	331,381,180
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,390,033,000	13,460,153,000	10,294,552,159	1,200,000	10,293,352,159	76.48	3,166,800,841
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282,812,000	238,214,000	195,552,050	0	195,552,050	82.09	42,661,950
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,000,000	24,000,000	19,968,310	0	19,968,310	83.2	4,031,690
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	0	0	0	0	0	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	33,000,000	54,690,000	54,584,060	0	54,584,060	99.81	105,940
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	860,100,000	728,709,000	360,309,082	8,300,000	352,009,082	49.44	376,699,918
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,367,079,000	72,743,171,000	50,674,936,809	405,367,105	50,269,569,704	69.66	22,473,601,296
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,191,034,000	7,432,177,000	6,903,021,294	4,400,000	6,898,621,294	92.88	533,555,706
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,477,232,000	7,424,799,000	4,463,329,000	0	4,463,329,000	60.11	2,961,470,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,767,949,000	8,740,345,000	1,917,934,169	0	1,917,934,169	21.94	6,822,410,831
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	543,494,000	691,640,000	257,506,999	0	257,506,999	37.23	434,133,001
	JUMLAH BELANJA BARANG	238,460,179,000	413,059,185,000	350,540,934,310	498,587,890	350,042,346,420	84.86	63,016,838,580
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,953,129,000	46,031,071,000	45,349,667,871	0	45,349,667,871	98.52	681,403,129
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	329,000,000	31,045,000	30,923,000	0	30,923,000	99.61	122,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,540,420,000	173,855,000	153,390,276	0	153,390,276	88.23	20,464,724
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	17,989,787,000	4,136,746,000	4,109,830,937	0	4,109,830,937	99.35	26,915,063
534131	Belanja Modal Jaringan	0	297,702,000	297,702,000	0	297,702,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	99,059,000	99,058,798	0	99,058,798	100	202
536111	Belanja Modal Lainnya	0	502,503,000	502,502,206	0	502,502,206	100	794
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6,929,000,000	11,246,897,000	11,246,879,696	273,000	11,246,606,696	100	290,304
	JUMLAH BELANJA MODAL	57,741,336,000	62,518,878,000	61,789,954,784	273,000	61,789,681,784	98.83	729,196,216
	JUMLAH RUPIAH MURNI	711,612,857,000	891,049,604,000	815,786,476,010	684,885,396	815,101,590,614	91.55	75,948,013,386
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,112,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33,120,000	33,120,000	33,120,000	0	33,120,000	100	0
521211	Belanja Bahan	2,895,665,000	4,058,410,000	3,974,238,357	0	3,974,238,357	97.93	84,171,643

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,414,250,000	2,927,412,000	2,880,962,000	0	2,880,962,000	98.41	46,450,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	182,479,000	182,104,000	0	182,104,000	99.79	375,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	128,000,000	28,971,000	28,965,000	0	28,965,000	99.98	6,000
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,000,000	4,000,000	3,000,000	0	3,000,000	75	1,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	398,000,000	386,350,000	386,349,360	0	386,349,360	100	640
522141	Belanja Sewa	1,500,000,000	3,720,035,000	3,597,423,854	0	3,597,423,854	96.7	122,611,146
522151	Belanja Jasa Profesi	1,008,810,000	1,152,528,000	1,133,136,000	2,390,000	1,130,746,000	98.32	21,782,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000,000	703,000,000	697,861,800	0	697,861,800	99.27	5,138,200
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,708,000	316,598,000	314,635,050	0	314,635,050	99.38	1,962,950
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	193,140,000	193,140,000	0	193,140,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,200,112,000	3,251,149,000	3,107,795,537	12,085,725	3,095,709,812	95.59	155,439,188
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151,700,000	214,453,000	185,480,000	0	185,480,000	86.49	28,973,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	573,630,000	560,840,000	0	560,840,000	97.77	12,790,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179,430,000	1,044,461,000	745,290,086	1,820,000	743,470,086	71.36	300,990,914
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	102,244,000	102,243,507	0	102,243,507	100	493
	JUMLAH BELANJA BARANG	10,311,907,000	18,891,980,000	18,126,584,551	16,295,725	18,110,288,826	95.95	781,691,174
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,253,790,000	5,640,322,000	5,632,184,820	0	5,632,184,820	99.86	8,137,180
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	392,639,000	310,110,000	308,580,000	0	308,580,000	99.51	1,530,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	392,000,000	193,806,000	193,806,000	0	193,806,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,038,429,000	6,144,238,000	6,134,570,820	0	6,134,570,820	99.84	9,667,180
	JUMLAH PNPB	13,350,336,000	25,036,218,000	24,261,155,371	16,295,725	24,244,859,646	96.9	791,358,354
20	SBSN							
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,679,083,000	0	0	0	0	0	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61,700,715,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	JUMLAH BELANJA MODAL	73,379,798,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	JUMLAH SBSN	73,379,798,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	TOTAL	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	1,000,000,000	1,000,000,000	521,964,329	0	521,964,329	52.2	478,035,671
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	720,674,000	180,157,421,000	175,571,211,407	264,167,065	175,307,044,342	1482.56	4,850,376,658
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3,487,800,000	4,237,150,000	3,570,436,991	55,050,000	3,515,386,991	82.97	721,763,009
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	5,810,000,000	5,810,000,000	3,531,487,535	990,075	3,530,497,460	60.77	2,279,502,540
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,002,204,000	7,747,854,000	3,756,752,953	6,639,959	3,750,112,994	500.7	3,997,741,006
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	11,870,574,000	11,785,099,000	8,593,286,064	7,499,222	8,585,786,842	660.6	3,199,312,158
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	23,833,477,000	24,176,567,000	8,133,805,833	78,148,867	8,055,656,966	356	16,120,910,034
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	54,724,729,000	234,914,091,000	203,678,945,112	412,495,188	203,266,449,924	86.704	31,647,641,076
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3,838,351,000	3,634,775,000	1,341,770,188	18,500	1,341,751,688	460.76	2,293,023,312
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,250,000,000	1,350,000,000	697,067,841	0	697,067,841	51.63	652,932,159
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Spesial Mission)	1,125,000,000	1,125,000,000	617,691,389	0	617,691,389	54.91	507,308,611
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	51,000,000,000	51,000,000,000	50,588,950,099	0	50,588,950,099	99.19	411,049,901
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	265,000,000	63,683,000	11,182,802	0	11,182,802	17.56	52,500,198
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	14,703,220,000	14,747,849,000	8,255,874,564	17,977,463	8,237,897,101	850	6,509,951,899
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	583,852,222,000	582,910,009,000	549,653,791,515	254,394,245	549,399,397,270	1486.23	33,510,611,730
4844	Legislasi dan Litigasi	854,335,000	1,304,197,000	941,202,500	0	941,202,500	72.17	362,994,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	656,888,128,000	656,135,513,000	612,107,530,898	272,390,208	611,835,140,690	93.29	44,300,372,310

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	711,612,857,000	891,049,604,000	815,786,476,010	684,885,396	815,101,590,614	91.553	75,948,013,386
04	PNBP							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	5,491,907,000	8,687,632,000	8,406,118,514	0	8,406,118,514	96.76	281,513,486
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	3,500,000,000	8,686,154,000	8,202,832,167	13,905,725	8,188,926,442	94.28	497,227,558
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	1,712,000,000	1,712,000,000	1,711,439,870	2,390,000	1,709,049,870	99.83	2,950,130
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	10,703,907,000	19,085,786,000	18,320,390,551	16,295,725	18,304,094,826	95.99	781,691,174
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,646,429,000	5,950,432,000	5,940,764,820	0	5,940,764,820	199.83	9,667,180
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,646,429,000	5,950,432,000	5,940,764,820	0	5,940,764,820	99.838	9,667,180
	JUMLAH BELANJA PNBPNBP	13,350,336,000	25,036,218,000	24,261,155,371	16,295,725	24,244,859,646	96.904	791,358,354
20	SBSN							
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	73,379,798,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	73,379,798,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	JUMLAH BELANJA SBSN	73,379,798,000	3,093,434,000	3,093,432,386	0	3,093,432,386	100	1,614
	JUMLAH	798,342,991,000	919,179,256,000	843,141,063,767	701,181,121	842,439,882,646	91.73	76,739,373,354

LAMPIRAN II

Neraca

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak 04/05/26 9:05 AM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	9,270,300	(9,270,300)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	12,877,987,563	33,980,518,810	(21,102,531,247)	(62.10)
Piutang Bukan Pajak	1,563,061,415	6,233,799,930	(4,670,738,515)	(74.93)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(7,815,307)	(31,169,000)	23,353,693	(74.93)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,555,246,108	6,202,630,930	(4,647,384,822)	(74.93)
Persediaan	6,943,678,986	6,343,765,576	599,913,410	9.46
JUMLAH ASET LANCAR	21,376,912,657	46,536,185,616	(25,159,272,959)	(54.06)
ASET TETAP				
Tanah	2,342,552,072,368	2,331,580,054,368	10,972,018,000	0.47
Peralatan dan Mesin	781,239,544,693	768,036,979,101	13,202,565,592	1.72
Gedung dan Bangunan	924,041,534,676	896,194,810,778	27,846,723,898	3.11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,984,175,738	24,637,574,940	346,600,798	1.41
Aset Tetap Lainnya	14,199,030,707	13,675,359,416	523,671,291	3.83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	415,613,806	19,621,605,525	(19,205,991,719)	(97.88)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(865,723,032,479)	(800,744,594,530)	(64,978,437,949)	8.11
JUMLAH ASET TETAP	3,221,708,939,509	3,253,001,789,598	(31,292,850,089)	(0.96)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	64,782,022,999	59,620,529,497	5,161,493,502	8.66
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,126,679,784	311,639,851,974	(310,513,172,190)	(99.64)
Aset Lain-lain	18,605,507,827	20,550,730,766	(1,945,222,939)	(9.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(66,155,859,679)	(69,672,001,938)	3,516,142,259	(5.05)
JUMLAH ASET LAINNYA	18,358,350,931	322,139,110,299	(303,780,759,368)	(94.30)
JUMLAH ASET	3,261,444,203,097	3,621,677,085,513	(360,232,882,416)	(9.95)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,720,044,936	313,598,678,284	(310,878,633,348)	(99.13)
Pendapatan Diterima Dimuka	1,097,647,338	1,033,351,816	64,295,522	6.22
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,817,692,274	314,632,030,100	(310,814,337,826)	(98.79)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,817,692,274	314,632,030,100	(310,814,337,826)	(98.79)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,257,626,510,823	3,307,045,055,413	(49,418,544,590)	(1.49)
JUMLAH EKUITAS	3,257,626,510,823	3,307,045,055,413	(49,418,544,590)	(1.49)
JUMLAH EKUITAS	3,257,626,510,823	3,307,045,055,413	(49,418,544,590)	(1.49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,261,444,203,097	3,621,677,085,513	(360,232,882,416)	(9.95)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak 04/05/26 9:05 AM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:04 AM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	50,694,737,982	39,538,699,954	11,156,038,028	28.215
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	50,694,737,982	39,538,699,954	11,156,038,028	28.215
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	50,694,737,982	39,538,699,954	11,156,038,028	28.215
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	402,985,820,372	373,703,136,554	29,282,683,818	7.836
Beban Persediaan	3,634,041,844	6,596,632,606	(2,962,590,762)	(44.911)
Beban Barang dan Jasa	293,110,926,817	758,833,704,817	(465,722,778,000)	(61.373)
Beban Pemeliharaan	21,377,457,438	24,043,517,036	(2,666,059,598)	(11.088)
Beban Perjalanan Dinas	68,491,167,564	130,157,147,903	(61,665,980,339)	(47.378)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:04 AM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,162,578,463	106,420,894,744	(258,316,281)	(0.243)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23,353,693)	17,432,034	(40,785,727)	(233.97)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	895,738,638,805	1,399,772,465,694	(504,033,826,889)	(36.008)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(845,043,900,823)	(1,360,233,765,740)	515,189,864,917	(37.875)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(258,696,790)	(522,246,218)	263,549,428	(50.465)
Pendapatan Pelepasan Aset	625,315,800	436,080,789	189,235,011	43.394
Beban Pelepasan Aset	884,012,590	958,327,007	(74,314,417)	(7.755)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,839,547	22,171,064	(19,331,517)	(87.193)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	98,688,023	183,628,968	(84,940,945)	(46.257)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95,848,476	161,457,904	(65,609,428)	(40.636)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(255,857,243)	(500,075,154)	244,217,911	(48.836)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(845,299,758,066)	(1,360,733,840,894)	515,434,082,828	(37.879)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(845,299,758,066)	(1,360,733,840,894)	515,434,082,828	(37.879)

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,307,045,055,413	3,208,549,866,357	98,495,189,056	3.07
SURPLUS/DEFISIT-LO	(845,299,758,066)	(1,360,733,840,894)	515,434,082,828	(37.88)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	11,957,800,414	(1,771,756,201)	13,729,556,615	(774.91)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	1,678,100	(1,678,100)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	11,952,449,594	(1,770,314,301)	13,722,763,895	(775.16)
LAIN-LAIN	5,350,820	(3,120,000)	8,470,820	(271.5)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	783,923,413,062	1,461,000,786,151	(677,077,373,089)	(46.34)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(49,418,544,590)	98,495,189,056	(147,913,733,646)	(150.17)
EKUITAS AKHIR	3,257,626,510,823	3,307,045,055,413	(49,418,544,590)	(1.49)

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN V

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 18/02/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9,270,300	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	33,980,518,810	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,233,799,930	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	31,169,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,036,557,346	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	307,208,230	0
0.0	131111	Tanah	2,331,580,054,368	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	768,036,979,101	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	896,194,810,778	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,934,621,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,233,986,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,089,820,513	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,585,538,903	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19,621,605,525	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	587,961,924,338
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	192,573,355,342
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,260,541,380
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	877,968,085
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,407,560,422
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	663,244,963
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	57,301,344,197	0
0.0	162161	Lisensi	2,024,640,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	311,639,851,974	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	18,650,632,641	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,900,098,125	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	17,803,040,854
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	71,421
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	49,867,559,538
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	101,232,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,900,098,125
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	108,794,949
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,826,222,943
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	311,663,660,392
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,033,351,816
0.0	391111	Ekuitas	0	3,307,045,055,413

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 18/02/2026

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		JUMLAH	4,492,124,850,981	4,492,124,850,981

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	12,877,987,563	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,563,061,415	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	7,815,307
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,309,140,970	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	634,538,016	0
0.0	131111	Tanah	2,342,552,072,368	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	781,239,544,693	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	924,041,534,676	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,934,621,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,580,587,775	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,876,193,196	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,322,837,511	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	415,613,806	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	624,605,384,926
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	220,855,495,571
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,467,277,564
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	985,952,672
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,517,495,266
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	291,426,480
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	55,303,610,086	0
0.0	162161	Lisensi	9,183,867,613	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,126,679,784	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	13,861,094,877	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4,744,412,950	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	12,993,996,841
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	78,563
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	47,770,180,945
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	674,429,780
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	4,717,173,550
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	138,058,729
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,455,306,423
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,126,679,784
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,097,647,338
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	842,439,882,646
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	58,905,511,816	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313211	Transfer Keluar	139,254,973,813	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	139,254,973,813
0.0	391111	Ekuitas	0	3,307,045,055,413
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	11,952,449,594
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	5,350,820
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	389,042,232
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	535,134,300
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	90,181,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	668,799,483
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	362,952,025
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	888,380,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,968,601,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	44,734,440,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	71,565,474
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	29,804,442
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	68,883,581
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	121,891,329,256	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,746,714	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,593,567,138	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,025,935,826	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,954,847,990	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16,134,982,682	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,493,386,182	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,905,157,430	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	18,462,091,320	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	702,240,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,884,675,561	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	7,732,122,664	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	145,630	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	468,627,688	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	103,586,560	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	869,485,144	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	430,579,145	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,451,325,550	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	11,100,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	81,240,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	2,432,506,691	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	162,281,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	199,697,996,101	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9,494,864,100	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	86,719,751,631	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	227,151,277	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	202,531,685	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2,319,902,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,286,486,976	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,097,106,996	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,293,442,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,646,082,766	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,820,631,374	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	33,508,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	14,914,054,498	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	280,903,568	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	288,094,139	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,702,561,227	0
3.0	522141	Beban Sewa	28,283,910,463	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,608,666,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	122,386,141,217	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,588,443,868	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	49,562,849	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	776,706,620	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,617,606,409	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,968,310	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54,584,060	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	545,149,082	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53,378,642,509	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,067,201,294	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,024,169,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,661,404,255	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	359,750,506	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73,741,528,108	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27,755,250,533	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	206,736,184	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	107,984,587	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	122,850,224	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60,285,834	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,511,087,007	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	573,197,780	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	27,239,400	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	56,411,664	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,634,041,844	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	725,436,240	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	23,353,693
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	884,012,590	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	95,848,476	0
JUMLAH			5,288,233,249,755	5,288,233,249,755

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	842,439,882,646
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	58,905,511,816	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	535,134,300
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	90,181,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	733,095,005
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	362,952,025
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	888,380,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,968,601,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	44,734,440,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,658,885,488
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	456,546,778
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	1,511,588,498
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	3,959,404,422
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	6,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	302,800
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,329,772
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	121,921,581,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,785,205	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	19,537
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,596,401,578	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,969,360
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	221,834
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,025,992,558	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	34,102,010
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,988,220,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	67,692,258
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,239,827,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,492,496,827	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,086,300
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,905,954,050	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	854,450
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	18,664,689,750	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	702,215,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	50,284,439
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,935,520,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7,732,122,664	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	100
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	145,730	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	468,627,688	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	103,586,560	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	869,485,144	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	430,579,145	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,463,355,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	11,100,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	81,240,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	2,431,893,691	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	162,620,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	10,856,143
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	199,728,137,390	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9,498,010,036	0
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	1,608,303
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	64,160,794,435	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,330,000
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	227,151,277	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	221,167,035	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,319,902,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,286,647,903	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	160,927
3.0	521211	Belanja Bahan	15,171,509,579	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,837,500
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,297,280,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,121,732,796	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	55,050,000
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,827,224,374	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,280,061,858	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	35,460,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	15,235,719,417	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	300,561,310	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	293,102,385	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,702,561,227	0
3.0	522141	Belanja Sewa	28,294,022,409	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	15,362,162
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,609,936,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,770,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	122,817,236,981	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	200,196

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:05 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,623,625,032	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	556,976,062	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	49,562,849	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	884,165,820	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,609,187,209	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,200,000
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	195,552,050	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,968,310	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54,584,060	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	553,449,082	0
3.1	523199	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	8,300,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	417,452,830
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,782,732,346	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,400,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,088,501,294	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,024,169,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,663,224,255	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	1,820,000
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	359,750,506	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,981,852,691	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	30,923,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,246,822,662	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,418,410,937	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	297,702,000	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	99,058,798	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	502,502,206	0
3.1	536121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap	0	273,000
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	11,440,685,696	0
JUMLAH			902,046,575,583	902,046,575,583

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN VI

Laporan Realisasi Pendapatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	535,134,300	0	535,134,300	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	90,181,500	0	90,181,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	888,581,000	733,095,005	0	733,095,005	82.5
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	375,000,000	362,952,025	0	362,952,025	96.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,263,581,000	1,721,362,830	0	1,721,362,830	136.23
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	809,410,000	888,380,000	0	888,380,000	109.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	809,410,000	888,380,000	0	888,380,000	109.76
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4,605,332,000	3,968,601,000	0	3,968,601,000	86.17
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	30,784,024,000	44,734,440,000	0	44,734,440,000	145.32
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	35,389,356,000	48,703,041,000	0	48,703,041,000	137.62
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,658,885,488	0	1,658,885,488	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,658,885,488	0	1,658,885,488	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	456,546,778	0	456,546,778	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,511,588,498	0	1,511,588,498	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,959,404,422	0	3,959,404,422	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6,000,000	0	6,000,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	302,800	0	302,800	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,933,842,498	0	5,933,842,498	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24
	JUMLAH PENDAPATAN	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	535,134,300	0	535,134,300	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	90,181,500	0	90,181,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	888,581,000	733,095,005	0	733,095,005	82.5
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	375,000,000	362,952,025	0	362,952,025	96.79
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	809,410,000	888,380,000	0	888,380,000	109.76
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4,605,332,000	3,968,601,000	0	3,968,601,000	86.17
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	30,784,024,000	44,734,440,000	0	44,734,440,000	145.32
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,658,885,488	0	1,658,885,488	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	456,546,778	0	456,546,778	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,511,588,498	0	1,511,588,498	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,959,404,422	0	3,959,404,422	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6,000,000	0	6,000,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	302,800	0	302,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24
	JUMLAH PENDAPATAN	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl--rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
088010100KD	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	4,190,000	23,470,611	0	23,470,611	560.16
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	4,190,000	23,470,611	0	23,470,611	560.16
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	31,746,580,000	53,488,152,699	0	53,488,152,699	168.48
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	31,746,580,000	53,488,152,699	0	53,488,152,699	168.48
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	72,655,000	113,817,886	0	113,817,886	156.66
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	72,655,000	113,817,886	0	113,817,886	156.66
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	52,244,000	23,717,908	0	23,717,908	45.4
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	52,244,000	23,717,908	0	23,717,908	45.4
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	8,504,000	134,394,488	0	134,394,488	1580.37
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	8,504,000	134,394,488	0	134,394,488	1,580.37
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	161	0	161	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	161	0	161	
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	32,044,000	68,489,391	0	68,489,391	213.74
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	32,044,000	68,489,391	0	68,489,391	213.74
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl--rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	29,532,000	38,665,006	0	38,665,006	130.93
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	29,532,000	38,665,006	0	38,665,006	130.93
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN					
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	23,549,000	23,069,117	0	23,069,117	97.96
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	23,549,000	23,069,117	0	23,069,117	97.96
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN					
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARBARU	14,684,000	117,978,580	0	117,978,580	803.45
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	14,684,000	117,978,580	0	117,978,580	803.45
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA					
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	23,197,000	4,718,951	0	4,718,951	20.34
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	23,197,000	4,718,951	0	4,718,951	20.34
088011900KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	6,228,000	19,161,632	0	19,161,632	307.67
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	6,228,000	19,161,632	0	19,161,632	307.67
088012200KD	BA(088) ES1(01) BALI					
667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	33,609,000	32,963,994	0	32,963,994	98.08
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	33,609,000	32,963,994	0	32,963,994	98.08
088012500KD	BA(088) ES1(01) PAPUA					
622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	38,943,000	110,833,051	0	110,833,051	284.6
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	38,943,000	110,833,051	0	110,833,051	284.6
088013300KD	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT					
667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	0	2,232,650	0	2,232,650	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088013300KD BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	0	2,232,650	0	2,232,650	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,376,388,000	4,703,845,691	0	4,703,845,691	87.49
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	5,376,388,000	4,703,845,691	0	4,703,845,691	87.49
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24
	JUMLAH PENDAPATAN	37,462,347,000	58,905,511,816	0	58,905,511,816	157.24

LAMPIRAN VII

Laporan Posisi BMN di Neraca

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl.Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:10 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,309,140,970
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	634,538,016
131111	Tanah	2,342,552,072,368
132111	Peralatan dan Mesin	781,239,544,693
133111	Gedung dan Bangunan	924,041,534,676
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,934,621,163
134113	Jaringan	5,580,587,775
135111	Aset Tetap Renovasi	12,876,193,196
135121	Aset Tetap Lainnya	1,322,837,511
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	415,613,806
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(624,605,384,926)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(220,855,495,571)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16,467,277,564)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(985,952,672)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,517,495,266)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(291,426,480)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	55,303,610,086
162161	Lisensi	9,183,867,613
162171	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,861,094,877
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4,744,412,950
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(12,993,996,841)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(78,563)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(47,770,180,945)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(674,429,780)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(4,717,173,550)
J U M L A H		3,245,884,289,642

LAMPIRAN VIII

Laporan Barang Kuasa Pengguna

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	585,438	2,331,580,054,368	0	10,972,018,000	326	0	585,112	2,342,552,072,368
20101	TANAH PERSIL	585,268	2,330,462,866,368	0	10,972,018,000	326	0	584,942	2,341,434,884,368
20103	LAPANGAN	170	1,117,188,000	0	0	0	0	170	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	64,812	768,036,979,101	2,992	66,175,703,209	4,906	52,973,137,617	62,898	781,239,544,693
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	213	38,944,767,751	10	2,045,595,088	6	1,218,777,400	217	39,771,585,439
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	211	42,637,868,720	20	10,652,155,590	14	4,675,180,148	217	48,614,844,162
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	107	247,687,720	1	1,645,000	12	16,870,000	96	232,462,720
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	6,062,155,711	1	1,810,900	1	12,650,000	29	6,051,316,611
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	42	132,108,050	1	4,499,900	2	1,900,000	41	134,707,950
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	0	0	0	0	8	109,795,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	0	0	0	0	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	9,084	82,367,541,436	254	1,398,956,366	427	2,638,844,347	8,911	81,127,653,455
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,507	149,524,519,562	1,285	6,062,255,921	2,794	5,462,512,793	35,998	150,124,262,690
30601	ALAT STUDIO	1,163	40,260,019,087	127	6,906,755,312	140	3,597,289,924	1,150	43,569,484,475
30602	ALAT KOMUNIKASI	541	4,888,094,509	2	6,993,000	124	288,860,891	419	4,606,226,618
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	1,905,464,793	0	0	0	0	13	1,905,464,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	291	881,215,794	5	190,752,750	5	46,994,000	291	1,024,974,544
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	2	22,333,200	0	0	16	142,533,825
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	85	5,252,882,817	0	0	7	1,074,328,682	78	4,178,554,135
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	1	3,245,000	16	84,425,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	4,284,000	0	0	0	0	1	4,284,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	2	68,961,668	2	68,961,668	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	9,927	146,175,869,826	1,150	20,326,391,836	897	12,809,038,161	10,180	153,693,223,501
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,457	246,094,089,850	132	18,486,596,678	472	20,984,488,603	5,117	243,596,197,925
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	64,269,000	0	0	0	0	6	64,269,000
31503	ALAT SAR	46	1,795,742,500	0	0	2	73,196,000	44	1,722,546,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	0	0	0	0	27	143,815,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17	287,810,000	0	0	0	0	17	287,810,000
133111	Gedung dan Bangunan	486	896,194,810,778	58	161,591,901,325	48	133,745,177,427	496	924,041,534,676
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	174	775,739,279,774	19	158,230,723,470	8	130,394,907,927	185	803,575,095,317
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	283	104,910,773,764	39	3,232,096,000	40	3,307,552,000	282	104,835,317,764
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,499,188,240	0	129,081,855	0	42,717,500	28	15,585,552,595

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30501	ALAT KANTOR	48	331,403,135	405	2,337,165,910	339	1,992,387,549	114	676,181,496
30502	ALAT RUMAH TANGGA	404	1,061,451,282	2,096	3,198,534,430	1,605	2,363,465,790	895	1,896,519,922
30601	ALAT STUDIO	14	58,268,597	132	1,962,734,299	93	811,988,820	53	1,209,014,076
30602	ALAT KOMUNIKASI	7	465,458,610	121	242,650,891	104	130,730,580	24	577,378,921
30701	ALAT KEDOKTERAN	7	9,689,000	5	46,994,000	7	45,705,000	5	10,978,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	127,632,947	7	1,074,328,682	0	0	8	1,201,961,629
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	1	3,245,000	1	3,245,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	137	1,546,717,403	421	4,346,462,321	236	2,533,495,455	322	3,359,684,269
31002	PERALATAN KOMPUTER	85	13,395,306,997	445	20,424,324,663	418	30,482,449,771	112	3,337,181,889
31503	ALAT SAR	0	0	2	73,196,000	0	0	2	73,196,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	14,190,000	0	0	2	14,190,000	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16	1,071,795,000	5	284,988,000	4	209,532,000	17	1,147,251,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	45,825,000	0	0	0	0	1	45,825,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	6	50,160,000	6	50,160,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1	6,500,000	3,997	269,042,392	2,123	232,719,075	1,875	42,823,317
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	10	30,700,000	0	0	10	30,700,000	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4,052,775,411,244		277,187,035,278		229,084,993,463		4,100,877,453,059

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	585,112	2,342,552,072,368	0	0	0	2,342,552,072,368
20101	TANAH PERSIL	584,942	2,341,434,884,368	0	0	0	2,341,434,884,368
20103	LAPANGAN	170	1,117,188,000	0	0	0	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	62,898	781,239,544,693	(587,961,924,338)	(36,643,460,588)	(624,605,384,926)	156,634,159,767
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	217	39,771,585,439	(31,487,294,413)	(2,537,191,508)	(34,024,485,921)	5,747,099,518
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	217	48,614,844,162	(33,999,073,728)	(1,217,192,716)	(35,216,266,444)	13,398,577,718
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	96	232,462,720	(216,478,970)	(6,008,750)	(222,487,720)	9,975,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	6,051,316,611	(5,789,478,463)	(39,127,055)	(5,828,605,518)	222,711,093
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	41	134,707,950	(120,981,535)	(2,850,080)	(123,831,615)	10,876,335
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	(77,176,725)	(20,128,650)	(97,305,375)	12,489,675
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	(49,107,300)	0	(49,107,300)	0
30501	ALAT KANTOR	8,911	81,127,653,455	(77,540,964,463)	719,032,891	(76,821,931,572)	4,305,721,883
30502	ALAT RUMAH TANGGA	35,998	150,124,262,690	(133,306,729,498)	(2,858,976,875)	(136,165,706,373)	13,958,556,317
30601	ALAT STUDIO	1,150	43,569,484,475	(27,486,748,795)	(2,493,915,386)	(29,980,664,181)	13,588,820,294
30602	ALAT KOMUNIKASI	419	4,606,226,618	(4,819,904,150)	255,963,206	(4,563,940,944)	42,285,674
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	1,905,464,793	(1,267,927,810)	(150,479,511)	(1,418,407,321)	487,057,472
30701	ALAT KEDOKTERAN	291	1,024,974,544	(821,421,708)	(18,270,986)	(839,692,694)	185,281,850
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16	142,533,825	(91,633,250)	(22,091,895)	(113,725,145)	28,808,680
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	78	4,178,554,135	(5,057,586,578)	988,274,075	(4,069,312,503)	109,241,632
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	16	84,425,000	(46,899,282)	(9,511,076)	(56,410,358)	28,014,642
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	4,284,000	(1,285,200)	(428,400)	(1,713,600)	2,570,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	10,180	153,693,223,501	(99,986,014,527)	(18,727,998,186)	(118,714,012,713)	34,979,210,788
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,117	243,596,197,925	(163,737,079,411)	(10,496,521,370)	(174,233,600,781)	69,362,597,144
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	64,269,000	(4,284,600)	(4,284,600)	(8,569,200)	55,699,800
31503	ALAT SAR	44	1,722,546,500	(1,795,742,500)	73,196,000	(1,722,546,500)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	(141,136,432)	(535,716)	(141,672,148)	2,142,852
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17	287,810,000	(116,975,000)	(74,414,000)	(191,389,000)	96,421,000
133111	Gedung dan Bangunan	496	924,041,534,676	(192,573,355,342)	(28,282,140,229)	(220,855,495,571)	703,186,039,105
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	185	803,575,095,317	(168,390,315,223)	(24,812,291,183)	(193,202,606,406)	610,372,488,911
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	282	104,835,317,764	(21,410,555,581)	(3,006,659,149)	(24,417,214,730)	80,418,103,034
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	(7,010,612)	(1,001,516)	(8,012,128)	37,556,872
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,585,552,595	(2,765,473,926)	(462,188,381)	(3,227,662,307)	12,357,890,288

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:09 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	(16,260,541,380)	(206,736,184)	(16,467,277,564)	1,689,236
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	(16,260,126,000)	(206,680,800)	(16,466,806,800)	0
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	(415,380)	(55,384)	(470,764)	1,689,236
134112	Irigasi	26	2,934,621,163	(877,968,085)	(107,984,587)	(985,952,672)	1,948,668,491
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	(38,211,067)	(5,587,530)	(43,798,597)	213,278,003
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	(28,985,130)	(3,864,684)	(32,849,814)	126,170,186
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	(16,428,500)	0	(16,428,500)	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	(613,252,207)	(74,386,883)	(687,639,090)	1,069,659,973
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	394,889,000	(94,165,530)	(12,555,404)	(106,720,934)	288,168,066
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	(86,925,651)	(11,590,086)	(98,515,737)	251,392,263
134113	Jaringan	26	5,580,587,775	(2,407,560,422)	(109,934,844)	(2,517,495,266)	3,063,092,509
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	(214,729,916)	(11,185,751)	(225,915,667)	109,656,833
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	(303,823,517)	(46,802,865)	(350,626,382)	1,432,853,558
50310	INSTALASI LAIN	6	917,573,820	(917,573,820)	0	(917,573,820)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	(64,035,095)	(3,461,357)	(67,496,452)	36,344,248
50402	JARINGAN LISTRIK	11	2,375,329,165	(858,072,069)	(45,245,288)	(903,317,357)	1,472,011,808
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	(49,326,005)	(3,239,583)	(52,565,588)	12,226,062
135111	Aset Tetap Renovasi	27	12,876,193,196	(609,295,525)	381,478,258	(227,817,267)	12,648,375,929
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25	12,791,956,296	(609,295,525)	381,478,258	(227,817,267)	12,564,139,029
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	5,667	1,322,837,511	(53,949,438)	(9,659,775)	(63,609,213)	1,259,228,298
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5,421	527,137,411	0	0	0	527,137,411
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	215	656,481,000	0	0	0	656,481,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	(53,949,438)	(9,659,775)	(63,609,213)	21,109,887
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	33,000,000	0	0	0	33,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,434	13,861,094,877	(17,803,040,854)	4,809,044,013	(12,993,996,841)	867,098,036
30103	ALAT BANTU	3	151,984,800	(285,067,670)	133,082,870	(151,984,800)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	118,464,558	(197,800,000)	79,335,442	(118,464,558)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	(2,827,000)	2,827,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	12,650,000	0	(12,650,000)	(12,650,000)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	114	676,181,496	(331,046,735)	(345,134,761)	(676,181,496)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:09 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30502	ALAT RUMAH TANGGA	895	1,896,519,922	(1,056,976,282)	(837,595,066)	(1,894,571,348)	1,948,574
30601	ALAT STUDIO	53	1,209,014,076	(58,268,597)	(1,149,935,479)	(1,208,204,076)	810,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	24	577,378,921	(465,458,610)	(111,920,311)	(577,378,921)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	10,978,000	(9,580,100)	(1,397,900)	(10,978,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	1,201,961,629	(127,632,947)	(1,073,864,682)	(1,201,497,629)	464,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	322	3,359,684,269	(1,546,717,403)	(1,806,996,873)	(3,353,714,276)	5,969,993
31002	PERALATAN KOMPUTER	112	3,337,181,889	(13,395,306,997)	10,058,125,108	(3,337,181,889)	0
31503	ALAT SAR	2	73,196,000	0	(73,196,000)	(73,196,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	(14,190,000)	14,190,000	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	1,147,251,000	(291,338,970)	(63,048,062)	(354,387,032)	792,863,968
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	45,825,000	(20,829,543)	(2,777,273)	(23,606,816)	22,218,184
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,875	42,823,317	0	0	0	42,823,317
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		716,457	4,100,877,453,059	(818,547,635,384)	(60,169,393,936)	(878,717,029,320)	3,222,160,423,739

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	15,041	7,528,298,803	10,447	7,193,238,962	944	456,447,953	24,544	14,265,089,812
30103	ALAT BANTU	27	22,124,800	2	1,782,005	0	0	29	23,906,805
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	15,529,075	9	7,390,056	1	367,920	27	22,551,211
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	6,871,309	3	1,394,050	0	0	13	8,265,359
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	18	11,360,712	5	3,709,105	0	0	23	15,069,817
30303	ALAT UKUR	11	5,978,300	0	0	0	0	11	5,978,300
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	489,900	0	0	0	0	1	489,900
30501	ALAT KANTOR	859	594,268,326	993	710,137,059	22	13,418,400	1,830	1,290,986,985
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,913	4,395,714,381	7,074	5,557,265,878	661	379,028,075	14,326	9,573,952,184
30601	ALAT STUDIO	539	350,505,561	173	107,268,720	8	4,323,000	704	453,451,281
30602	ALAT KOMUNIKASI	395	149,141,459	167	120,153,845	57	18,498,000	505	250,797,304
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	2	1,579,752	0	0	2	1,579,752
30701	ALAT KEDOKTERAN	101	23,054,730	12	6,537,460	1	362,500	112	29,229,690
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	3	2,831,040	0	0	13	9,985,040
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	0	0	0	0	32	2,800,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	2	1,832,358	0	0	2	1,832,358
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,083	1,919,475,750	1,788	626,058,534	194	40,450,058	6,677	2,505,084,226
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	200	39,560,400	0	0	200	39,560,400
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	0	0	0	0	5	3,405,600
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	4,221,000	0	0	0	0	9	4,221,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	14	5,738,700	0	0	17	19,074,600
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	0	0	0	0	1	894,600
133111	Gedung dan Bangunan	5	24,331,300	3	47,028,300	1	13,519,800	7	57,839,800
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	1	19,988,700	0	0	2	38,470,000
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	2	27,039,600	1	13,519,800	5	19,369,800
135121	Aset Tetap Lainnya	496	36,069,500	0	0	0	0	496	36,069,500
60501	TANAMAN	496	36,069,500	0	0	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3	1,262,400	283	84,575,065	160	43,968,540	126	41,868,925
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	1	367,920	1	367,920	0	0
30303	ALAT UKUR	1	862,400	0	0	0	0	1	862,400
30501	ALAT KANTOR	0	0	7	1,389,000	7	1,389,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2	400,000	217	63,957,645	111	33,363,620	108	30,994,025
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	57	18,498,000	41	8,848,000	16	9,650,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	1	362,500	0	0	1	362,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			7,589,962,003		7,324,842,327		513,936,293		14,400,868,037

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:10 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	24,544	14,265,089,812	(3,360,804,317)	(1,997,011,343)	(5,357,815,660)	8,907,274,152
30103	ALAT BANTU	29	23,906,805	(7,843,843)	(3,050,469)	(10,894,312)	13,012,493
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	27	22,551,211	(12,666,872)	(4,132,553)	(16,799,425)	5,751,786
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	13	8,265,359	(852,463)	(756,834)	(1,609,297)	6,656,062
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	23	15,069,817	(5,238,751)	(2,008,293)	(7,247,044)	7,822,773
30303	ALAT UKUR	11	5,978,300	(2,972,850)	(1,041,660)	(4,014,510)	1,963,790
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	489,900	(122,475)	(122,475)	(244,950)	244,950
30501	ALAT KANTOR	1,830	1,290,986,985	(123,692,526)	(182,562,851)	(306,255,377)	984,731,608
30502	ALAT RUMAH TANGGA	14,326	9,573,952,184	(2,165,033,964)	(1,175,251,932)	(3,340,285,896)	6,233,666,288
30601	ALAT STUDIO	704	453,451,281	(112,124,245)	(77,309,602)	(189,433,847)	264,017,434
30602	ALAT KOMUNIKASI	505	250,797,304	(90,533,216)	(16,497,699)	(107,030,915)	143,766,389
30603	PERALATAN PEMANCAR	2	1,579,752	0	(78,988)	(78,988)	1,500,764
30701	ALAT KEDOKTERAN	112	29,229,690	(15,556,185)	(3,490,616)	(19,046,801)	10,182,889
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	(1,973,400)	0	(1,973,400)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	13	9,985,040	(4,062,876)	(1,012,190)	(5,075,066)	4,909,974
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	(1,121,250)	(197,500)	(1,318,750)	1,481,250
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	2	1,832,358	0	(342,406)	(342,406)	1,489,952
31002	PERALATAN KOMPUTER	6,677	2,505,084,226	(799,173,607)	(523,901,274)	(1,323,074,881)	1,182,009,345
31502	ALAT PELINDUNG	200	39,560,400	0	(3,956,000)	(3,956,000)	35,604,400
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	(3,405,600)	0	(3,405,600)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	4,221,000	(809,250)	(527,625)	(1,336,875)	2,884,125
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	17	19,074,600	(13,024,544)	(472,176)	(13,496,720)	5,577,880
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	(596,400)	(298,200)	(894,600)	0
133111	Gedung dan Bangunan	7	57,839,800	(2,188,565)	(821,711)	(3,010,276)	54,829,524
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	38,470,000	(924,065)	(569,513)	(1,493,578)	36,976,422
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	19,369,800	(1,264,500)	(252,198)	(1,516,698)	17,853,102
135121	Aset Tetap Lainnya	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
60501	TANAMAN	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	126	41,868,925	(831,200)	(40,779,005)	(41,610,205)	258,720
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	1	862,400	(431,200)	(172,480)	(603,680)	258,720
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	108	30,994,025	(400,000)	(30,594,025)	(30,994,025)	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	16	9,650,000	0	(9,650,000)	(9,650,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	362,500	0	(362,500)	(362,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
 Tanggal : 04/05/26 9:10 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		25,173	14,400,868,037	(3,363,824,082)	(2,038,612,059)	(5,402,436,141)	8,998,431,896

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	585,438	2,331,580,054,368	0	10,972,018,000	326	0	585,112	2,342,552,072,368
20101	TANAH PERSIL	585,268	2,330,462,866,368	0	10,972,018,000	326	0	584,942	2,341,434,884,368
20103	LAPANGAN	170	1,117,188,000	0	0	0	0	170	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	79,853	775,565,277,904	13,439	73,368,942,171	5,850	53,429,585,570	87,442	795,504,634,505
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	240	38,966,892,551	12	2,047,377,093	6	1,218,777,400	246	39,795,492,244
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	211	42,637,868,720	20	10,652,155,590	14	4,675,180,148	217	48,614,844,162
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	126	263,216,795	10	9,035,056	13	17,237,920	123	255,013,931
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	39	6,069,027,020	4	3,204,950	1	12,650,000	42	6,059,581,970
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	60	143,468,762	6	8,209,005	2	1,900,000	64	149,777,767
30303	ALAT UKUR	19	115,773,350	0	0	0	0	19	115,773,350
30401	ALAT PENGOLAHAN	7	49,597,200	0	0	0	0	7	49,597,200
30501	ALAT KANTOR	9,943	82,961,809,762	1,247	2,109,093,425	449	2,652,262,747	10,741	82,418,640,440
30502	ALAT RUMAH TANGGA	45,420	153,920,233,943	8,359	11,619,521,799	3,455	5,841,540,868	50,324	159,698,214,874
30601	ALAT STUDIO	1,702	40,610,524,648	300	7,014,024,032	148	3,601,612,924	1,854	44,022,935,756
30602	ALAT KOMUNIKASI	936	5,037,235,968	169	127,146,845	181	307,358,891	924	4,857,023,922
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	1,905,464,793	2	1,579,752	0	0	15	1,907,044,545
30701	ALAT KEDOKTERAN	392	904,270,524	17	197,290,210	6	47,356,500	403	1,054,204,234
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	19	122,174,025	2	22,333,200	0	0	21	144,507,225
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	95	5,260,036,817	3	2,831,040	7	1,074,328,682	91	4,188,539,175
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	1	3,245,000	16	84,425,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	33	7,084,000	0	0	0	0	33	7,084,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	2	68,961,668	2	68,961,668	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	9,927	146,175,869,826	1,152	20,328,224,194	897	12,809,038,161	10,182	153,695,055,859
31002	PERALATAN KOMPUTER	10,540	248,013,565,600	1,920	19,112,655,212	666	21,024,938,661	11,794	246,101,282,151
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	64,269,000	0	0	0	0	6	64,269,000
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	200	39,560,400	0	0	200	39,560,400
31503	ALAT SAR	51	1,799,148,100	0	0	2	73,196,000	49	1,725,952,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	4,221,000	0	0	0	0	9	4,221,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	30	157,150,900	14	5,738,700	0	0	44	162,889,600
31901	PERALATAN OLAH RAGA	18	288,704,600	0	0	0	0	18	288,704,600
133111	Gedung dan Bangunan	491	896,219,142,078	61	161,638,929,625	49	133,758,697,227	503	924,099,374,476
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	175	775,757,761,074	20	158,250,712,170	8	130,394,907,927	187	803,613,565,317
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	283	104,910,773,764	39	3,232,096,000	40	3,307,552,000	282	104,835,317,764
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	2	27,039,600	1	13,519,800	6	64,938,800

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,499,188,240	0	129,081,855	0	42,717,500	28	15,585,552,595
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	0	0	0	0	58,771	16,468,966,800
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	0	0	0	0	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	26	2,934,621,163	0	0	0	0	26	2,934,621,163
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	394,889,000	0	0	0	0	3	394,889,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	31	5,233,986,977	1	396,760,798	6	50,160,000	26	5,580,587,775
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	6	917,573,820	0	0	0	0	6	917,573,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	1	396,760,798	6	50,160,000	11	2,375,329,165
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	27	12,089,820,513	1	1,218,750,000	1	432,377,317	27	12,876,193,196
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25	12,005,583,613	1	1,218,750,000	1	432,377,317	25	12,791,956,296
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	0	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	10,148	1,621,608,403	12	6,341,000	3,997	269,042,392	6,163	1,358,907,011
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	9,418	796,179,803	0	0	3,997	269,042,392	5,421	527,137,411
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	203	650,140,000	12	6,341,000	0	0	215	656,481,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	33,000,000	0	0	0	0	1	33,000,000
60501	TANAMAN	496	36,069,500	0	0	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	745	18,651,895,041	7,953	36,910,136,011	5,138	41,659,067,250	3,560	13,902,963,802
30103	ALAT BANTU	6	285,067,670	3	151,984,800	6	285,067,670	3	151,984,800
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	197,800,000	9	2,328,329,558	8	2,407,665,000	2	118,464,558
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	2,827,000	13	17,237,920	15	20,064,920	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	1	12,650,000	0	0	1	12,650,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	2	1,900,000	2	1,900,000	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:09 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30303	ALAT UKUR	1	862,400	0	0	0	0	1	862,400
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	48	331,403,135	412	2,338,554,910	346	1,993,776,549	114	676,181,496
30502	ALAT RUMAH TANGGA	406	1,061,851,282	2,313	3,262,492,075	1,716	2,396,829,410	1,003	1,927,513,947
30601	ALAT STUDIO	14	58,268,597	132	1,962,734,299	93	811,988,820	53	1,209,014,076
30602	ALAT KOMUNIKASI	7	465,458,610	178	261,148,891	145	139,578,580	40	587,028,921
30701	ALAT KEDOKTERAN	7	9,689,000	6	47,356,500	7	45,705,000	6	11,340,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	127,632,947	7	1,074,328,682	0	0	8	1,201,961,629
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	1	3,245,000	1	3,245,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	137	1,546,717,403	421	4,346,462,321	236	2,533,495,455	322	3,359,684,269
31002	PERALATAN KOMPUTER	85	13,395,306,997	445	20,424,324,663	418	30,482,449,771	112	3,337,181,889
31503	ALAT SAR	0	0	2	73,196,000	0	0	2	73,196,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	14,190,000	0	0	2	14,190,000	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16	1,071,795,000	5	284,988,000	4	209,532,000	17	1,147,251,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	45,825,000	0	0	0	0	1	45,825,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	6	50,160,000	6	50,160,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1	6,500,000	3,997	269,042,392	2,123	232,719,075	1,875	42,823,317
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	10	30,700,000	0	0	10	30,700,000	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4,060,365,373,247		284,511,877,605		229,598,929,756		4,115,278,321,096

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
 Tanggal : 04/05/26 9:09 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
162151	Software	176	57,301,344,197	2	3,747,160,289	11	5,744,894,400	167	55,303,610,086
80101	ASET TAK BERWUJUD	176	57,301,344,197	2	3,747,160,289	11	5,744,894,400	167	55,303,610,086
162161	Lisensi	1	2,024,640,000	11	9,458,259,613	0	2,299,032,000	12	9,183,867,613
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	2,024,640,000	11	9,458,259,613	0	2,299,032,000	12	9,183,867,613
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	294,045,300	0	0	0	0	2	294,045,300
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	294,045,300	0	0	0	0	2	294,045,300
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	7	1,900,098,125	11	5,744,894,400	9	2,900,579,575	9	4,744,412,950
80101	ASET TAK BERWUJUD	7	1,900,098,125	11	5,744,894,400	9	2,900,579,575	9	4,744,412,950
TOTAL			61,520,627,622		18,950,314,302		10,944,505,975		69,526,435,949

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:10 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162121	Hak Cipta	1	500,000	(71,421)	(7,142)	(78,563)	421,437
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	(71,421)	(7,142)	(78,563)	421,437
162151	Software	167	55,303,610,086	(49,867,559,538)	2,097,378,593	(47,770,180,945)	7,533,429,141
80101	ASET TAK BERWUJUD	167	55,303,610,086	(49,867,559,538)	2,097,378,593	(47,770,180,945)	7,533,429,141
162161	Lisensi	12	9,183,867,613	(101,232,000)	(573,197,780)	(674,429,780)	8,509,437,833
80101	ASET TAK BERWUJUD	12	9,183,867,613	(101,232,000)	(573,197,780)	(674,429,780)	8,509,437,833
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	294,045,300	0	0	0	294,045,300
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	294,045,300	0	0	0	294,045,300
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9	4,744,412,950	(1,900,098,125)	(2,817,075,425)	(4,717,173,550)	27,239,400
80101	ASET TAK BERWUJUD	9	4,744,412,950	(1,900,098,125)	(2,817,075,425)	(4,717,173,550)	27,239,400
JUMLAH		191	69,526,435,949	(51,868,961,084)	(1,292,901,754)	(53,161,862,838)	16,364,573,111

LAMPIRAN IX

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Tanggal : 04/05/26 9:11 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	212,742,278
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	17,308,768
1010301003	Penjepit Kertas	126,385,739
1010301004	Penghapus/Korektor	14,614,755
1010301005	Buku Tulis	44,868,815
1010301006	Ordner Dan Map	769,064,089
1010301007	Penggaris	8,813,205
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	15,419,374
1010301009	Pita Mesin Ketik	9,572,700
1010301010	Alat Perekat	83,914,412
1010301011	Stadler HD	685,155
1010301012	Staples	36,237,238
1010301013	Isi Staples	64,898,021
1010301014	Barang Cetak	309,576,270
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	748,561,417
1010302001	Kertas HVS	325,894,241
1010302002	Berbagai Kertas	76,497,879
1010302003	Kertas Cover	20,844,053
1010302004	Amplop	436,601,196
1010302005	Kop Surat	3,500,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	165,181,730
1010303001	Transparant Sheet	111,150
1010303002	Tinta Cetak	13,855,800
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	197,674,637
1010304002	Computer File/Tempat Disket	397,000
1010304003	Pita Printer	2,604,800
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,334,619,949
1010304005	Disket	1,071,400
1010304006	USB/Flash Disk	59,362,895
1010304007	kartu Memori	59,886,720
1010304010	Mouse	19,505,380
1010304011	CD/DVD	473,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	56,025,870
1010306001	Kabel Listrik	21,959,134
1010306002	Lampu Listrik	133,943,679
1010306003	Stop Kontak	6,611,133
1010306004	Saklar	429,860
1010306005	Stacker	2,624,409
1010306007	Starter	1,778,700
1010306008	Vitting	12,654,404
1010306010	Batu Baterai	56,981,085
1010306999	Alat Listrik Lainnya	19,732,811
1010309001	Meterai	7,543,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	10,419,500

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Tanggal : 04/05/26 9:11 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	8,156,365
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	626,000
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	121,020,601
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	5,650,750
1010313001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	41,745,985
1010313002	Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)	2,131,800
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	75,351,939
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	422,352,990
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	233,433
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	2,923,656
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	36,781,321
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	46,015,471
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34,578,008
Jumlah Barang Konsumsi		6,309,140,970
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	44,924,253
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	61,313,171
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	13,025,744
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	59,039,785
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	70,674,908
1010305006	Alat Pengikat	3,822,865
1010305007	Peralatan Ledeng	4,255,074
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	161,898,952
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	1,203,000
1010305012	Pengharum Ruangan	56,103,198
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	158,277,066
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		634,538,016
TOTAL		6,943,678,986

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 101,802,160 dalam kondisi usang.

**LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:10 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sedia_mutasi_kl_poc

Kode	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		NILAI
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	6,036,557,346	14,382,945,652	14,110,362,028	6,309,140,970
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	307,208,230	1,066,214,382	738,884,596	634,538,016
117114	Suku Cadang	0	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan	0	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	11,376,900	11,376,900	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0	0	0
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	2,357,007	2,357,007	0
JUMLAH		6,343,765,576	15,462,893,941	14,862,980,531	6,943,678,986

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tanggal : 04/05/26 9:11 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_kl_poc

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	6,309,140,970
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	634,538,016
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0
117199	Persediaan Lainnya	0
JUMLAH		6,943,678,986

LAMPIRAN X

Telaah Laporan Keuangan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
TAHUN ANGGARAN 2025 (Audited)

Kode dan Nama K/L : (088) Badan Kepegawaian Negara

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA Neraca LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Semua face laporan (LRA LO LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama apabila ada yang tidak sama uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit) LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi <i>(dalam hal masih terdapat anomali)</i>	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar (TK) Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di <i>Settle</i> Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a Pagu/DIPA		√	Tidak
	b Estimasi PNB		√	Tidak
	c Belanja		√	Tidak
	d Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e Pendapatan		√	Tidak
	f Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g Kas BLU		√	Tidak
	h Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i Kas Hibah		√	Tidak
	j Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	√		Tidak
Daftar MONSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (<i>Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister</i>)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (<i>selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada</i>)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1xxxx bersaldo (D) (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu</i>)	√		Ya

7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41xxxx / 43xxxx (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan Pita Cukai Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)		√	Ada/Tidak
	<i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa? <i>Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak

2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211 Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133 Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211	-	-	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√		Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? <i>Jika ada konfirmasi kebenarannya Jelaskan dalam Calk</i>	-	-	Ya/Tidak
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20xx di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya

6	Dari kolom perbandingan adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx) beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx) beban subsidi (55xxxx) beban hibah (56xxxx) dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset" Bila ada cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? <i>Akun ini hanya khusus dari IP</i>		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	<i>Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000 transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST</i>			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111 313121 313211 313221 391131 391132 391133 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA" sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak

	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512x pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	<i>Jika Ada apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?</i>	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 526xxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 57xxxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411x) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121xx) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx 111826 1133xx 165111 dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA** serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

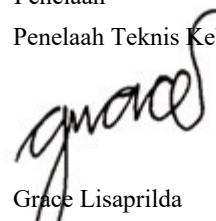
- 1 Terdapat ketidaksesuaian akun VS Kode Barang Aset Tetap dikarenakan adanya:
 - Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel (521253) yang direalisasikan menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) senilai Rp13.519.800,00 pada Kantor Pusat BKN
 - Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel (521253) yang direalisasikan menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) senilai Rp19.988.700,00 pada Kantor Regional IV BKN Makassar
 - Aset Tetap Lainnya yang direalisasikan menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) senilai Rp4.361.000,00 pada Kantor Regional V BKN Jakarta
- 2 Terdapat selisih pada rekon internal yang merupakan saldo piutang lainnya yang dicatat melalui mekanisme perekaman jurnal manual, tidak melalui pencatatan pada Modul Piutang.

Mengetahui,
Penyusun LKKL
Pranata Keuangan APBN Penyelia



Eka Desi Lestari
NIP. 198812022010122001

Jakarta, 5 Mei 2026
Penelaah
Penelaah Teknis Kebijakan



Grace Lisapilda
NIP 199804072019122001

LAMPIRAN XI

**Monitoring Tindak Lanjut Terhadap
Temuan Pemeriksaan BPK**

Matriks Tindak Lanjut
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanjnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Akai
1	2022	43/LHP/XVI/05/2022 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	BPK merekomendasikan Plt. Kepala BKN agar menginstruksikan KPA pada Biro Umum Kantor Pusat BKN dan Kanreg II BKN Surabaya untuk: a. Menindaklanjuti permintaan dari pihak ketiga untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah yang telah dilunasi. b. Melakukan penertiban atas tanah milik BKN yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga.	Semester II 2022; - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester II 2023; - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Pemecahan sertifikat [belum]	Belum Sesuai	Semester II 2023: belum ada pengosongan lahan/ pembongkaran bangunan yang ada di tanah BKN yang dipakai warga Semester II 2025: Belum sesuai rekomendasi karena belum ada bukti telah dilakukan pemecahan sertifikat tanah	Melakukan pemecahan sertifikat.
					Semester II 2022; - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester I 2023; - Surat ke Warga untuk merenovasi Pagar Rumah; Semester II 2023; - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Penertiban lahan [belum]	Belum Sesuai	Semester II 2023: Belum sesuai Rekomendasi dengan alasan: belum ada pemecahan sertifikat, yang disampaikan baru berupa surat Semester II 2025: Belum sesuai rekomendasi karena belum ada bukti telah dilakukan penertiban	Melakukan penertiban.
3	2023	115/LHP/XVI/05/2023 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2022	Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Semester I 2023; - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Semester I 2024; - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Penyesuaian Peraturan akan Dilakukan Ketika PP Gaji dan Tunjangan Berlaku Semester I 2025; - Keputusan Kepala BKN No. 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai BKN - Peraturan pemberian dan pembayaran tukin [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Belum ada peraturan untuk selaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin masih menunggu pemberlakuan PP Gaji dan Tunjangan. Semester II 2025: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Badan Kepegawaian Negara belum selaras dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS karena Peraturan BKN tersebut tidak mengatur pemotongan tukin terhadap pegawai yang terkena hukuman disiplin.	Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
4	2025	48.a/LHP/XVI/05/2025 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2024	1. Metode Blended Learning pada Jasa Pelatihan oleh Pusbangop ASN Belum Diatur dalam Tarif PNBPN	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar memerintahkan Kepala Pusbangop ASN untuk memproses pengusulan tarif PNBPN pelayanan jasa pelatihan dengan metode blended learning sesuai ketentuan.	Semester II 2025 - Surat Kepala BKN kepada Kepala Pusbangop ASN - Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Kepala Sekretaris Utama Terkaji, Respon Usulan Penambahan Tarif PNBPN untuk Pelatihan Metode Blended Learning No. 355/KA.02/ND/IB.IV/2025 tanggal 9 Oktober 2025	Sesuai		
					2. Ketidambatan Penyetoran PNBPN Kategori Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi ke Kas Negara dan Batas Waktu Pembayaran PNBPN Belum Ditetapkan pada PPSS dan Puspenkom	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan kepada: a. Bendahara Penerimaan Kantor Pusat BKN supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas penyetoran dana dari pembayaran PNBPN sesuai ketentuan. b. Kepala Biro Keuangan, Kepala PPSS, dan Kepala Puspenkom supaya menyusun kebijakan terkait batas waktu pembayaran PNBPN kategori Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yang ditetapkan oleh Kepala BKN.	Semester II 2025 - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama kepada Bendahara Penerimaan Kantor Pusat BKN, Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen, dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN - Kebijakan terkait batas waktu pembayaran PNBPN kategori Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang ditetapkan oleh Kepala BKN [Belum]	Sesuai
6					Semester II 2025 - Surat Sekretaris Utama kepada Bendahara Penerimaan Kantor Pusat BKN, Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen, dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN - Kebijakan terkait batas waktu pembayaran PNBPN kategori Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang ditetapkan oleh Kepala BKN [Belum]	Belum Sesuai	Semester II 2025: Belum ada kebijakan terkait dengan batas waktu pembayaran PNBPN kategori Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang ditetapkan oleh Kepala BKN	
7			3. Anggaran Belanja atas Tiga Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kanreg IV BKN Makassar Direalisasikan Sebagai Belanja Modal	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan Kepala Kanreg IV BKN Makassar supaya PPK lebih cermat dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasinya.	Semester II 2025; - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama BKN kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar - Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar kepada PPK Kantor Regional IV BKN Makassar	Sesuai		

				<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan PPK Kanreg IV BKN Makassar akan cemat dalam melaksanakan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasinya - Surat Pernyataan PPK Kanreg IV BKN Makassar akan cemat dalam melaksanakan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasinya 			
8	4. Penganggaran Sewa Sarana, Pendukung dan Perhitungan, Honorarium Kegiatan Seleksi CASN Tahun 2024 Kurang Memadai, serta Terdapat Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan Sewa Tenda dan AC Standing.	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan:</p> <p>a. PPK BA-BUN supaya melakukan pengajuan anggaran kegiatan seleksi CASN secara memadai, dan lebih cemat dalam menghitung nilai konversi atau pengantilan sesuai bukti ril, serta pembayaran kontrak supaya memperhitungkan selisih antara nilai konversi dengan nilai kekurangan volume pekerjaan.</p>	<p>Semester II 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama BKN kepada Kepala Pusat Peningkatan Sistem Rekrutmen, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, dan PPK BA-BUN 	Sesuai			
9		<p>b. Kepala Kanreg VI BKN Medan, Kepala Kanreg VII BKN Palembang, dan Kepala Kanreg IX BKN Jayapura supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pengawasan dalam pembayaran honorarium panitia seleksi CASN. 2) Menginstruksikan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lebih cemat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terkait dengan penentuan rasio perbandingan pembayaran honorarium panitia kegiatan SKB CPNS dan SKD CPPPK sesuai ketentuan. 	<p>Semester II 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Sekretaris Utama BKN kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura - Surat Perintah Kepala Kantor Regional VI BKN Medan kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran - Surat Pernyataan PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran Kantor Regional VI BKN Medan - Surat Penyampalan TL oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ke Inspektoral - Surat Perintah Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional VII BKN Palembang - Surat Pernyataan PPSPM Kantor Regional VII BKN Palembang - Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Kantor Regional VII BKN Palembang - Surat Perintah Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada PPK - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional IX BKN Jayapura - Surat Pernyataan PPSPM Kantor Regional IX BKN Jayapura - Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Kantor Regional IX BKN Jayapura - Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kantor Regional IX BKN Jayapura 	Sesuai			
10	5. Pengendalian Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu, Kepegawaian dan Pengembalian Beasiswa pada Pusbangpeg ASN Belum Memadai.	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan Kepala Pusbangpeg ASN supaya:</p> <p>a. Menyusun laporan monitoring terkait jumlah penerimaan mahasiswa dan jumlah kelulusan mahasiswa secara mutakhir dan lengkap.</p>	<p>Semester II 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Laporan monitoring terkait jumlah penerimaan mahasiswa dan jumlah kelulusan mahasiswa 	Sesuai			
11		<p>b. Berkoordinasi dengan instansi asal mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban dari tujuh mahasiswa program PIK.</p>	<p>Semester II 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat koordinasi dengan instansi asal mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban dari tujuh mahasiswa program PIK - Bukti penyelesaian tunggakan berupa koordinasi dengan instansi asal mahasiswa (7 Mahasiswa) (Belum) 	Belum Sesuai	<p>Semester II 2025:</p> <p>Perlu bukti penyelesaian tunggakan berupa koordinasi (Zoom/Beremu Langsung) dengan entitas terkait (Tidak harus sampai output berupa penyelesaian, BPK hanya meminta bukti koordinasi)</p>		
12	6. Kekurangan Volume Belanja Barang atas Delapan Pekerjaan Sewa Sarana dan Prasarana Non TI serta Perbaikan Panel Lampu.	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan kepada:</p> <p>a. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg IX BKN Jayapura dan Biro Umum pada Kantor Pusat BKN supaya memerintahkan masing-masing PPK lebih cemat dalam menghitung realisasi volume terpasang dan membayar sesuai prestasi pekerjaan.</p>	<p>Semester II 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Kantor Regional IX BKN Jayapura, dan Biro Umum pada Kantor Pusat BKN - Surat Kepala Biro Umum pada Kantor Pusat BKN kepada PPK Biro Umum pada Kantor Pusat BKN - Surat Pernyataan PPK Biro Umum - Kanrea II BKN Surabaya - Surat Tindak Lanjut Perintah Sekretaris Utama 	Sesuai			
			<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional II BKN Surabaya - Surat Perintah Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional IX BKN Jayapura 				
13		<p>b. Kepala Kanreg IX BKN Jayapura memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyertakan ke Kas Negara sebesar Rp22.469.600</p>	<p>Semester II 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura - Bukti setor ke Kas Negara sebesar Rp22.469.600 Validasi Inspektoral - Bukti setor ke Kas Negara sebesar Rp22.469.600 	Sesuai			

14		7. Kekurangan Volume Belanja Modal atas Tiga Pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan.	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan kepada: a. Kepala Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg IX BKN Jayapura supaya memerintahkan PPK lebih cermat dalam menghitung realisasi volume terpasang dan membayar sesuai prestasi pekerjaan.	Semester II 2025 - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya dan Kantor Regional IX BKN Jayapura - Kanreg II BKN Surabaya - Surat Tindak Lanjut Perintah Sekretaris Utama - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional II BKN Surabaya - Surat Perintah Kakanreg IX Jayapura kepada PPK - Surat Pernyataan PPK Kantor Regional IX BKN Jayapura	Sesuai		
15			b. Kepala Kanreg IX BKN Jayapura lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan serta memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp196.317.114.	Semester II 2025 - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura - Setoran Jayapura Nomor NTPN 65DC06U8F8CRV8HD Tanggal 14 November 2025 Rp. 2.000.000,00 - Setoran Jayapura Nomor NTPN 65DC06U8F8CRV8HD Tanggal 14 November 2025 Rp. 2.000.000,00 Validasi Inspektoral - Setoran Jayapura Nomor NTPN 6A2CF2G503GUT6GU Tanggal 15 November 2025 Rp. 10.000.000,00 - Setoran Jayapura Nomor NTPN 6A2CF2G503GUT6GU Tanggal 15 November 2025 Rp. 10.000.000,00 Validasi Inspektoral - Setoran Jayapura Nomor NTPN 52A077QLV326PSPI tanggal 15 Desember 2025 Rp. 10.000.000 - Bukti setor ke Kas Negara sebesar dengan total Rp196,317,114 (belum)	Belum Sesuai	Semester II 2025: Belum sesuai rekomendasi karena Kanreg IX BKN Jayapura baru melakukan setoran ke Kas Negara pada tanggal 17 November 2025 sebesar Rp12.000.000,- sesuai NTPN Nomor 65DC06U8F8CRV8HD dan Nomor 6A2CF2G503GUT6GU. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebesar Rp184.317.114,-	
16		8. Penatausahaan Persediaan pada Kanreg II BKN Surabaya dan Kantor Pusat BKN Kurang Tertib.	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk menginstruksikan kepada: a. Kepala Biro Umum supaya menyusun Standar Operasional Prosedur terkait Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagai pedoman pelaksanaan stock opname yang ditetapkan oleh Kepala BKN.	Semester II 2025 - Surat Kepala BKN kepada Sekretaris Utama BKN - Standar Operasional Prosedur terkait Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagai pedoman pelaksanaan stock opname yang ditetapkan oleh Kepala BKN. (belum)	Belum Sesuai	Semester II 2025: Belum sesuai rekomendasi karena Bukti yang disampaikan baru berupa surat perintah dari Kepala BKN ke Sekretaris Utama dan Surat dari Sekretaris Utama ke Kepala Biro Umum untuk membuat SOP sebagai pedoman pelaksanaan stok opname persediaan. Yang harus dilakukan: Menyusun SOP sebagai pedoman pelaksanaan stok opname persediaan.	
17			b. Kepala Kanreg II BKN Surabaya supaya membuat kartu kendali persediaan dan menyajikan saldo persediaan sesuai dengan hasil stock opname	Semester II 2025 - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya - Kartu Stock Persediaan - Saldo persediaan di neraca LK Sm I TA 2025 dan Hasil Stock Opname s.d. Sm I TA 2025	Sesuai		
18			c. Kepala Biro Umum pada Kantor Pusat BKN supaya menyelenggarakan stock opname secara tertib sesuai ketentuan dan menyajikan saldo persediaan sesuai dengan hasil stock opname.	Semester II 2025 - Surat Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Umum - BA Stock Opname s.d SM I TA 2025 dan saldo persediaan di neraca LK SM I TA 2025	Pengajuan Sesuai	Semester II 2025: Perlu bukti tambahan berupa penyajian kesesuaian antara saldo persediaan dengan hasil stock opname. Dapat menunjukkan untuk periode Semester I TA 2025. BA stock opname manual (seperti surabaya) >> (Belum Dikirim karena SIPTL sedang Error)	

Informasi:
 Sesuai 7
 Belum Sesuai 7
 Pengajuan Sesuai 1
 Belum diTL 0
 Tidak Dapat Ditindaklanjuti 0
 15



LAMPIRAN XII
NOTA KESEPAKATAN FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA088) TAHUN 2025

Nomor: NKF-101/088/PB.06/2026

Pada hari **Rabu, 06 Mei 2026**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2025 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2026.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	ASRI DYAH PRABAWATI, SE, M.Ak, KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA – selaku Penyusun LKKL
2	Darnadi, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Joko Supriyanto, Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi S.E., M.M., CSFA, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D.1	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L



**KERTAS KERJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BA : 088

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	58,905,511,816	0	58,905,511,816
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0
Pendapatan BLU	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	58,905,511,816	0	58,905,511,816
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	58,905,511,816	0	58,905,511,816
Belanja Negara	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	842,439,882,646	0	842,439,882,646
Belanja Pegawai	403,269,562,410	0	403,269,562,410
Belanja Barang	368,152,635,246	0	368,152,635,246
Belanja Modal	71,017,684,990	0	71,017,684,990
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0
Dana Transfer Umum	0	0	0
Dana Bagi Hasil	0	0	0
Dana Alokasi Umum	0	0	0
Dana Transfer Khusus	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	0	0
Dana Keistimewaan DIY	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Desa	0	0	0
Hibah Kepada Daerah	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	842,439,882,646	0	842,439,882,646
PEMBIAYAAN	0	0	0

**KERTAS KERJA LAPORAN OPERASIONAL (LO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BA : 088

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	50,692,646,717	2091265	50,694,737,982
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	50,692,646,717	2091265	50,694,737,982
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	50,692,646,717	2091265	50,694,737,982
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	403,051,973,406	-66153034	402,985,820,372
Beban Persediaan	3,645,955,971	-11914127	3,634,041,844
Beban Barang dan Jasa	293,538,572,581	-427645764	293,110,926,817
Beban Pemeliharaan	22,188,165,755	-810708317	21,377,457,438
Beban Perjalanan Dinas	68,491,167,564	0	68,491,167,564
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,123,501,618	39076845	106,162,578,463
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-26,263,830	2910137	-23,353,693
Beban Transfer	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	897,013,073,065	-1274434260	895,738,638,805
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-846,320,426,348	1276525525	-845,043,900,823
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-258,696,790	0	-258,696,790
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	625,315,800	0	625,315,800
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	884,012,590	0	884,012,590
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,839,547	0	2,839,547
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	98,688,023	0	98,688,023
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95,848,476	0	95,848,476
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-255,857,243	0	-255,857,243

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-846,576,283,591	1276525525	-845,299,758,066
POS LUAR BIASA	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	-846,576,283,591	1276525525	-845,299,758,066

**KERTAS KERJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BA : 088

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
EKUITAS AWAL	3,307,045,055,413	0	3,307,045,055,413
SURPLUS/DEFISIT-LO	-846,576,283,591	1276525525	-845,299,758,066
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	11,957,800,414	0	11,957,800,414
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	11,952,449,594	0	11,952,449,594
LAIN-LAIN	5,350,820	0	5,350,820
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	783,923,413,062	0	783,923,413,062
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	-50,695,070,115	1276525525	-49,418,544,590
EKUITAS AKHIR	3,256,349,985,298	1276525525	3,257,626,510,823

**KERTAS KERJA NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BA : 088

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
ASET	0	0	0
ASET LANCAR	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	0	0	0
Kas pada BLU	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	12,877,987,563	0	12,877,987,563
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0
Piutang Perpajakan	0	0	0
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	981,034,086	582,027,329	1,563,061,415
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-4,905,170	-2,910,137	-7,815,307
Bagian Lancar TPA	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	0	0	0
Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0	0
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Persediaan	6,931,635,574	12,043,412	6,943,678,986
Persediaan yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	20,785,752,053	591,160,604	21,376,912,657
ASET TETAP	0	0	0
Tanah	2,342,552,072,368	0	2,342,552,072,368
Peralatan dan Mesin	786,383,438,873	-5,143,894,180	781,239,544,693
Gedung dan Bangunan	923,403,422,442	638,112,234	924,041,534,676
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24,984,175,738	0	24,984,175,738
Aset Tetap Lainnya	14,199,030,707	0	14,199,030,707
Konstruksi Dalam Pengerjaan	415,613,806	0	415,613,806
Akumulasi Penyusutan	-870,856,521,697	5,133,489,218	-865,723,032,479
Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0	0
Akumulasi Peyusutan Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	3,221,081,232,237	627,707,272	3,221,708,939,509
PROPERTI INVESTASI	0	0	0
Properti Investasi	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0	0
Jumlah Properti Investasi	0	0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	0	0	0
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	0	0	0
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	0	0	0

Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0	0
ASET LAINNYA	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	68,598,120,949	-3,816,097,950	64,782,022,999
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	1,126,679,784	0	1,126,679,784
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	0	0	0
Dana Penjaminan	0	0	0
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	0	0	0
Dana Kelolaan BLU	0	0	0
Aset Lain-lain	9,560,437,430	9,045,070,397	18,605,507,827
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	0	0	0
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-60,983,293,616	-5,172,566,063	-66,155,859,679
Jumlah Aset Lainnya	18,301,944,547	56,406,384	18,358,350,931
JUMLAH ASET	3,260,168,928,837	1,275,274,260	3,261,444,203,097
KEWAJIBAN	0	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	2,719,204,936	840,000	2,720,044,936
Utang Kepada Pihak Ketiga II	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	1,099,738,603	-2,091,265	1,097,647,338
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3,818,943,539	-1,251,265	3,817,692,274
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	0	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	0	0
Kewajiban Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	3,818,943,539	-1,251,265	3,817,692,274
EKUITAS	3,256,349,985,298	1,276,525,525	3,257,626,510,823
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,260,168,928,837	1,275,274,260	3,261,444,203,097

**Usulan Jurnal Koreksi
LK BKN TA 2025**

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian
1	017220	Kantor Pusat BKN	593111	Belanja Persediaan konsumsi	1.212.120,00		Modul Persediaan	1 Koreksi pencatatan hasil cek fisik terhadap persediaan obat (Tip Scaler G1) yang seharusnya sudah tidak tercatat di Neraca
			117111	Barang Konsumsi		1.212.120,00		
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	3.816.097.950,00		Modul Aset	2 Koreksi pencatatan Aset tidak berwujud berupa aplikasi yang sudah tidak digunakan untuk operasional ke Aset Lain-Lain
			162151	Software		3.816.097.950,00		
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	3.761.619.150,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3.761.619.150,00		
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	27.239.400,00			
			592115	Beban Amortisasi Software		27.239.400,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.761.619.150,00			
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan		3.761.619.150,00		
			592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	27.239.400,00			
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan		27.239.400,00		
			115212	Piutang Lainnya	21.600,000		Modul GLP	3 Koreksi pengembalian belanja barang atas kelebihan pembayaran Belanja Jasa Lainnya pada kegiatan Rakornas BKN
			522191	Beban Jasa Lainnya		21.600.000,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	108.000,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		108.000,00		
			115212	Piutang Lainnya	406.045.764,00		Modul GLP	4 Koreksi pengembalian belanja barang atas kelebihan pembayaran pekerjaan sewa tenda dan AC Standing (BA BUN)
			522191	Beban Jasa Lainnya		406.045.764,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	2.030.229,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		2.030.229,00		
			115212	Piutang Lainnya	2.660.000,00		Modul GLP	5 Koreksi pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai yang Menjalani Cuti Besar melewati TA 2025
			511123	Beban Tunjangan Struktural PNS		2.660.000,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	13.300,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		13.300,00		
			115212	Piutang Lainnya	8.032.000,00			
			511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS		8.032.000,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	40.160,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		40.160,00		

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian
	017220	Kantor Pusat BKN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.577.321.181,00		Modul Aset	6 Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum Dilakukan reklas ke Aset Lain-lain
			132111	Peralatan dan Mesin		2.577.321.181,00		
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.577.321.181,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.577.321.181,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.577.321.181,00			
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		2.577.321.181,00		
			115212	Piutang Lainnya	1.997.550,00		Modul GLP	7 Koreksi pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran Uang Makan Pegawai
			511129	Beban Uang Makan PNS		1.997.550,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	9.988,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		9.988,00		
			511129	Beban Uang Makan PNS	688.000,00		Modul GLP	8 Koreksi penyesuaian atas kekurangan pembayaran uang makan periode Jan-Des 2025 untuk 13 orang pegawai
			212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		688.000,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.156.518,00		Modul Aset	9 Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan renovasi ruang data
			133111	Gedung dan Bangunan		1.156.518,00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.895,00			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		26.895,00		
			115212	Piutang Lainnya	1.156.518,00		Modul GLP	Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan renovasi ruang data
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.156.518,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	5.782,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		5.782,00		
			115212	Piutang Lainnya	43.489.805,00		Modul GLP	10 Koreksi penyesuaian nilai piutang atas pengembalian tunjangan kinerja PNS & PPPK
			512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		43.489.805,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	217.449,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		217.449,00		
			115212	Piutang Lainnya	1.502.529,00			
			512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK		1.502.529,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	7.513,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		7.513,00		

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian	
2	017241	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	2.091.265,00		Modul GLP	11 Koreksi penyesuaian atas kelebihan pencatatan pendapatan sewa diterima dimuka yang dibayarkan setahun namun terhitung untuk pembayaran selama 3 tahun masa sewa	
			425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan		2.091.265,00			
			117111	Barang Konsumsi	13.126.247,00		Modul Persediaan		12 Koreksi pencatatan persediaan ATK (koreksi lebih dan kurang catat) dari 7 jenis barang
			593111	Beban Persediaan Konsumsi		13.126.247,00			
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan	129.285,00				
			593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		129.285,00			
3	560635	Kantor Regional IV BKN Makassar	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	75.456.000,00		Modul Aset	13 Koreksi pencatatan Aset Tetap - GB berupa Rumah Negara Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain	
			133111	Gedung dan Bangunan		75.456.000,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.779.168,00				
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		22.779.168,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.423.698,00				
			591211	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.423.698,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22.779.168,00				
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	22.779.168,00				
			592222	Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.423.698,00				
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.423.698,00				
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	692.469.880,00		Modul Aset		14 Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain
			132111	Peralatan dan Mesin		692.469.880,00			
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	685.866.767,00				
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		685.866.767,00			
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.603.113,00	0,00			
			591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin		6.603.113,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	685.866.767,00				
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	685.866.767,00				
			592222	Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6.603.113,00	0,00			
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.603.113,00				

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian	
	560635	Kantor Regional IV BKN Makassar	133111	Gedung dan Bangunan	142.473.717,00		Modul Aset	15 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Kabel Power Kantor yang menambah kapasitas dan melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		142.473.717,00			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.456.443,00				
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.456.443,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	142.473.717,00		Modul GLP	16	Koreksi pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran Uang Makan Pegawai
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		142.473.717,00			
			115212	Piutang Lainnya	8.702.350,00		Modul GLP	16	Koreksi pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran Uang Makan Pegawai
			511129	Beban Uang Makan PNS		8.702.350,00			
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	43.512,00				
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		43.512,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	20.350.733,00		Modul Aset	17	Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan Pemasangan Kabel Feeder
			132111	Peralatan dan Mesin		20.350.733,00			
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.035.074,00				
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		2.035.074,00			
			115212	Piutang Lainnya	20.350.733,00		Modul GLP	17	Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan Pemasangan Kabel Feeder
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		20.350.733,00			
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	101.753,00							
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		101.753,00						
511129	Beban Uang Makan PNS	152.000,00		Modul GLP	18	Koreksi penyesuaian atas kekurangan pembayaran uang makan periode Des 2025 untuk 3 orang pegawai			
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		152.000,00						
4	606254	Kantor Regional V BKN Jakarta	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	943.350.083,00		Modul Aset	19 Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain	
		132111	Peralatan dan Mesin		943.350.083,00				
		137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	941.230.083,00					
		391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		941.230.083,00				
		137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	886.000,00					
		591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin		886.000,00				
		391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	941.230.083,00					
		169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		941.230.083,00				

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian
	606254	Kantor Regional V BKN Jakarta	592222	Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	886.000,00		Modul Aset	Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		886.000,00		
5	606261	Kantor Regional VI BKN Medan	132111	Peralatan dan Mesin	29.973.000,00		Modul Aset	20 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Komputer berupa penambahan RAM dan peningkatan kapasitas harddisk yang menambah masa manfaat dan melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		29.973.000,00		
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.973.000,00			
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		29.973.000,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	29.973.000,00		Modul GLP	
			523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		29.973.000,00		
			133111	Gedung dan Bangunan	155.447.000,00		Modul Aset	21 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Renovasi Partisi Ruang Subag Umum Lantai I, Renovasi Partisi Ruang Record Center Lantai 2, Renovasi Ruang Podcast Lantai 2 dan Renovasi PTSP Lobby Lantai I yang melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		155.447.000,00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.826.309,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.826.309,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	155.447.000,00		Modul GLP	
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		155.447.000,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7.477.984,00		Modul Aset	22 Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan renovasi Toilet
			133111	Gedung dan Bangunan		7.477.984,00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	135.964,00			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		135.964,00		
			115212	Piutang Lainnya	7.477.984,00		Modul GLP	Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan pekerjaan renovasi Toilet
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		7.477.984,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	37.390,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		37.390,00		
6	622386	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	940.375.303,00		Modul Aset	23 Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain
			132111	Peralatan dan Mesin		940.375.303,00		
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	934.496.428,00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		934.496.428,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	934.496.428,00			
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		934.496.428,00		

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian
	622386	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.959.625,00		Modul Aset	Koreksi pencatatan Aset Tetap - PM dalam Kondisi Rusak Berat Belum dilakukan reklas ke Aset Lain-lain
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.959.625,00		
			592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.959.625,00			
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		1.959.625,00		
			133111	Gedung dan Bangunan	199.645.000,00		Modul Aset	24 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Halaman Parkir yang melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		199.645.000,00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.565.089,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		3.565.089,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	199.645.000,00		Modul GLP	
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		199.645.000,00		
			133111	Gedung dan Bangunan	34.987.971,00		Modul Aset	25 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Tugu Batas yang melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		34.987.971,00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	538.276,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		538.276,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	34.987.971,00		Modul GLP	
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		34.987.971,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21.138.924,00		Modul Aset	26 Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan Renov Atap dan Lantai
			133111	Gedung dan Bangunan		21.138.924,00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	377.481,00			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		377.481,00		
			115212	Piutang Lainnya	21.138.924,00		Modul GLP	Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan pekerjaan Renov Atap dan Lantai
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		21.138.924,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	105.695,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		105.695,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.864.008,00		Modul Aset	27 Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan pemeliharaan atap selasar
			133111	Gedung dan Bangunan		2.864.008,00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.143,00			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		51.143,00		

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Koreksi Modul	Uraian
	622386	Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru	115212	Piutang Lainnya	2.864.008,00		Modul GLP	Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan pekerjaan pemeliharaan atap selasar
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.864.008,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	14.320,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		14.320,00		
			133111	Gedung dan Bangunan	38.585.000,00		Modul Aset	28 Koreksi pencatatan atas pekerjaan pemeliharaan pos jaga yang melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		38.585.000,00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	593.615,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		593.615,00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	38.585.000,00		Modul GLP	
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		38.585.000,00		
7	667652	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	115212	Piutang Lainnya	608.800,00		Modul GLP	29 Koreksi pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran Uang Makan Pegawai
511129	Beban Uang Makan PNS		608.800,00					
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	3.044,00						
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		3.044,00					
8	020505	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	133111	Gedung dan Bangunan	175.066.980,00		Modul Aset	30 Koreksi pencatatan atas pekerjaan Pemeliharaan Rangka Atap yang melebihi kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		175.066.980,00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.750.670,00			
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.750.670,00		
			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	175.066.980,00		Modul GLP	
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		175.066.980,00		
			115212	Piutang Lainnya	34.400.364,00		Modul GLP	31 Koreksi pengembalian belanja barang atas kelebihan belanja barang pekerjaan rangka atap dan renovasi pagar kanal pre-cast.
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		34.400.364,00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	172.002,00			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		172.002,00		

LAMPIRAN XIII

LAPORAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)



LAPORAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



2025

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Badan Kepegawaian Negara. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.


Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif dengan pengecualian**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

Jakarta, 2 Januari 2025

Ketua Tim Penilai

 Ditandatangani Secara Elektronik
ARIF PRASETYO YUWONO



Tembusan, Yth:
- Sekretaris Utama Selaku Penanggungjawab

Lampiran I
Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Akun Gedung dan Bangunan (133111)

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

Temuan				Rekomendasi
A.	Kelemahan Material			
	-			
B.	Kelemahan Signifikan			
KANTOR PUSAT				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Kegiatan sensus BMN Gedung dan Bangunan belum dilaksanakan secara berkala	Sensus BMN belum dapat dilaksanakan secara berkala dikarenakan terdapat efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lemba ga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025	Terdapat potensi ketidakakuratan antara dokumen sumber dengan kondisi fisik BMN Gedung dan Bangunan	Pengelola BMN agar melakukan sensus BMN Gedung Bangunan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun sesuai PMK Nomor 181 Tahun 2016
KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL II SURABAYA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL III BANDUNG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IV MAKASSAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL V JAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VI MEDAN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL VIII BANJARMASIN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IX JAYAPURA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL X DENPASAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XI MANADO				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIV MANOKWARI				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
PUSAT PENGEMBANGAN ASN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
C.	Kelemahan yang Berdampak Rendah			
KANTOR PUSAT				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1	Terdapat Proses Pengadaan Gedung dan Bangunan yang belum efektif	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum sepenuhnya melampirkan data pembandingan yang lebih lengkap.	Akurasi HPS menjadi kurang andal dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan harga pasar.	Dalam penyusunan HPS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memperluas penggunaan data pembandingan sehingga akurasinya dapat lebih optimal

		<p>Pengawasan dan pemeriksaan teknis atas hasil pekerjaan belum dilakukan secara optimal pada seluruh tahapan disebabkan karena belum ada prosedur pengawasan yang lebih rinci pada seluruh tahapan</p>	<p>Terdapat risiko kegagalan dalam mencapai hasil pekerjaan yang optimal karena kurangnya pengawasan pada setiap tahapan.</p>	<p>PPK dan tim terkait agar meningkatkan pengawasan teknis dan pemeriksaan pekerjaan serta menyusun dan menerapkan prosedur pengawasan yang lebih rinci pada seluruh tahapan.</p>
		<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang teliti dalam menggunakan akun belanja karena belum memahami ketentuan klasifikasi yang berlaku</p>	<p>Ketidaktepatan penggunaan akun belanja.</p>	<p>PPK dan Tim agar meningkatkan kompetensi terkait kodefikasi bagan akun standar sehingga ketelitian dalam penggunaan akun belanja meningkat.</p>

2.	Pemanfaatan serta penggunaan Gedung dan bangunan yang kurang optimal	Pengelola BMN belum melakukan inventarisasi pemanfaatan dan pemantauan kondisi gedung dan bangunan secara rutin karena sumber daya dan sarana pendukung yang terbatas	1. Terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari gedung dan bangunan yang dimanfaatkan.	1. Pengelola BMN agar melakukan inventarisasi aset dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana pendukung yang tersedia secara efektif.
			2. Penggunaan aset kurang sesuai peruntukan berpotensi mempercepat penurunan umur manfaat	2. Pengelola Barang dan Pengguna Barang agar meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan penggunaan barang milik negara serta menegakkan tertib administrasi.

KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA

No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL II SURABAYA

No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL III BANDUNG

No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL IV MAKASSAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL V JAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VI MEDAN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VIII BANJARMASIN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IX JAYAPURA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL X DENPASAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XI MANADO				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIV MANOKWARI				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Tabel E
Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama Entitas Pelaporan : Badan Kepegawaian Negara

Uraian Kelemahan	Pusat	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Makassar	Kanreg V Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Banjarmasin	Kanreg IX Jayapura	Kanreg X Denpasar	Kanreg XI Manado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Banda Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pusbang ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
(1)	(2)																(3)	(4)	(5)	(6)
Terdapat salah satu aktivitas dalam proses pengadaan gedung dan bangunan yang belum tepat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Kegiatan pengadaan gedung dan bangunan masih belum efektif.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Kegiatan atas Pemanfaatan Gedung dan Bangunan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1

Keterangan :

Sesuai dengan perhitungan kertas kerja penyesuaian

Total salah saji teridentifikasi : -

Simpulan PIPK Gabungan : Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIDEP)



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS NOMOR: 056/AI.02/ND/H/2026

Yth. : Kepala Biro Keuangan
Dari : Inspektur
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu PIPK Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 021/AI.02/TU/H/2026 tanggal 8 Januari 2025 tentang melaksanakan tugas Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tahun 2025 sebagaimana **terlampir**.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2025
Inspektur,



Ditandatangani Secara Elektronik
NENY ROCHYANY, S.Si.Apt., M.Si.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**LAPORAN HASIL REVIU
PENGENDALIAN INTERN PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TINGKAT UAPA – BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)**

Nomor : 030/AI.02/LHR/H/2026
Tanggal : 25 Februari 2025

**INSPEKTORAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Reviu PIPK dilaksanakan terhadap Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai Tingkat UAKPA dan UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088), dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai.

1. Dalam pelaksanaannya, Tim Penilai PIPK Badan Kepegawaian Negara (BA 088) telah melaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang ditujukan dengan **kinerja yang memuaskan**, antara lain:
 - a. Tim Penilai telah ditetapkan untuk di tingkat UAKPA dan UAPA;
 - b. Akun signifikan telah ditetapkan dan dituangkan pada Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan dengan diketahui pihak Tim Penilai UAPA dan Manajemen Pemilik Bisnis Proses;
 - c. Dalam penentuan akun signifikan telah menggunakan beberapa pertimbangan yaitu salah satunya adanya temuan berulang dari BPK.
2. Hasil reviu Inspektorat dapat disimpulkan bahwa penyusunan simpulan gabungan PIPK yaitu **Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)**. Terdapat **beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA**, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada proses/transaksi utama (table A) belum semua diidentifikasi pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Adapun proses/transaksi utama yang belum diidentifikasi tersebut, yaitu (1) Pemeliharaan; (2) Penilaian; (3) Pemindahtanganan; (4) Pemusnahan; (5) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - b. Terdapat risiko utama pada proses/transaksi utama yang belum seluruhnya diidentifikasi;
 - c. Terdapat beberapa risiko utama yang memiliki tipe pengendalian aplikasi. Namun seharusnya, tipe pengendalian yang sesuai adalah ITDM (*IT Dependent*)

- Manual*) karena pengendalian utama atas risiko utama bukan dikendalikan oleh aplikasi, melainkan masih dilakukan manual oleh pihak yang ditunjuk sebagai verifikator dengan bantuan aplikasi;
- d. Penilaian pengendalian dinyatakan tidak cukup namun memberikan usulan koreksi/*feedback* atas pengendalian yang sudah ada;
 - e. Tim penilai melakukan penilaian atas risiko utama dan pengendalian yang diidentifikasi oleh pemilik pengendali didapatkan hasil memadai dan disimpulkan tidak cukup dan ada risiko utama yang disajikan ke Tabel A.1. Namun, berdasarkan hasil revidu dokumen atas identifikasi risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Revidu PIPK didapatkan hasil, tidak ada perubahan pengendalian pada Tabel A.1
 - f. Masih terdapat satker yang tidak melampirkan dokumen pendukung baik berupa revidu dokumen, hasil wawancara, survei, maupun observasi atas Pengujian Intern Tingkat Entitas (PITE) pada faktor Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan;
 - g. Pada Pengujian Atribut Pengendalian (C1), Pengujian pengendalian tidak didukung dengan bukti dukung yang relevan untuk kemudian dilakukan pengujian atribut pengendaliannya. Tim Penilai menentukan sampel/dokumen dengan tidak tepat karena sampel/dokumen yang disajikan belum terinci;
 - h. Pada Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2), masih terdapat satker yang melakukan pengujian pengendalian aplikasi yang belum wajar karena aplikasi yang digunakan untuk pengendalian akun signifikan Gedung dan Bangunan (133111) bukan merupakan aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Tabel C.2;
 - i. Pada Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian Pengendalian (D), masih terdapat satker yang melakukan penilaian tanpa didukung hasil pengujian pada Tabel B.1, B.2, dan C.1 yang memadai; dan Penyajian pada Tabel C.1 dan C.2 telah tepat;

3. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan oleh Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dan UAPA Badan Kepegawaian Negara, antara lain sebagai berikut:
- a. Dalam penetapan Tim Penilai agar Tim diambil dari luar manajemen pemilik bisnis proses untuk menghindari terjadinya *Conflict of Interest*;
 - b. Mengidentifikasi seluruh Proses/Transaksi Utama untuk akun signifikan Aset BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Melakukan konfirmasi lebih mendalam kepada pemilik pengendalian terkait identifikasi risiko utama, pada semua proses transaksi utama mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan terkait dengan akun signifikan Gedung dan Bangunan (133111);
 - d. Melakukan penilaian lebih mendalam terkait pengendalian yang sudah dilakukan untuk setiap risiko utama yaitu apakah pengendalian yang sudah ada telah dapat memitigasi risiko utama tersebut;
 - e. Memberikan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya yang dinilai tidak memadai dan dituangkan pada Tabel A1;
 - f. Melakukan pengujian dan Penilaian PITE dan melengkapi seluruh data dukung yang relevan meliputi revidu dokumen, wawancara dan survei;
 - g. Pengujian PUTIK dilaksanakan pada dua area (area akses logical dan area operasional TIK dan kelangsungan layanan) berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 dengan didukung dokumen dan hasil wawancara yang memadai;
 - h. Melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK 17/PMK.09/2019;
 - i. Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai;
 - j. Menyajikan pengujian pengendalian aplikasi dan melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019; dan
 - k. Melakukan penilaian kelemahan gabungan dengan melakukan pengujian dan pengecekan pada tabel D untuk setiap Satker, tidak hanya sebatas melakukan rekapitulasi data.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penugasan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Reviu terhadap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pemerintah (PIPK) pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 021/AI.02/TU/H/2026 tanggal 8 Januari 2025.

B. Tujuan

Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan memastikan hasil penilaian PIPK oleh Tim Penilai telah memenuhi kualitas standar yang diharapkan, serta objektivitas peneilaiannya dapat ditingkatkan.

C. Ruang Lingkup

Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari Laporan Hasil Penilaian PIPK Badan Kepegawaian Negara (BA 088) yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK UAPA Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor 129 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penguatan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2025

D. Metodologi

Prosedur reuiu dilakukan dengan menggunakan metodologi:

1. Reuiu Dokumen

Dilakukan terhadap Kertas Kerja Penilaian (KKP) untuk mengevaluasi:

- Kecukupan identifikasi proses bisnis/transaksi utama dan risiko signifikan terkait pelaporan keuangan.
- Relevansi pengendalian utama dalam memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
- Kualitas pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) serta ketepatan metodologi pengambilan sampel pada pengujian atribut pengendalian.

2. Verifikasi dan Konfirmasi

Dilakukan untuk memvalidasi validitas data dengan cara:

- Melakukan rekonsiliasi antara bukti dukung penilaian PITE dengan hasil yang dituangkan dalam KKP.
- Memastikan keberadaan bukti fisik/digital dari sampel pengujian atribut pengendalian.
- Melakukan konfirmasi kepada Tim Penilai guna memperoleh klarifikasi atas ketidakkonsistenan data atau bukti pendukung yang ditemukan.

3. Wawancara

Dilakukan kepada Tim Penilai, operator aplikasi (SIMAN/SAKTI), serta pemilik pengendalian (*control owner*) untuk:

- Mendalami pemahaman atas desain dan implementasi Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).
- Menilai efektivitas pengujian pengendalian aplikasi (*application controls*) yang telah dilakukan oleh Tim Penilai.

4. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Dilakukan secara independen terhadap atribut pengendalian tertentu untuk menguji konsistensi pelaksanaan pengendalian. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa simpulan Tim Penilai dapat diandalkan dan untuk mengidentifikasi potensi salah saji material yang timbul akibat kegagalan pengendalian.

5. Analisis

Dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh hasil pengujian dan simpulan yang dihasilkan oleh Tim Penilai. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa opini atau tingkat efektivitas PIPK yang dihasilkan telah didukung oleh bukti yang cukup dan kompeten.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penilaian PIPK dilakukan menggunakan perangkat Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun signifikan nomor 11/KU.04/BA/A/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penentuan Akun Signifikan.
2. Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor APIP yang ditugaskan untuk melakukan reviu PIPK atas Penilaian oleh Tim Penilai, maka entitas akuntansi yang direviu dilakukan secara uji petik (sampling) dengan penentuan Akun Gedung dan Bangunan (133111) sebagai akun signifikan yang ditetapkan manajemen. Berdasarkan hal tersebut, uji petik dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Entitas akuntansi yang pernah / memiliki temuan pemeriksaan BPK pada akun Gedung dan Bangunan;
 - b. Keterwakilan Entitas akuntansi berdasarkan sebaran wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara.

Dari pertimbangan sebagaimana di atas maka untuk tingkat entitas akuntansi yang dilakukan reviu sebagai uji petik (sampling) terdiri dari Kantor Pusat BKN, Kantor Regional III BKN, Kantor regional IV BKN dan Kantor Regional IX BKN.

BAB III

HASIL REVIU

A. Kinerja yang Memuaskan/Capaian

Penentuan ruang lingkup dan materialitas untuk tingkat entitas akuntansi telah dilakukan secara wajar yaitu :

1. Tim Penilai telah ditetapkan untuk di tingkat UAKPA dan UAPA;
2. Akun signifikan telah ditetapkan dan dituangkan pada Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan dengan diketahui pihak Tim Penilai UAPA dan Manajemen Pemilik Bisnis Proses;
3. Dalam penentuan akun signifikan telah menggunakan beberapa pertimbangan yaitu:
 - Kerentanan terhadap kecurangan
 - Kompleksitas dan keseragaman transaksi
 - Subjektivitas dan pertimbangan menentukan saldo akun
 - Sifat akun yang memperoleh perhatian besar terkait temuan BPK
 - Kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan

Namun, penentuan ruang lingkup dan materialitas yang dilakukan masih terdapat penyimpangan yaitu Anggota tim penilai yang disusun terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha beserta staffnya untuk yang di Kantor Regional serta Staf atau Pejabat Fungsional di Biro Keuangan yang merupakan bagian manajemen pemilik bisnis proses. Hal ini menyebabkan penilaian dapat dilakukan dengan tidak secara wajar dan terjadi *conflict of interest*.

B. Identifikasi Risiko dan Kecukupan rancangan Pengendaliannya (Tabel A)

Berdasarkan hasil reuiu, Tim Penilai telah melakukan pengujian Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi. Namun, Tim penilai melakukan penilaian belum secara wajar. Adapun penilaian tersebut hanya dilakukan pada level penilaian PIPK UAKPA dengan uraiannya sebagai berikut:

- a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan;
 - 2) Penilaian;
 - 3) Pemindahtanganan; dan
 - 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- b. Usulan koreksi yang dibuat oleh Tim Penilai untuk pengendalian yang dinyatakan tidak memadai belum tepat;
- c. Penyusunan tabel A seharusnya telah dimulai dari bulan Januari s.d Maret dan Tim Penilai melakukan penilaian dan penetapan Tabel A dilakukan revidu penilaian Tabel A oleh Tim Revidu pada bulan April s.d Agustus.
- d. Revidu untuk Tabel A hanya dilakukan pada Tingkat UAPA dan akan digunakan secara generik di level UAKPA.

C. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1)

- a. Tim penilai melakukan penilaian atas risiko utama dan pengendalian yang diidentifikasi oleh pemilik pengendali didapatkan hasil memadai dan disimpulkan tidak cukup dan ada risiko utama yang disajikan ke Tabel A.1. Namun, berdasarkan hasil revidu dokumen atas identifikasi risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Revidu PIPK didapatkan hasil, tidak ada perubahan pengendalian pada Tabel A.1
- b. Revidu untuk Tabel A hanya dilakukan pada Tingkat UAPA dan akan digunakan secara generik di level UAKPA.

D. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas / PITE (B1)

1. Kantor Pusat BKN

Hasil reviu terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar dengan Penilaian PITE (Tabel B.1) sesuai dengan PMK-17/KMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum terdapat program kerja penilaian PITE yang disusun oleh Tim Penilai yang mendefinisikan dengan jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, teknik evaluasi, waktu pelaksanaan, dokumen/laporan yang dibutuhkan, SDM yang terlibat, serta cara penarikan simpulan.

Selain itu, penilaian PITE yang dilakukan belum disertai dokumen pendukung yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan proses reviu dokumen yang hanya melihat keberadaan dokumen dan tidak terdapat analisis lebih mendalam atas kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh unit kerja. Proses wawancara yang dilakukan juga dijabarkan dalam spreadsheet berisi jawaban Ya/Tidak dan belum terdapat berita acara hasil wawancara. Tim Penilai juga tidak melampirkan dokumen pendukung dasar penentuan responden survei, hasil survei, dan hasil observasi yang dilakukan. Dengan demikian, pemberian skor 1 pada kertas kerja belum dapat diyakini keandalannya.

2. Kantor Regional III BKN

Hasil reviu terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Regional III BKN telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar dengan Penilaian PITE (Tabel B.1) pada PMK-17/KMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu bukti pendukung yang disampaikan masih terbatas pada hasil survei yang belum memadai, sementara sebagian bukti reviu dokumen dinilai kurang relevan. Selain itu, dokumentasi atas wawancara dan observasi tidak dilampirkan. Dengan kondisi tersebut, pemberian skor "1" pada setiap faktor yang dinilai pada tingkat entitas belum dapat diyakini keandalannya.

3. Kantor Regional IV BKN

Hasil revid terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Regional IV BKN telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar dengan Penilaian PITE (Tabel B.1) pada PMK-17/KMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu bukti pendukung yang disampaikan masih terbatas pada hasil survei yang belum memadai, sementara sebagian bukti revid dokumen dinilai kurang relevan. Selain itu, dokumentasi atas wawancara dan observasi tidak dilampirkan. Dengan kondisi tersebut, pemberian skor "1" pada setiap faktor yang dinilai pada tingkat entitas belum dapat diyakini keandalannya.

4. Kantor Regional IX BKN

Hasil revid terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Regional IX BKN telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar dengan Penilaian PITE (Tabel B.1) pada PMK-17/KMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu bukti pendukung yang disampaikan masih terbatas pada hasil survei yang belum memadai, sementara sebagian bukti revid dokumen dinilai kurang relevan. Selain itu, dokumentasi atas wawancara dan observasi tidak dilampirkan. Dengan kondisi tersebut, pemberian skor "1" pada setiap faktor yang dinilai pada tingkat entitas belum dapat diyakini keandalannya.

E. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi / PUTIK (B2)

1. Kantor Pusat BKN

Hasil revid terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) diketahui bahwa secara umum Tim Penilai Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar sesuai dengan ketentuan Penilaian PUTIK (Tabel B.2) pada PMK-17/PMK.09/2019. Namun hasil pengujian tidak dapat diyakini karena tidak terlampir bukti dukung yang memadai.

2. Kantor Regional III BKN

Hasil reviu terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) diketahui bahwa secara umum Tim Penilai Kantor Regional III BKN telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar sesuai dengan ketentuan Penilaian PUTIK (Tabel B.2) pada PMK-17/PMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum lengkapnya dokumen pendukung atas pengujian yang dilakukan terhadap seluruh pengendalian utama. Dengan kondisi tersebut, kesimpulan hasil pengujian yang dinyatakan “Efektif” belum dapat diyakini keandalannya.

3. Kantor Regional IV BKN

Hasil reviu terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) diketahui bahwa secara umum Tim Penilai Kantor Regional IV BKN telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar sesuai dengan ketentuan Penilaian PUTIK (Tabel B.2) pada PMK-17/PMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum lengkapnya dokumen pendukung atas pengujian yang dilakukan terhadap seluruh pengendalian utama. Dengan kondisi tersebut, kesimpulan hasil pengujian yang dinyatakan “Efektif” belum dapat diyakini keandalannya.

4. Kantor Regional IX BKN

Hasil reviu terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) diketahui bahwa secara umum Tim Penilai Kantor Regional IX BKN telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar sesuai dengan ketentuan Penilaian PUTIK (Tabel B.2) pada PMK-17/PMK.09/2019. Namun, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum lengkapnya dokumen pendukung atas pengujian yang dilakukan terhadap seluruh pengendalian utama. Dengan kondisi tersebut, kesimpulan hasil pengujian yang dinyatakan “Efektif” belum dapat diyakini keandalannya.

F. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian atribut pengendalian pada Tabel C.1 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Penentuan Sampel

Tim Penilai telah melakukan penilaian dengan metode yang tepat yaitu sensus dikarenakan populasi dokumen yang akan dinilai kurang dari seratus.

b. Pelaksanaan dan Penilaian Hasil *Reperformance*

Pengisian Tabel C.1-133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan kurang tepat dimana dokumen sebelum dan sesudah *reperformance* belum terlampir disertai dengan matriks analisis perbedaan dan perhitungan hasil analisis sehingga belum menggambarkan hasil Penilaian Efektivitas Pengendalian dan Kelemahan Pengendalian sesuai PMK no.17 Tahun 2019.

2. Kantor Regional III BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian atribut pengendalian pada Tabel C.1 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional III BKN, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Penentuan Sampel

Tim Penilai telah melakukan penilaian dengan metode yang tepat, yaitu sensus dikarenakan populasi dokumen yang akan dinilai kurang dari seratus.

b. Pelaksanaan dan Penilaian Hasil *Reperformance*

Pengisian Tabel C.1-133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan kurang tepat, karena terdapat kelemahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat proses/ transaksi utama pada Tabel A yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pada Tabel A belum dicantumkan tahapan Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, sehingga Risiko Utama, Pengendalian Utama, dan Dokumen Pendukung atas proses tersebut belum terpetakan.
2. Terdapat ketidaksesuaian dalam penamaan proses/ transaksi utama pada Tabel A, yaitu hanya mencantumkan “Pengamanan Gedung dan Bangunan”, padahal seharusnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan”. Akibatnya, belum tersedia informasi mengenai Risiko Utama, Pengendalian Utama, dan Dokumen Pendukung yang berkaitan dengan proses Pemeliharaan.
3. Masih ditemukan Pengendalian Utama pada Tabel C.1 yang tidak konsisten atau tidak selaras dengan Pengendalian Utama yang tercantum pada Tabel A.

3. Kantor Regional IV BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian atribut pengendalian pada Tabel C.1 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IV BKN, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Penentuan Sampel

Tim Penilai telah melakukan penilaian dengan metode yang tepat yaitu sensus dikarenakan populasi dokumen yang akan dinilai kurang dari seratus.

b. Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Reperformance

Pengisian Tabel C.1–133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan masih kurang tepat, karena beberapa dokumen pendukung belum dilampirkan. Selain itu, dokumen yang telah dilampirkan maupun yang belum tersedia, belum dapat diidentifikasi secara jelas pengendalian utama apa saja yang telah dilakukan pengujian atribut.

4. Kantor Regional IX BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian atribut pengendalian pada Tabel C.1 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IX BKN, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Penentuan Sampel

Tim Penilai telah melakukan penilaian dengan metode yang tepat, yaitu dengan metode sensus karena populasi dokumen yang akan dinilai kurang dari seratus ($N < 100$) sehingga seluruh populasi dokumen harus diperiksa satu per satu. Namun, masih terdapat kelemahan yaitu Tim Penilai Kantor Regional IX BKN tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh populasi dokumen, sehingga tidak dapat diyakini apakah seluruh atribut utama pengendalian telah memadai.

b. Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Reperformance

Pengisian Tabel C.1–133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan masih kurang tepat, karena beberapa dokumen pendukung belum dilampirkan. Selain itu, dokumen yang telah dilampirkan maupun yang belum tersedia, belum dapat diidentifikasi secara jelas pengendalian

G. Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada akun signifikan Badan Kepegawaian Negara tidak ditemukan pengendalian aplikasi pada Tabel A, sehingga pengujian pengendalian aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Pusat BKN.

2. Kantor Regional III BKN

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada akun signifikan Badan Kepegawaian Negara tidak ditemukan pengendalian aplikasi pada Tabel A, sehingga pengujian pengendalian aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional III BKN.

3. Kantor Regional IV BKN

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada akun signifikan Badan Kepegawaian Negara tidak ditemukan pengendalian aplikasi pada Tabel A, sehingga pengujian pengendalian aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IV BKN.

4. Kantor Regional IX BKN

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada akun signifikan Badan Kepegawaian Negara tidak ditemukan pengendalian aplikasi pada Tabel A, sehingga pengujian pengendalian aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IX BKN.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil reuiu, tim penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) namun tidak tepat. Seharusnya, Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan karena pada Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) serta Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) tidak terdapat tipe pengendalian Aplikasi.

H. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (D)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan reuiu terhadap penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian pada Tabel D yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Implementasi Pengendalian dan Menilai Kelemahan

Berdasarkan analisis, input pengendalian utama pada tabel D telah didukung oleh kesimpulan pengendalian pada Tabel B.1, B.2, dan C.1 telah dituangkan ke dalam Tabel D, terkecuali Tabel C.2 yang tidak terdapat pengendalian utama dengan tipe pengendalian aplikasi sehingga tidak perlu dituangkan pada Tabel D. Namun, berdasarkan hasil reuiu masih terdapat kelemahan, yaitu usulan koreksi yang dinyatakan “Tuntas” sehingga menghasilkan hasil penilaian kelemahan tidak signifikan belum dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan dan memadai.

Atas kondisi tersebut, disarankan kepada Tim Penilai Kantor Pusat BKN agar melakukan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian dengan disertai dokumentasi atas bukti dukung yang relevan dan memadai.

b. Membuat Simpulan PIPK

Berdasarkan reuiu atas simpulan PIPK diperoleh hasil Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian. Hal ini telah sesuai dengan Hasil Penilaian

Kelemahan pada Tabel D kolom (6), yaitu terdapat 1 (satu) “Kelemahan Signifikan”.

2. Kantor Regional III BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian pada Tabel D yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional III BKN diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Implementasi Pengendalian dan Menilai Kelemahan

a.1 Berdasarkan analisis, input pengendalian utama pada tabel D telah didukung oleh kesimpulan pengendalian pada Tabel B.1, B.2 dan C.1 telah dituangkan ke dalam Tabel D, Terkecuali Tabel C.2 yang tidak terdapat pengendalian utama dengan tipe pengendalian aplikasi sehingga tidak perlu untuk dituangkan pada Tabel D.

a.2 Perlu dilakukan perubahan simpulan pada Tabel C.1-133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan pada penilaian Tabel B.1, Tabel B.2, dan Tabel C.1, sehingga simpulan efektivitas implementasi pada Tabel D yang dinyatakan "Efektif" tidak dapat diyakini kebenarannya

b. Membuat Simpulan PIPK

Berdasarkan reviu atas simpulan PIPK diperoleh hasil Pengendalian Intern Efektif belum sesuai karena beberapa bukti pendukung belum dilampirkan serta terdapat bukti dukung yang belum memadai, sehingga Tim Penilai Kantor Regional III BKN perlu mengubah simpulan PIPK menjadi “Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)”.

3. Kantor Regional IV BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian pada Tabel D yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IV BKN diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Implementasi Pengendalian dan Menilai Kelemahan

Berdasarkan analisis, input pengendalian utama pada tabel D telah didukung oleh kesimpulan pengendalian pada Tabel B.1, B.2 dan C.1 telah dituangkan ke dalam Tabel D, terkecuali Tabel C.2 yang tidak terdapat pengendalian utama dengan tipe pengendalian aplikasi sehingga tidak perlu untuk dituangkan pada Tabel D. Namun, berdasarkan hasil reviu terdapat kelemahan yaitu karena pada sampling tabel B.1, hanya terlampir bukti dukung survei PITE yang belum memadai, dan belum terlampirnya bukti dukung reviu dokumen, wawancara dan observasi; Tabel B.2, belum terlampirnya dokumen pendukung yang memadai; Tabel C.1 belum terlampirnya beberapa dokumen pendukung yang belum dilampirkan.

b. Membuat Simpulan PIPK

Berdasarkan reviu atas simpulan PIPK diperoleh hasil Pengendalian Intern Efektif belum sesuai karena beberapa bukti pendukung belum dilampirkan serta terdapat bukti dukung yang belum memadai, sehingga Tim Penilai Kantor Regional IV BKN perlu mengubah simpulan PIPK menjadi "Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)".

4. Kantor Regional IX BKN

Berdasarkan reviu terhadap penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian pada Tabel D yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IX BKN diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Implementasi Pengendalian dan Menilai Kelemahan

- a.1 Berdasarkan analisis, input pengendalian utama pada tabel D telah didukung oleh kesimpulan pengendalian pada Tabel B.1 dan Tabel B.2, serta seluruh pengendalian utama pada Tabel C.1 sudah dituangkan ke dalam Tabel D.
- a.2. Perlu dilakukan perubahan simpulan pada Tabel C.1-133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan pada penilaian Tabel B.1, Tabel B.2, dan Tabel C.1, sehingga simpulan efektivitas implementasi pada Tabel D yang dinyatakan "Efektif" tidak dapat diyakini kebenarannya.

b. Membuat Simpulan PIPK

Berdasarkan reviu atas simpulan PIPK diperoleh hasil Pengendalian Intern Efektif belum sesuai karena beberapa bukti pendukung belum dilampirkan serta terdapat bukti dukung yang belum memadai, sehingga Tim Penilai Kantor Regional IX BKN perlu mengubah simpulan PIPK menjadi "Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)".

I. Penilaian Kelemahan Gabungan (Tabel E)

Berdasarkan hasil reviu atas penilaian kelemahan gabungan, Tim Penilaian UAPA telah melaksanakan penilaian kelemahan gabungan telah dilakukan secara wajar dengan melakukan rekapitulasi dari penilaian tabel D pada Satker kemudian membuat simpulan sebelum penyesuaian, nilai penyesuaiannya hingga menetapkan simpulan PIPK Gabungan. Namun, atas penilaian tersebut hasilnya belum dapat diyakini kebenarannya dikarenakan penilaian yang dilakukan pada Tabel D oleh satker (UAKPA) yang dijadikan uji petik (sampling) masih belum sesuai ketentuan.

J. Simpulan PIPK Gabungan

Setelah mempertimbangkan hasil reviu dan penyajian pelaporan keuangan pada akun signifikan Gedung dan Bangunan (Akun 133111), maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Entitas Badan

Kepegawaian Negara adalah **Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)**.

K. Koreksi / Perbaikan yang Belum Dilakukan

Berdasarkan hasil reviu Inspektorat atas PIPK UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088), disarankan kepada Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dan UAPA agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan Ruang Lingkup dan Materialitas

Dalam penetapan Tim Penilai agar Tim diambil dari luar manajemen pemilik bisnis proses untuk menghindari terjadinya *Conflict of Interest*.

2. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (A)

a. Mengidentifikasi seluruh Proses/Transaksi Utama untuk akun signifikan Aset BMN yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020;

b. Melakukan konfirmasi lebih mendalam kepada pemilik pengendalian terkait identifikasi risiko utama, pada semua proses transaksi utama mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan terkait dengan akun signifikan Gedung dan Bangunan (133111);

c. Melakukan Penyusunan, penetapan dan penilaian dengan timeline yang sesuai.

3. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (A1)

a. Memberikan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya yang dinilai tidak memadai pada Tabel A dan kemudian dituangkan pada Tabel A1 sehingga mengeliminasi residual risk yang ada;

b. Melakukan proses penilaian dan perbaikan dengan timeline yang sesuai.

4. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas / PITE (B1)

Melakukan penyusunan program kerja penilaian PITE dan melakukan penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan dan memadai, seperti bukti revidi dokumen, hasil survei dengan jumlah responden sesuai dengan ketentuan minimal jumlah responden, hasil wawancara, dan hasil observasi;

5. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi / PUTIK (B2)

Melakukan pengujian PUTIK dengan dilaksanakan pada 2 (dua) area berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan didukung dokumen dan hasil wawancara yang memadai;

6. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)

Menyesuaikan kembali pengisian Tabel C.1-133111 Akun Signifikan Gedung dan Bangunan dengan melengkapi dokumen berupa dokumen pendukung sebelum dan sesudah *reperformance* disertai dengan matriks analisis perbedaan dan perhitungan hasil analisis sehingga menggambarkan hasil *reperformance* Penilaian Efektivitas Pengendalian dan Kelemahan Pengendalian sesuai PMK no.17 Tahun 2019;

7. Melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang harus didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai dengan metode pengujian atribut pengendalian menggunakan sensus atau *sampling* tergantung dari jumlah populasi yang diuji; dan


8. Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai.

L. Apresiasi

Inspektorat Badan Kepegawaian Negara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai selaku Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA maupun UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun Anggaran 2025 selama penugasan reviu berlangsung.

Jakarta, 25 Februari 2026

Inspektur,

 Ditandatangani Secara Elektronik
NENY ROCHYANY, S.Si.Apt., M.Si.



LAMPIRAN XIV

LAIN-LAIN



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon Maluku 97124
Website : www.malukuprov.go.id, Email : bpkadpromal@gmail.com

Ambon, 31 Juli 2025

Nomor : 000.5.3.3 / 369 / VII / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Penyampaian Nilai Aset Hibah Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Maluku kepada Badan
Kepegawaian Negara

Kepada

Yth. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar


di –
Makassar

Sesuai Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar Nomor 11/SPm-BMN/KR.IV/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Nilai Aset Hibah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku kepada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum pada Naskah Perjanjian Bersama Nomor : 000.2.3.2/680 dan Nomor 41/HM.04.01/2024 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 000.2.3.2/130 dan Nomor : 40/HM.04.01/2024 yang didalamnya belum tertera nilai aset tanah dimaksud.

Terkait hal tersebut, maka bersama ini disampaikan perhitungan Nilai Aset Tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.080.693.154,- (lima milyar delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Maluku, &


Rudi Waras Ardianto, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19721202 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Maluku di Ambon
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon
3. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon
5. Pertinggal



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Antara

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Dengan

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**HIBAH ASET TANAH SELUAS 10.000 M2 MILIK PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : 000.2.3.2/680

Nomor : 41/HM.04.01/2024

Pada Hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SADALI IE** : Penjabat Gubernur Maluku, berkedudukan di Ambon Jalan Pattimura Nomor 1, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/192/SJ Tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan. Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara sebagai Penerima Hibah, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023` tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
12. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1699 Tahun 2024 tentang Hibah Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku Seluas 10.000 M² Kepada Badan Kepegawaian Negara;

Maka berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH**

Hibah Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Negara dalam rangka Pembangunan Gedung Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Ambon di Provinsi Maluku.

Pasal 2 **OBJEK HIBAH**

- (1) Objek yang dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah Aset Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di *Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupate Maluku Tengah Provinsi Maluku.* dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Bandara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Permukiman Masyarakat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Permukiman Masyarakat
- (1) Pemberian hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan milik **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menyerahkan Tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** tanpa meminta ganti rugi atau resiko hukum apapun atas tanah tersebut dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menjamin bahwa dengan dihibahkan tanah dimaksud, maka secara hukum **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggunakan/memanfaatkan tanah dimaksud sesuai tujuan pemberian Hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:

Menggunakan/memanfaatkan tanah tersebut sesuai tujuan pemberian Hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

Menanggung segala resiko biaya yang terkait dengan Objek Hibah tersebut, meliputi : pembayaran pajak, iuran dan biaya lain yang timbul setelah Objek Hibah ini diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

SERAH TERIMA TANAH

- (1) Pada saat Perjanjian Hibah ini ditandatangani, maka **PIHAK PERTAMA** menyerahkan secara langsung tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tanah tersebut dalam kondisi baik dan siap dimanfaatkan.
- (3) Penyerahan tanah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah dengan tetap berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Maluku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak di tandatangani naskah perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan dilakukan *Addendum*.

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA ,

IMAS SUKMARIAH

PIHAK PERTAMA,

SADALI IE



GUBERNUR MALUKU

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor : 000.2.3.2/130

Nomor : 40/HM.04.01/2024

TENTANG

PENYERAHAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Ambon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SADALI IE**
Jabatan : Pj Gubernur Maluku.
Alamat : Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IMAS SUKMARIAH**
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati
Jakarta Timur 13640

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PARA PIHAK** melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah berupa Tanah, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor : 1699 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 dan Perjanjian Hibah Aset Tanah antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor :000.2.3/680 dan Nomor 41/HM.04.01/2024, tanggal 23 September 2024 untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Ambon di Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut :

Maluku Berlokasi di Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Kepada Badan Kepegawaian Negara untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Ambon di Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa sebidang Tanah seluas 10.000 M², yang terletak di Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Bandara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Permukiman Masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Permukiman Masyarakat

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya dari **PIHAK PERTAMA** Aset berupa Sebidang Tanah Seluas 10.000 M² sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
2. **PIHAK KEDUA** akan menggunakan tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Ambon di Provinsi Maluku;
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima ini;

Pasal 3

Bahwa dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pengelolaan Barang Milik Daerah yang diserahkan serta segala resiko yang timbul dari Pengelola Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan secara teknis akan dilaksanakan secara langsung antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA

IMAS SUKMARIAH

PIHAK PERTAMA

SADALI IE



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 900.1.13.5/1706/BPKAD/2024
NOMOR: 20/HM.04.01/2024**



Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. HADIANTO RASYID, S.E.** : Wali Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota nomor 1, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Kota Palu kepada Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (4) Permohonan Hibah Tanah/Gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor 1462/B-PL.03.04/SD/A/2024 Tanggal 4 Maret 2024.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian hibah ini adalah barang milik daerah berupa Tanah milik Pemerintah Kota Palu dengan jumlah harga perolehan/wajar sebesar **Rp.328.000.000,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Mamboro Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

PASAL 3
TUJUAN HIBAH

Tujuan pemberian hibah BMD Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk sarana perkantoran.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai BMD yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menghapus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Buku Induk Inventaris Pemerintah Kota Palu; dan
 - d. Menyerahkan bukti kepemilikan tanah kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menggunakan BMD berupa Tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palu yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang serta wajib melakukan penatausahaan barang;
 - c. Melaksanakan penyertifikatan atas bukti kepemilikan tanah dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Menyerahkan kembali objek hibah daerah sebagaimana dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KESATU** dalam hal objek hibah daerah dimaksud tidak dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi sarana perkantoran.

PASAL 5
PENYERAHAN OBJEK HIBAH

- (1) Penyerahan objek hibah daerah ini dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan perjanjian hibah ini.
- (2) Penyerahan objek hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Hibah ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan secara mediasi.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Serah Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini ataupun perubahan isi klausul Naskah Perjanjian Hibah ini akan ditetapkan kemudian dalam naskah adendum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
SEKRETARIS UTAMA BKN


PIHAK KESATU,
H. HADIANTO RASYID, S.E.
WALI KOTA PALU

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penguasaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tanah Pasar Mambo	01.01.11.02.01	0002	4000 M ²	2003	Kelurahan Mambo	Milik Pemda Kota Palu	26-Feb-04	19.05.04.01.4.0000		Pembelian	328,000,000	Mutasi Dari BPKAD



PIHAK KEDUA,

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
SEKRETARIS UTAMA BKN



PIHAK KESATU,

H. HADIANTO RASYID, S.E.
WALI KOTA PALU



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**NOMOR: 000.2.4/1707/BPKAD/2024
NOMOR: 5/PL.03.04/BA/A/2024**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. HADIANTO RASYID, S.E.** : Wali Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota nomor 1, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Permohonan Hibah Gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor 1462/B-PL.03.04/SD/A/2024 Tanggal 4 Maret 2024; dan

5. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Kota Palu dengan Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 900.1.13.5/1706/BPKAD/2024 dan Nomor: 20/HM.04.01/2024.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kota Palu kepada Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kota Palu berupa Tanah dengan jumlah harga perolehan/wajar sebesar **Rp.328.000.000,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Mamboro Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 untuk dipergunakan sebagai sarana Perkantoran.

Pasal 3

Terhitung mulai tanggal Serah Terima ini, hak dan kewajiban atas BMD Pemerintah Daerah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. memberikan data dan informasi yang jelas mengenai BMD yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 1 dari Buku Induk Inventaris Pemerintah Kota Palu; dan
 - d. menyerahkan bukti kepemilikan tanah kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menggunakan BMD berupa Tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palu yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang serta wajib melakukan penatausahaan barang;
 - c. melaksanakan penyertifikatan atas bukti kepemilikan tanah dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menyerahkan kembali objek hibah daerah sebagaimana dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KESATU** dalam hal objek hibah daerah dimaksud tidak dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi sarana perkantoran.

Pasal 4

- (1) Berita Acara Serah Terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas;
- (3) Sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan atas barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (4) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
SEKRETARIS UTAMA BKN



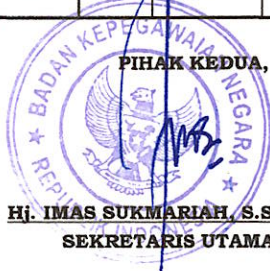
PIHAK KESATU,

H. HADIANTO RASYID, S.E.
WALI KOTA PALU

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tanah Pasar Mambo	01.01.11.02.01	0002	4000 M ²	2003	Kelurahan Mambo	Milik Pemda Kota Palu	26-Feb-04	19.05.04.01.4.00000		Pembelian	328,000,000	Mutasi Dari BPKAD

PIHAK KEDUA,



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
SEKRETARIS UTAMA BKN

PIHAK KESATU,



H. HADIANTO RASYID, S.E.
WALI KOTA PALU



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH (BMD) MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : 900/753.d/BKAD/2024
Nomor : 17/PL.03.04/BA/A/2024

Pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-11-2024)**, bertempat di **Palangka Raya**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUHAMAD KATMA F. DIRUN** : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
4. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 900/551/BKAD/2024, Hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.
5. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: **900/753.c/BKAD/2024** dan Nomor: **45/HM.04.01/2024** Tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Badan Kepegawaian Negara.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Badan Kepegawaian Negara untuk lokasi pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara, dalam rangka menunjang pelayanan urusan administratif kepegawaian ASN wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Kepemilikan, hak, kewajiban dan tanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MAS SUKMARIAH

PIHAK KESATU,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
 NOMOR : 900/753.8/EXAD/2024
 NOMOR : 17/PL.03.04/BA/1A/2024
 TANGGAL : 4 November 2024

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG DISERAHTERIMAKAN
 KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No.	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN	SATUAN	LOKASI	DOKUMEN KEPEMILIKAN	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	1.3.1.01.001.001.012	Tanah Kaveling (dst)	1979	10 264	MP	Jl. Tjilik Riwut Km. 10.5 Palangka Raya	Tercatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	1.276.500.000,00	1.276.500.000,00	Sertifikat asli tidak ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hanya fotocopy
2	1.3.3.01.001.030.005	Rumah Jaga	1996	36	MP	Jl. Tjilik Riwut Km. 10.5 Palangka Raya	Tercatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	6.540.000,00	6.540.000,00	Rumah Jaga
TOTAL NILAI YANG DISERAHTERIMAKAN									1.283.040.000,00	

PIHAK KEDUA,

 HANS SUKMARIAH

PIHAK KESATU,

 MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

SEKRETARIAT DAERAH

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS KM. 24 SORONG TELP. 325852 - 325853

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000-2-3-2/3056

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ADI BREMANTYO, S.IP., M.Si

NIP. : 19750410199311003

Jabatan : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong,

Dengan ini menerangkan bahwa,

1. Barang milik daerah berupa tanah dan bangunan eks. Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang terletak di Jalan Sorong-Klamono Km.24 Kompleks Perkantoran Pemda yang telah dilakukan Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara untuk UPT BKN Sorong.
2. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 030/448/2017 dan Nomor : 22/A/KS/2017 tanggal 23 Mei 2017 (dilakukan Pinjam Pakai selama 5 tahun sejak 2017 sampai dengan 2022), dan Persetujuan Perpanjangan Pinjam pakai tertanggal 6 Juni 2022 selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2025.
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1300/B-PL.02.03/SD/A/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai tanah dan bangunan untuk UPT BKN Sorong.
4. Merujuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 030/954 dan Nomor : 33/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 30.000 m² untuk Pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Papua Barat.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan kebutuhan bangunan kantor bagi OPD Kabupaten Sorong, maka Pemerintah Kabupaten Sorong tidak dapat menyetujui perpanjangan pinjam pakai namun diberikan penambahan waktu penggunaan sampai dengan bulan Desember tahun 2026 untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aimas, 15 Agustus 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ADI BREMANTYO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750410199311003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sorong, di Aimas
2. Inspektur Kabupaten Sorong, di Aimas
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong, di Aimas
4. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, di Aimas



Badan Kepegawaian Negara

**Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur
Telp. (021) 8092423/80930008 | Fax. (021) 8010301
www.bkn.go.id**

